# LAPORAN KINERJA
# DINAS PENGAIRAN ACEH

## TAHUN 2025

Dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap transparansi, kami mempersembahkan Laporan Kinerja Diinas Pengairan Aceh Tahun 2025



JANUARI 2026

pengairan.acehprov.go.id
pengairanaceh
Dinas Pengairan Aceh Official

**P E M E R I N T A H  A C E H**
**D I N A S  P E N G A I R A N**
Jalan Ir. H. Mohd. Thaher Nomor 18, Lueng Bata – Banda Aceh Kode Pos 23247
Telepon (0651) 21982, 21919, 24212, Faksimili (0651) 23686
*E-mail* : pengairan@acehprov.go.id, *Website* : pengairan.acehprov.go.id

Banda Aceh, 30 Januari 2026
11 Sya'ban 1447

**Yang Terhormat,**

**Gubernur Aceh**
**u.p. Biro Organisasi Sekretariat**
**Daerah Aceh**

**di –**

**Banda Aceh**

# SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.8.6.3/200

| No | Macam yang Dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengairan Tahun 2025 | 1 (satu) eks | Menindaklanjuti surat dari Gubernur Aceh No. 000.8.6.3/19878 tanggal 06 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Dengan hormat kami sampaikan dokumen dimaksud berupa *hardcopy* beserta *softcopy* untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |

**Plt. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH,**

**ERWIN FERDINANSYAH, S.T, M.T**
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760326 200312 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, sebagai perwujudan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yanga akan datang.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini, saya selaku Kepala Dinas Pengairan Aceh mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dan memberikan konstribusi didalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengairan Tahun 2025. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangatlah diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 30 Januari 2026

**Plt. KEPALA DINAS PENGAIRAN**

**ERWIN FERDINANSYAH, ST., MT**
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760326 200312 1 003

# DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2025

# DAFTAR ISI

Halaman

**KATA PENGANTAR** ..... **i**

**DAFTAR ISI** ..... **ii**

**DAFTAR TABEL** ..... **v**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **viii**

**RINGKASAN EKSEKUTIF** ..... **1**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **I - 1**

1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pengairan . I - 4
1.2.1 Tugas ..... I - 4
1.2.2 Fungsi ..... I - 5
1.2.3 Susunan Organisasi ..... I - 6
1.3 Sumber Daya Dinas Pengairan ..... I - 40
1.4 Sarana dan Prasarana ..... I - 52
1.5 Aspek Strategis ..... I - 53

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** ..... **II - 1**

2.1 Renstra Tahun 2023 – 2026 ..... II - 1
2.1.1 Visi dan Misi ..... II - 2
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengairan ..... II - 3
2.1.3 Program dan Kegiatan ..... II - 4
2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) ..... II - 8

Halaman

2.1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... II - 9
2.1.6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ..... II - 10
2.2 Metode Pengukuran ..... II - 10
2.2.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis ..... II - 11

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... III - 1**

3.1 Capaian Kerja ..... III - 1
3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2025 ..... III - 1
3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 ..... III - 12
3.2.1 Perbandingan antara Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III - 13
3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025, Target Renstra Tahun 2023 – 2026 dan Target RPA Tahun 2023 - 2025 ..... III - 15
3.2.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2029 ..... III - 17
3.3 Analisis Kinerja Kegiatan ..... III - 19
3.3.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Pengairan Tahun 2025 ..... III - 19
3.3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan ..... III - 20
3.3.3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tiap Program pada Dinas Pengairan ..... III - 22
3.4 Pagu Anggaran Dinas Pengairan Tahun 2025 ..... III - 57

Halaman

3.5 Realisasi Keuangan ……..……..... III - 59

3.6 Perbandingan Kinerja dengan Instansi Lain yang Sejenis ... III - 63

3.7 Dampak Infrastruktur SDA Pasca Bencana Hidrometeorologi …….. III - 64

3.8 Prestasi/Penghargaan yang diperoleh pada Tahun 2025 …... III - 69

**BAB IV PENUTUP ..... IV - 1**

4.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ..... IV - 1

4.2 Realisasi Keuangan ..... IV - 2

4.3 Permasalahan, Kendala dan Hambatan..... IV - 5

4.4 Rekomendasi Langkah-langkah Antisipasi Pada Tahun Mendatang ..... IV - 6

**Lampiran**

a. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengairan Tahun 2025
b. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025
c. Dokumentasi Kegiatan Tahun Anggaran 2025

# DAFTAR TABEL

## LAPORAN KINERJA
## DINAS PENGAIRAN ACEH
## TAHUN 2025

# DAFTAR TABEL


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Tabel 1 | Pengukuran Capaian Sasaran Strategis | 2 |
| Tabel 2 | Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja | 2 |
| Tabel 3 | Penetapan Anggaran Dinas Pengairan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir | 4 |
| Tabel 1.1 | Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Terakhir | I - 41 |
| Tabel 1.2 | Komposisi Pegawai (PNS), PPPK dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan | I – 44 |
| Tabel 1.3 | Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan | I - 45 |
| Tabel 1.4 | Komposisi PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan | I - 46 |
| Tabel 1.5 | Komposisi Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan | I - 47 |
| Tabel 1.6 | Komposisi Jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak berdasarkan Jenis Kelamin | I - 48 |
| Tabel 1.7 | Komposisi PNS berdasarkan Rentang Usia | I – 49 |
| Tabel 1.8 | Komposisi PPPK berdasarkan Rentang Usia | I – 50 |
| Tabel 1.9 | Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Rentang Usia | I – 51 |
| Tabel 1.10 | Sarana dan Prasarana Dinas Pengairan Aceh | I - 52 |
| Tabel 1.11 | Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal dengan menggunakan metode SWOT | I – 56 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengairan | II - 3 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pengairan | II - 9 |
| Tabel 2.3 | Tabel Kriteria Penilaian | II - 10 |
| Tabel 2.4 | Pengukuran Kinerja | II - 11 |

Halaman


Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 ..... III - 2

Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan I ..... III - 4

Tabel 3.3 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan II ..... III - 6

Tabel 3.4 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan III ..... III - 8

Tabel 3.5 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan IV ..... III - 10

Tabel 3.6 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ... III - 13

Tabel 3.7 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III - 14

Tabel 3.8 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025, Target Renstra Tahun 2025 dan Target RPA Tahun 2025 ..... III - 16

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2029 ..... III - 18

Tabel 3.10 Permasalahan dan Solusi Dinas Pengairan Tahun 2025 ..... III - 21

Tabel 3.11 Komposisi Pagu Dinas Pengairan Tahun 2025 ..... III - 58

Tabel 3.12 Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja..... III - 60

Tabel 3.13 Penetapan Anggaran Dinas Pengairan Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir Serta Realisasi Anggaran ..... III - 61

Tabel 3.14 Realisasi Keuangan Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2025 ..... III - 62

Tabel 3.15 Prestasi/Penghargaan yang Diperoleh Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025 ..... III - 69

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IV - 2

Tabel 4.2 Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja ..... IV – 3

Halaman

Tabel 4.2 Penetapan Anggaran Dinas Pengairan Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir Serta Realisasi ..... IV - 4

# DAFTAR GAMBAR

LAPORAN KINERJA
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2025

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Persentase Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja ..... 3

Gambar 2 Persentase Penyerapan Anggaran Dinas Pengairan serta Realisasi 5 Tahun Terakhir ..... 4

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengairan Aceh ..... I - 39

Gambar 1.2 Diagram Komposisi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pengairan Berdasarkan Pendidikan Terakhir ..... I - 41

Gambar 1.3 Diagram Komposisi PPPK Pada Dinas Pengairan Berdasarkan Pendidikan Terakhir ..... I - 42

Gambar 1.4 Diagram Komposisi Tenaga Kontrak Pada Dinas Pengairan Berdasarkan Pendidikan Terakhir ..... I - 43

Gambar 1.5 Diagram Komposisi PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak Dinas Pengairan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan ..... I - 44

Gambar 1.6 Grafik Komposisi PNS Dinas Pengairan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... I - 45

Gambar 1.7 Grafik Komposisi PPPK Dinas Pengairan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... I - 46

Gambar 1.8 Grafik Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Pengairan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... I - 47

Gambar 1.9 Grafik Komposisi PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak Dinas Pengairan Berdasarkan Jenis Kelamin ..... I - 48

Gambar 1.10 Grafik Komposisi PNS Dinas Pengairan Berdasarkan Rentang Usia ..... I - 49

Gambar 1.11 Grafik Komposisi PPPK Dinas Pengairan Berdasarkan Rentang Usia ..... I - 50

Gambar 1.12 Grafik Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Pengairan Berdasarkan Rentang Usia ..... I - 51

Halaman


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 3.1 | Time Schedule (Kurva "S") Dinas Pengairan Aceh ..... | III - 3 |
| Gambar 3.2 | Postur Pagu Anggaran Dinas Pengairan Tahun 2025 ..... | III - 59 |
| Gambar 3.3 | Persentase Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja .... | III - 60 |
| Gambar 3.4 | Persentase Penetapan Anggaran Dinas Pengairan Serta Realisasi 5 Tahun Terakhir ..... | III - 61 |
| Gambar 4.1 | Persentase Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja .... | IV – 3 |
| Gambar 4.2 | Persentase Penetapan Anggaran Dinas Pengairan Serta Realisasi 5 Tahun Terakhir ..... | IV - 4 |

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## LAPORAN KINERJA
## DINAS PENGAIRAN ACEH
## TAHUN 2025

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Suksesnya pembangunan bidang pengairan tahun 2025 terletak pada komitmen dan kerja keras bersama sesuai dengan Visi Aceh dalam pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026 yaitu

**"ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA"**

Pengukuran capaian sasaran strategis Dinas Pengairan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan target yang harus dicapai pada tahun 2025 dengan tidak terlepas dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi mampu membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya Daerah Irigasi Permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah menurun disebabkan kondisi saluran, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik.

Tingkat capaian sasaran strategis Dinas Pengairan Aceh tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

**Tabel 1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis**

| Sasaran Strategis : Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Persentase Capaian** | **Persentase terhadap target akhir RPA 2026** |
| **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | | | | |
| Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % | 56,54 % | 97,25% | 60,11% |
| **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** | | | | |
| Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % | 72,98 % | 97,15% | 77,67% |
| Persentase Luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama | 41,16 % | 40,11 % | 97,45% | 42,56% |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | **97,28%** | **60,11%** |

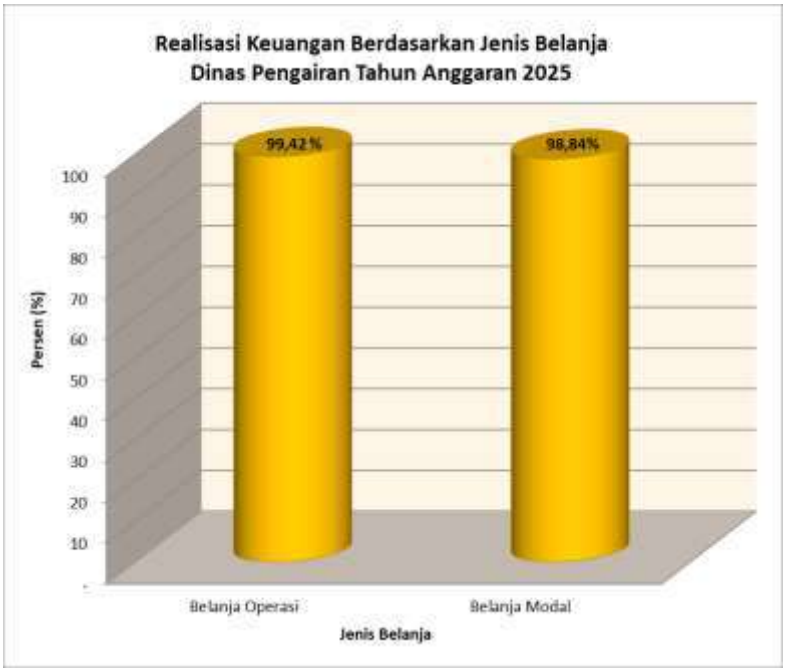
*Sumber : Dinas Pengairan, 2025*

Dalam melaksanakan kegiatan, Dinas Pengairan Aceh mengalokasikan dana yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Rincian realisasi keuangan berdasarkan jenis belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

**Tabel 2 Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja**

| NO. | JENIS BELANJA | DPA PERGESERAN II (Rp.) | REALISASI KEUANGAN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Rp.) | (%) |
| | **BELANJA DAERAH** | **108.199.484.251,00** | **107.345.779.164,00** | **99,21** |
| **I** | **BELANJA OPERASI** | **69.066.901.736,00** | **68.668.256.684,00** | **99,42** |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 36.632.425.595,00 | 36.443.650.908,00 | 99,48 |
| 1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.434.476.141,00 | 32.224.605.776,00 | 99,35 |
| **II.** | **BELANJA MODAL** | **39.132.582.515,00** | **38.677.522.480,00** | **98,84** |
| 2.1 | Belanja Modal Tanah | 859.662.646,00 | 819.685.816,00 | 95,35 |
| 2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 916.023.209,00 | 906.268.036,00 | 98,94 |
| 2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 200.000.000,00 | 199.399.678,00 | 99,70 |
| 2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 37.156.896.660,00 | 36.752.168.950,00 | 98,91 |

*Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pengairan Aceh, 31 Desember 2025*




**Gambar 1 Persentase Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja**

Tingkat pencapaian target indikator kinerja input berupa dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan dana APBA yang dapat direalisasi sebesar Rp. 107.345.779.164,- (Seratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau 99,21% dari total pagu anggaran setelah pergeseran II sebesar Rp. 108.199.484.251,- (Seratus Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) sehingga terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 853.705.087,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Penyerapan Anggaran Dinas Pengairan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

**Tabel 3 Penyerapan Anggaran Dinas Pengairan dalam 5 (lima) tahun terakhir**

| TAHUN | PAGU AKHIR (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 405.065.627.819 | 274.481.007.419 | 67,76 |
| 2022 | 360.530.165.158 | 352.487.116.847 | 97,77 |
| 2023 | 347.197.104.138 | 343.332.224.517 | 98,89 |
| 2024 | 174.602.584.785 | 167.548.071.978 | 95,96 |
| 2025 | 108.199.484.251 | 107.345.779.164 | 99,21 |

*Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pengairan Aceh, 31 Desember 2025*




**Gambar 2 Persentase Penyerapan Anggaran Dinas Pengairan 5 Tahun Terakhir**

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 2 diatas, penyerapan anggaran selama periode tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, tingkat penyerapan anggaran tercatat sebesar 67,76% yang relative lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh

pandemi Covid-19 yang berdampak pada pembatasan aktivitas lapangan, penyesuaian kebijakan pemerintah serta refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi sehingga pelaksanaan Sebagian program dan kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal. Pada tahun 2022 seiring dengan membaiknya kondisi dan pelonggaran pembatasan aktivitas, penyerapan anggaran meningkat signifikan menjadi 97,77%. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 98,89% yang mencerminkan semakin baiknya perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Tahun 2024 penyerapan anggaran tercatat sebesar 95,96%, meskipun mengalami sedikit penurunan namun tetap berada pada kategori sangat baik. Selanjutnya pada tahun 2025 penyerapan anggaran kembali meningkat dan mencapai 99,21%. Hal ini menunjukkan semakin optimalnya pengelolaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Permasalahan, kendala/hambatan selama pelaksanaan anggaran tahun 2025 yang diantaranya adalah :

1. Jumlah tenaga teknis dan manajerial belum mencukupi, serta kompetensi dalam perencanaan, pemeliharaan, dan mitigasi risiko bencana belum sepenuhnya memadai.
2. Terkait maraknya pelanggaran yang terjadi, diantaranya : pemanfaatan sepadan jaringan irigasi dengan mendirikan bangunan-bangunan liar diatas maupun dipinggir saluran irigasi seperti warung-warung, kios-kios, sadap liar, bercocok tanam diatas tanggul irigasi, pemanfaatan air irigasi diluar peruntukannya dan sebagainya yang dapat mengganggu kinerja irigasi pada hampir semua daerah irigasi.
3. Luas Daerah Irigasi pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, disebutkan bahwa luas Daerah Irigasi yang ditangani oleh Dinas Pengairan Aceh pada kenyataannya kondisi fungsional yang ada tidak mencapai lagi luasan yang telah ditetapkan bahkan terus berkurang seiring dengan adanya alih fungsi lahan.

4. Kondisi geografis yang telah terjadi yaitu bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur SDA dan irigasi.

Memperhatikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 yang sering mengganggu laju progress kegiatan di lapangan, perlu pula dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi permasalahan, kendala/hambatan yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. Adapun langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran tahun mendatang, antara lain :

1. Pengembangan SDM dengan dilakukannya pelatihan teknis dan manajerial secara berkala, standarisasi kompetensi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mendukung pengelolaan SDA.
2. Terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran diperlukan tindak turun tangan melalui upaya penertiban oleh pemerintah daerah setempat dengan melibatkan seluruh stake holder yang ada sesuai aturan yang berlaku, kondisi ini perlu dituntaskan sesegera mungkin agar permasalahan tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan dimasa mendatang.
3. Berkaitan dengan nomenklatur Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 untuk luasan Daerah Irigasi yang tidak sesuai dengan kondisi luasan yang ada dilapangan agar diusulkan revisi luasan pada tahun mendatang.
4. Peningkatan alokasi anggaran khususnya untuk pemeliharaan infrastruktur, penanggulangan rekonstruksi pasca bencana.

Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat mendorong dan menjadi acuan untuk melakukan Tindakan perbaikan dimasa yang akan datang dan sekaligus agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## LAPORAN KINERJA
## DINAS PENGAIRAN ACEH
## TAHUN 2025

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem terpadu yang digunakan oleh Instansi Pemerintah untuk merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan melaporkan kinerja secara akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari implementasi SAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta penggunaan anggaran yang dibiayai oleh negara.

Dasar hukum pelaksanaan SAKIP diatur dalam beberapa peraturan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pertanggungjawaban kinerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemprograman, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instasi pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja ini memiliki sejumlah manfaat strategis, diantaranya :

- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instasi kepada publik dan pemangku kepentingan;
- Sebagai alat untuk mengukur capaian hasil program/kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan manajemen kinerja dan pengalokasian sumber daya;
- Sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dengan demikian penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengairan Aceh tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) serta peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pengairan Aceh.

Sebagai daerah yang memiliki jaringan irigasi yang luas dan potensi sumber daya air yang besar, Aceh menghadapi tantangan dalam mengelola dan memelihara infrastruktur pengairan secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Dinas Pengairan Aceh memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa seluruh sistem irigasi dan pengendalian banjir berfungsi secara optimal, mendukung produktivitas pertanian serta meminimalisir resiko bencana yang diakibatkan oleh kerusakan infrastruktur atau perubahan iklim.

Dinas Pengairan Aceh merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pengelolaan sumber daya air. Keberadaan Dinas Pengairan sangat vital dalam memastikan ketersediaan dan distribusi air yang merata untuk berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, air baku dan pengendalian banjir serta dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta diselaraskan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan keterpaduan secara harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Sebagai daerah yang memiliki jaringan irigasi yang luas dan potensi sumber daya air yang besar, Aceh menghadapi tantangan dalam mengelola dan memelihara infrastruktur pengairan secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan Dinas Pengairan Aceh memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa seluruh sistem irigasi dan pengendalian banjir berfungsi secara optimal, mendukung produktivitas pertanian serta meminimalisir resiko bencana yang diakibatkan oleh kerusakan infrastruktur karena perubahan iklim.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2005-2025 pelaksanaan program dibidang sumber daya air (pengairan) dilaksanakan sesuai arah kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata serta mewujudkan Aceh lestari dan tangguh terhadap bencana menuju Aceh yang Islami, maju, damai dan sejahtera pada akhir tahun 2025. Terwujudnya pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata, indikator keberhasilan dapat diketahui dengan meningkatnya optimasi pemanfaatan ruang untuk aktifitas ekonomi didukung dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur sumber daya air (pengairan) yang berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dimasa mendatang dengan memperhatikan prinsip keselarasan dan perubahan iklim global melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal yang merupakan salah satu tanda terwujudnya Aceh lestari.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 disesuaikan dengan sasaran prioritas yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pengairan tahun 2023 – 2026, Rencana Kerja tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

## 1.2. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pengairan

Dinas Pengairan adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda. Adapun tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pengairan Aceh adalah sebagai berikut :

### 1.2.1 Tugas

Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pembangunan dibidang Sumber Daya Air meliputi :

a. Melaksanakan tugas Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program Pengairan secara menyeluruh;
b. Melaksanakan Tugas di bidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
c. Melaksanakan Tugas di bidang Sungai, Waduk dan Danau;
d. Melaksanakan Tugas di bidang Penyusunan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan dan Penataan Sumber Daya Air serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
e. Melaksanakan Tugas di bidang Operasi dan Pemliharaan Prasarana bidang Pengairan;
f. Melaksanakan Tugas di bidang Teknik dan Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Air.

### 1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengairan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
e. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber daya air;
f. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan jaringan sumber daya air;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pengelolaan sumber daya air;
h. Pembinaan UPTD;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengairan mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan Standar Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
b. Menyediakan dukungan/bantuan untuk kerjasama antara kabupaten/ kota dalam pengembangan dan pengelolaan dibidang sumber daya air;
c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang luasnya antara 1.000 – 3.000 Ha dan jaringan Pengairan lainnya yang berada pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota.

d. Mengurus Perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan-bangunan dan Saluran Jaringan serta Prasarana dan Sarana Pengairan;
e. Menyusun Rencana Penyediaan Air untuk Irigasi dan kebutuhan lainnya.

Dengan berlandaskan Tugas, Fungsi dan Kewenangan tersebut diatas, maka produk yang dihasilkan oleh Dinas Pengairan adalah:

a. Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis serta Administrasi meliputi Pengaturan, Pedoman, Kriteria, Standar Pelaksanaan untuk bidang Sumber Daya Air, sebagai pelaksanaan tugas Pemerintahan;
b. Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan serta Pembuatan Pedoman Standard dan Persyaratan yang berkaitan dengan Kegiatan Pelaksanaan, Perencanaan, Program dan Anggaran dari Pengelolaan Pengairan, sebagai tugas pembangunan;
c. Produk Pelayanan kepada *Stakeholder* berupa Fasilitas, Konsultasi Teknis, Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Informasi dari Pengairan;
d. Produk Pengendalian/Pengawasan berupa Evaluasi Pemanfaatan Sarana Pengairan berdasarkan ***Standar Pelayanan Minimum***.

### 1.2.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dengan demikian Susunan Organisasi Dinas Pengairan Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
   2.1. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum; dan

2.2. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Teknik dan Konstruksi, terdiri dari :

3.1. Seksi Teknik;

3.2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi;

3.3. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai, terdiri dari :

4.1. Seksi Rawa;

4.2. Seksi Pantai;

4.3. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Sungai, Danau dan Waduk, terdiri dari :

5.1. Seksi Sungai;

5.2. Seksi Danau dan Waduk;

5.3. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari :

6.1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;

6.2. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Tersier;

6.3. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. UPTD; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas yaitu memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan bidang bina teknik, konstruksi, irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk, operasi dan pemeliharaan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pengkoordinasian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- Pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas di bidang irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- Pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksana penelitian, pengkajian dan pengembangan jaringan sumber daya air;
- Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan sumber daya air; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan dan barang milik daerah/aset, penyusunan program dan anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, hokum, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pengairan Aceh.

   Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

   - Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
   - Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian terhadap pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
   - Pengelolaan administrasi keuangan;
   - Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;
- Pelayanan informasi di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
- Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pengairan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari beberapa Sub bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum, kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan dan perpustakaan.

3. Bidang Teknik dan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pembinaan tata teknik, monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi, pengembangan pengelolaan sumber daya air meliputi survei investigasi perencanaan irigasi, rawa, perencanaan bendungan, danau, situ, embung, sungai, air tanah, air baku, pantai serta konservasi fisik sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Teknik dan Konstruksi mempunyai fungsi :
   - Pelaksanaan pembinaan tata teknik, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis dan konstruksi pengelolaan sumber daya air;
   - Pelaksanaan perencanaan teknik meliputi survei, pemetaan dan investigasi serta perencanaan bidang pengelolaan sumber daya air;
   - Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air permukaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;
   - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknik dan Konstruksi terdiri dari beberapa seksi yaitu :

a. Seksi Teknik mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja seksi teknik, melakukan penelitian, pengkajian dokumen teknik, rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air permukaan, rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air.
b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

4. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai merupakan unsur pelaksana teknis di bidang irigasi, rawa dan pantai yang mempunyai tugas melakukan pembangunan dan peningkatan irigasi, reklamasi rawa serta pengendalian abrasi pantai. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai mempunyai fungsi :
   - Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;
   - Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang konstruksi irigasi, rawa dan pantai;
   - Pelaksanaan pengendalian, pengembangan dan fasilitasi konstruksi irigasi, rawa dan pantai;
   - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan konstruksi irigasi, rawa dan pantai;
   - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai terdiri dari beberapa Seksi, yaitu :

a. Seksi Rawa mempunyai tugas :
   - Menyusun bahan kebijakan teknis bidang konstruksi rawa dan tambak;
   - Melaksanakan pembinaan konstruksi rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan konstruksi rawa dan tambak;
   - Menyusun bahan kajian teknis bidang konstruksi rawa dan tambak;
   - Melaksanakan pembinaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan konstruksi rawa dan tambak;

- Melaksanakan pembinaan teknis konstruksi rawa dan tambak;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan progress dan hasil audit rawa dan tambak.

b. Seksi Pantai mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang konstruksi pantai dan jetty;
- Melaksanakan pembinaan teknis bidang konstruksi pantai dan jetty;
- Melaksanakan pembinaan konstruksi rehabilitasi dan pembangunan konstruksi pantai dan jetty;
- Melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis bidang konstruksi pantai dan jetty;
- Melaksanakan pembinaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan konstruksi pantai dan jetty;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan progress dan hasil audit pantai dan jetty.

5. Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan fasilitasi konstruksi, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan konstruksi, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, fasilitasi bantuan teknis konstruksi, pengendalian kegiatan konstruksi sungai, konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya serta hidrologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir dan pengaturan sungai;
- Pelaksanaan konservasi, pembangunan dan peningkatan waduk, embung dan tampungan air lainnya;
- Pengelolaan Sistim Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3);
- Pelaksanaan pengendalian daya rusak air;
- Penyusunan pelaporan pengelolaan informasi hidrologi dan kualitas air;

- Pembinaan pelaksanaan konstruksi rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan konstruksi sungai dan anak-anak sungai;
- Pengelolaan sarana dan prasarana hidrologi;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sungai, Danau dan Waduk terdiri dari beberapa Seksi, yaitu :

a. Seksi Sungai mempunyai tugas :
   - Melaksanakan pengendalian daya rusak air;
   - Menyusun bahan kebijakan teknis bidang konstruksi sungai;
   - Melaksanakan pembinaan teknis bidang konstruksi sungai;
   - Melaksanakan pembinaan konstruksi rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan konstruksi sungai dan anak-anak sungai;
   - Menyusun bahan kajian teknis bidang konstruksi sungai;
   - Melaksanakan pembinaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan konstruksi sungai.

b. Seksi Danau dan Waduk mempunyai tugas :
   - Melaksanakan pengendalian konservasi sumber daya air;
   - Melaksanakan bahan kebijakan teknis bidang konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya;
   - Melaksanakan pembinaan teknis bidang konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya;
   - Melaksanakan pembinaan konstruksi rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya;
   - Menyusun bahan kajian teknis bidang konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya;
   - Melaksanakan pembinaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya.

6. Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan teknis operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi koordinasi penanganan bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

   - Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, irigasi, rawa, tambak, danau, waduk dan tampungan air lainnya serta hidrologi;
   - Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan perencanaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, irigasi, rawa, tambak, danau, waduk dan tampungan air lainnya serta hidrologi;
   - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan perencanaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, irigasi, rawa, tambak, danau, waduk dan tampungan air lainnya serta hidrologi;
   - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan perencanaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, irigasi, rawa, tambak, danau, waduk dan tampungan air lainnya serta hidrologi;
   - Pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan air tahunan irigasi prediktif, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, dan fasilitasi pendukung antar kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan sumber daya air;

- Pelaksanaan fasilitasi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanganan bencana dan penyusunan informasi penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari beberapa Seksi, yaitu :

a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan sungai, danau, waduk dan pantai mempunyai tugas :
   - Melaksanakan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya dan hidrologi;
   - Menyusun bahan kebijakan teknis bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya dan hidrologi;
   - Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya dan hidrologi;
   - Melaksanakan pembinaan teknis operasi dan pemeliharaan sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya dan hidrologi;
   - Menyusun bahan kajian teknis operasi dan pemeliharaan sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya dan hidrologi;
   - Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya dan hidrologi;

- Melaksanakan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya dan hidrologi;
- Melaksanakan penyusunan dokumen rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, sarana dan prasarana pada sungai dan anak-anak sungai, pantai, jetty, konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya dan hidrologi; dan
- Melaksanakan fasilitasi koordinasi antar lembaga pengelolaan sungai tentang penanggulangan bencana.

b. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Tersier mempunyai tugas :

- Menyusun bahan kebijakan teknis rehabilitasi pengelolaan sumber daya air dan pembinaan kelembagaan pengelolaan irigasi;
- Melaksanakan rehabilitasi pengelolaan sumber daya air dan pembinaan kelembagaan pengelolaan irigasi;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis aspek rehabilitasi pengelolaan sumber daya air dan pembinaan kelembagaan pengelolaan irigasi;
- Menyusun rencana, program dan anggaran rehabilitasi pengelolaan sumber daya air dan pembinaan kelembagaan pengelolaan irigasi; dan
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres dan hasil audit rehabilitasi pengelolaan sumber daya air dan pembinaan kelembagaan pengelolaan irigasi.

7. Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Irigasi Wilayah I yang berkedudukan di Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata laksana dan kelembagaan, Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan monitoring evaluasi penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Sumber Daya Air Aceh. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana tersebut diatas, UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- Pelaksanaan tata laksana dan kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksanaan pengkoordinasian konsultasi dengan pihak terkait dalam pembahasan dan penyusunan isu-isu strategis dalam pengelolaan sumber daya air Aceh;
- Pelaksanaan penyusunan rekomendasi pengelolaan sumber daya air Aceh;
- Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan pengkoordinasian konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan dalam penyusunan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi Aceh;
- Pelaksanaan pengkoordinasian konsultasi dengan pihak terkait antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan guna keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air Aceh; dan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pengelolaan sumber daya air Aceh pada wilayah Sungai di Aceh.

UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

A. Kepala UPTD yang mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan tata usaha dan kelembagaan, Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan monitoring evaluasi penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh. penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan isu-isu strategis dalam Pengelolaan Irigasi air Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

    - Penyusunan rencana kerja pada UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh;

- Pengkoordinasian tata usaha dan kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
- Pengkoordinasian Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan Pengkoordinasian dengan pihak terkait guna keterpaduan dalam penyusunan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi;
- Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air Aceh;
- Pengkoordinasian dengan pihak terkait guna pembahasan dan penyusunan isu-isu strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
- Pengkoordinasian rencana kerja pelaksanaan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Aceh;
- Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, dan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha Pengelolaan Irigasi Wilayah I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   - Pelaksanaan penyusunan program kerja;
   - Pengelolaan administrasi kepegawaian;
   - Pengelolaan administrasi keuangan;
   - Pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
   - Pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
   - Pelaksanaan penyelenggaraan sidang Dewan Sumber Daya Air Aceh;
   - Pelaksanaan penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber untuk membantu tugas Dewan Sumber Daya Air Aceh;

- Menginventarisasi masalah dan isu-isu strategis pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Sumber Daya Air Aceh;
- Pelaksanaan penyusunan rekomendasi Dewan Sumber Daya Air Aceh;
- Menghimpun rekomendasi hasil sidang Komisi Irigasi, TKPSDA kewenangan provinsi dan pusat dan kelembagaan pengelolaan sumber daya air lainnya;
- Penyusunan pelaporan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

C. Seksi Sistem Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Sistem Informasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   - Penyusunan rencana kerja seksi Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA);
   - Penyusunan draft rancangan kebijakan sistem informasi, hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi Aceh;
   - Menghimpun database dan mempublikasikan Informasi Sumber Daya Air Aceh;
   - Mengelola Sistem Informasi Geografi Dinas Pengairan Aceh;
   - Mengelola Pusat Informasi (Command Center) Dinas Pengairan Aceh;
   - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

D. Seksi Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Air mempunyai tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kerja seksi monitoring dan evaluasi sumber daya air;
- Penyusunan draft rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air Aceh;
- Pelaksanaan konsultasi kebijakan dan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air dengan instansi/lembaga terkait;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

8. Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Irigasi Wilayah II yang berkedudukan di Bireuen dengan Wilayah Sungai Pase – Peusangan dan wilayah kerja meliputi :
   - Kabupaten Bireuen,
   - Kota Lhokseumawe,
   - Kabupaten Aceh Utara,
   - Kabupaten Bener Meriah, dan
   - Kabupaten Aceh Tengah.

   UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kelembagaan, pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, melaksanakan pengamatan pengelolaan irigasi, pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Pase-Peusangan dan melakukan koordinasi pada wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   - Penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Pase-Peusangan;

- Pembahasan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
- Penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
- Penyiapan materi persidangan TKPSDA Wilayah Sungai PasePeusangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
- Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air;
- Penyelenggaraan kegiatan pengamatan, operasi dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air;
- Pelaksanaan pengamatan pengelolaan irigasi kewenangan;
- Pelaksanaan Pemantauan kualitas air;
- Pelaksanaan Pemantauan banjir dan kekeringan;
- Penyelenggaraan Pelaksanaan alokasi air;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Penyusunan rencana aksi pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi; dan
- Pelaksanaan pengelolaan hidrologi.

UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

A. Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan tata usaha dan kelembagaan, pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Pase-Peusangan dan melakukan koordinasi pada wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- Pengkoordinasian penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- Pengkoordinasian pembahasan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Pengkoordinasian penyiapan materi persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi rekomendasi pengelolaan sumber daya air TKPSDA Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Pengkoordinasian pemantauan kualitas air;
- Pengkoordinasian pemantauan banjir dan kekeringan;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan alokasi air;
- Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Pengkoordinasian penyusunan rencana aksi pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi;
- Pengkoordinasian pengelolaan hidrologi.
- Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha Pengelolaan Irigasi Wilayah II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyusunan rencana kerja bagian tata usaha;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;

- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- Pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- Penyusunan pelaporan;
- Penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Pembahasan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan sidang TKPSDA Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
- Pelaksanaan penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber untuk membantu tugas TKPSDA Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Pelaksanaan pemilihan anggota TKPSDA Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Pelaksanaan penyusunan rekomendasi TKPSDA Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Penyusunan laporan sidang Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi pengelolaan sumber daya air TKPSDA Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

C. Seksi Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air dan melaksanakan pengamatan pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Pase - Peusangan dan wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasi dan Pelaporan Pengelolaan Irigasi menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
- Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi prasarana Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Pase - Peusangan;
- Penyelenggaraan kegiatan pengamatan, operasi dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
- Pelaksanaan pengamatan pengelolaan irigasi kewenangan;
- Penyelenggaraan pelaksanaan alokasi air;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan migas-migas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

D. Seksi Pengelola Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Pase – Peusangan dan wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- Pelaksanaan pemantauan banjir dan kekeringan;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Penyusunan rencana aksi pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi;
- Pelaksanaan pengelolaan hidrologi;
- Pelaksanaan pengolahan data pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pengumpulan data pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksanaan pemberian dukungan data untuk membantu tugas anggota TKPSDA;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- Melaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

9. Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Irigasi Wilayah III yang berkedudukan di Kota Langsa dengan wilayah Sungai Tamiang – Langsa dan wilayah kerja meliputi :
   - Kota Langsa;
   - Kabupaten Aceh Timur;
   - Kabupaten Aceh Tamiang; dan
   - Kabupaten Gayo Lues.

   UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kelembagaan, pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, melaksanakan pengamatan pengelolaan irigasi, pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Tamiang - Langsa dan melakukan koordinasi pada wilayah kerjanya yang dalam pelaksanaannya, UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
   - Penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
   - Pembahasan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
   - Penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
   - Penyiapan materi persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
   - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
   - Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air;

- Penyelenggaraan kegiatan pengamatan, operasi dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air;
- Pelaksanaan pengamatan pengelolaan irigasi kewenangan;
- Pelaksanaan Pemantauan kualitas air;
- Pelaksanaan Pemantauan banjir dan kekeringan;
- Penyelenggaraan Pelaksanaan alokasi air;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Penyusunan rencana aksi pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- Pelaksanaan pengelolaan hidrologi.

UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

A. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan tata usaha dan kelembagaan, pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, pengelolaan data dan informasi sumber daya air pada Wilayah Sungai Tamiang - Langsa dan melakukan koordinasi pada wilayah kerjanya. Dalam tugasnya UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
   - Pengkoordinasian penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
   - Pengkoordinasian pembahasan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
   - Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
   - Pengkoordinasian penyiapan materi persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;

- Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi rekomendasi pengelolaan sumber daya air TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
- Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Pengkoordinasian pemantauan kualitas air;
- pengkoordinasian pemantauan banjir dan kekeringan;
- pengkoordinasian penyelenggaraan alokasi air;
- pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- pengkoordinasian penyusunan rencana aksi pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi; dan pengkoordinasian pengelolaan hidrologi;
- pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kelembagaan yang dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha Pengelolaan Irigasi Wilayah III menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
   - Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja;
   - Pengelolaan administrasi kepegawaian;
   - Pengelolaan administrasi keuangan;
   - Pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
   - Pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
   - Penyusunan pelaporan;
   - Penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
   - Pembahasan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;

- Pelaksanaan penyelenggaraan sidang TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
- Pelaksanaan penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber untuk membantu tugas TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
- Pelaksanaan pemilihan anggota TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
- Pelaksanaan penyusunan rekomendasi TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
- Penyusunan laporan sidang Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

C. Seksi Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air dan melaksanakan pengamatan pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Tamiang – Langsa dan wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
- Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi prasarana sumber daya air pada Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
- Penyelenggaraan kegiatan pengamatan, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air pada Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
- Pelaksanaan pengamatan pengelolaan irigasi kewenangan;
- Penyelenggaraan pelaksanaan alokasi air;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan migas-migas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

D. Seksi Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi sumber daya air pada Wilayah Sungai Tamiang – Langsa dan wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
   - Penyusunan program dan rencana kerja;
   - Pelaksanaan Pemantauan kualitas air;
   - Pelaksanaan Pemantauan banjir dan kekeringan;
   - Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Sumber daya air pada wilayah kerjanya;
   - Penyusunan rencana aksi pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
   - Pelaksanaan pengelolaan hidrologi;
   - Pelaksanaan pengolahan data pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
   - Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pengumpulan data pengelolaan sumber daya air;
   - Pelaksanaan pemberian dukungan data untuk membantu tugas anggota TKPSDA;
   - Pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dan anggota TKPSDA dalam pelayanan informasi;
   - Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat;
   - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

10. Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Irigasi Wilayah IV yang berkedudukan di Calang dengan Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi dan wilayah kerja meliputi :
    - Kota Banda Aceh;

- Kota Sabang;
- Kabupaten Aceh Besar;
- Kabupaten Aceh Jaya;
- Kabupaten Pidie; dan
- Kabupaten Pidie Jaya.

UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kelembagaan, pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, melaksanakan pengamatan pengelolaan irigasi, pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi dan melakukan koordinasi pada wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- Penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi;
- Pembahasan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
- Penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
- Penyiapan materi persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
- Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air;
- Penyelenggaraan kegiatan pengamatan, operasi dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air;
- Pelaksanaan pengamatan pengelolaan irigasi kewenangan;
- Pelaksanaan Pemantauan kualitas air;
- Pelaksanaan Pemantauan banjir dan kekeringan;
- Penyelenggaraan Pelaksanaan alokasi air;

- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Penyusunan rencana aksi pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- Pelaksanaan pengelolaan hidrologi.

UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

A. Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan tata usaha dan kelembagaan, pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, pengelolaan data dan informasi sumber daya air pada Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi dan melakukan koordinasi pada wilayah kerjanya yang dalam tugasnya, UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
   - Pengkoordinasian penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
   - Pengkoordinasian pembahasan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
   - Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
   - Pengkoordinasian penyiapan materi persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
   - Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi rekomendasi pengelolaan sumber daya air TKPSDA Wilayah Sungai TeunomLambesoi;
   - Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya air pada wilayah kerjanya;
   - Pengkoordinasian pemantauan kualitas air;
   - Pengkoordinasian pemantauan banjir dan kekeringan;
   - Pengkoordinasian penyelenggaraan alokasi air;

- Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Pengkoordinasian penyusunan rencana aksi pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi;
- Pengkoordinasian pengelolaan hidrologi;
- Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kelembagaan yang dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha Pengelolaan Irigasi Wilayah IV menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- Pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- Penyusunan pelaporan;
- Penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
- Pembahasan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
- Pelaksanaan penyelenggaraan sidang TKPSDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
- Pelaksanaan penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber untuk membantu tugas TKPSDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
- Pelaksanaan pemilihan anggota TKPSDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;

- Pelaksanaan penyusunan rekomendasi TKPSDA Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi;
- Penyusunan laporan sidang Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

C. Seksi Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air dan melaksanakan pengamatan pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi dan wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- Penyusunan program dan rencana kerja;
- Pelaksanaan Pemantauan kualitas air;
- Pelaksanaan Pemantauan banjir dan kekeringan;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Penyusunan rencana aksi pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- Pelaksanaan pengelolaan hidrologi;
- Pelaksanaan pengolahan data pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi;
- Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pengumpulan data pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksanaan pemberian dukungan data untuk membantu tugas anggota TKPSDA;
- Pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dan anggota TKPSDA dalam pelayanan informasi;

- Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- Melaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

11. Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Irigasi Wilayah V yang berkedudukan di Blangpidie dengan Wilayah Sungai Baru – Kluet dan wilayah kerja meliputi :
    - Kabupaten Aceh Barat Daya;
    - Kabupaten Aceh Selatan;
    - Kabupaten Simeulue;
    - Kabupaten Aceh Barat;
    - Kabupaten Nagan Raya;
    - Kota Subulussalam;
    - Kabupaten Aceh Singkil; dan
    - Kabupaten Aceh Tenggara.

    UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan kelembagaan, pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, melaksanakan pengamatan pengelolaan irigasi, pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Baru - Kluet dan melakukan koordinasi pada wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

    - Penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Baru - Kluet;
    - Pembahasan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Baru - Kluet;
    - Penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Baru - Kluet;

- Penyiapan materi persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Baru – Kluet;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air;
- Penyelenggaraan kegiatan pengamatan, operasi dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air;
- Pelaksanaan pengamatan pengelolaan irigasi kewenangan;
- Pelaksanaan Pemantauan kualitas air;
- Pelaksanaan Pemantauan banjir dan kekeringan;
- Penyelenggaraan Pelaksanaan alokasi air;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Penyusunan rencana aksi pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- Pelaksanaan pengelolaan hidrologi.

UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

A. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan tata usaha dan kelembagaan, pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, pengelolaan data dan informasi sumber daya air pada Wilayah Sungai Baru - Kluet dan melakukan koordinasi pada wilayah kerjanya. Dalam tugasnya, UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
   - Pengkoordinasian penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
   - Pengkoordinasian pembahasan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Baru - Kluet;

- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pengkoordinasian penyiapan materi persidangan TKPSDA Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi rekomendasi pengelolaan sumber daya air TKPSDA Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Pengkoordinasian pemantauan kualitas air;
- Pengkoordinasian pemantauan banjir dan kekeringan;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan alokasi air;
- Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Pengkoordinasian penyusunan rencana aksi pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi;
- Pengkoordinasian pengelolaan hidrologi;
- Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha Pengelolaan Irigasi Wilayah V menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- Pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- Penyusunan pelaporan;

- Penyusunan dan reviuw pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pembahasan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pelaksanaan penyelenggaraan sidang TKPSDA Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pelaksanaan penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber untuk membantu tugas TKPSDA Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pelaksanaan pemilihan anggota TKPSDA Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pelaksanaan penyusunan rekomendasi TKPSDA Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Penyusunan laporan sidang Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

C. Seksi Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air dan melaksanakan pengamatan pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Baru – Kluet dan wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

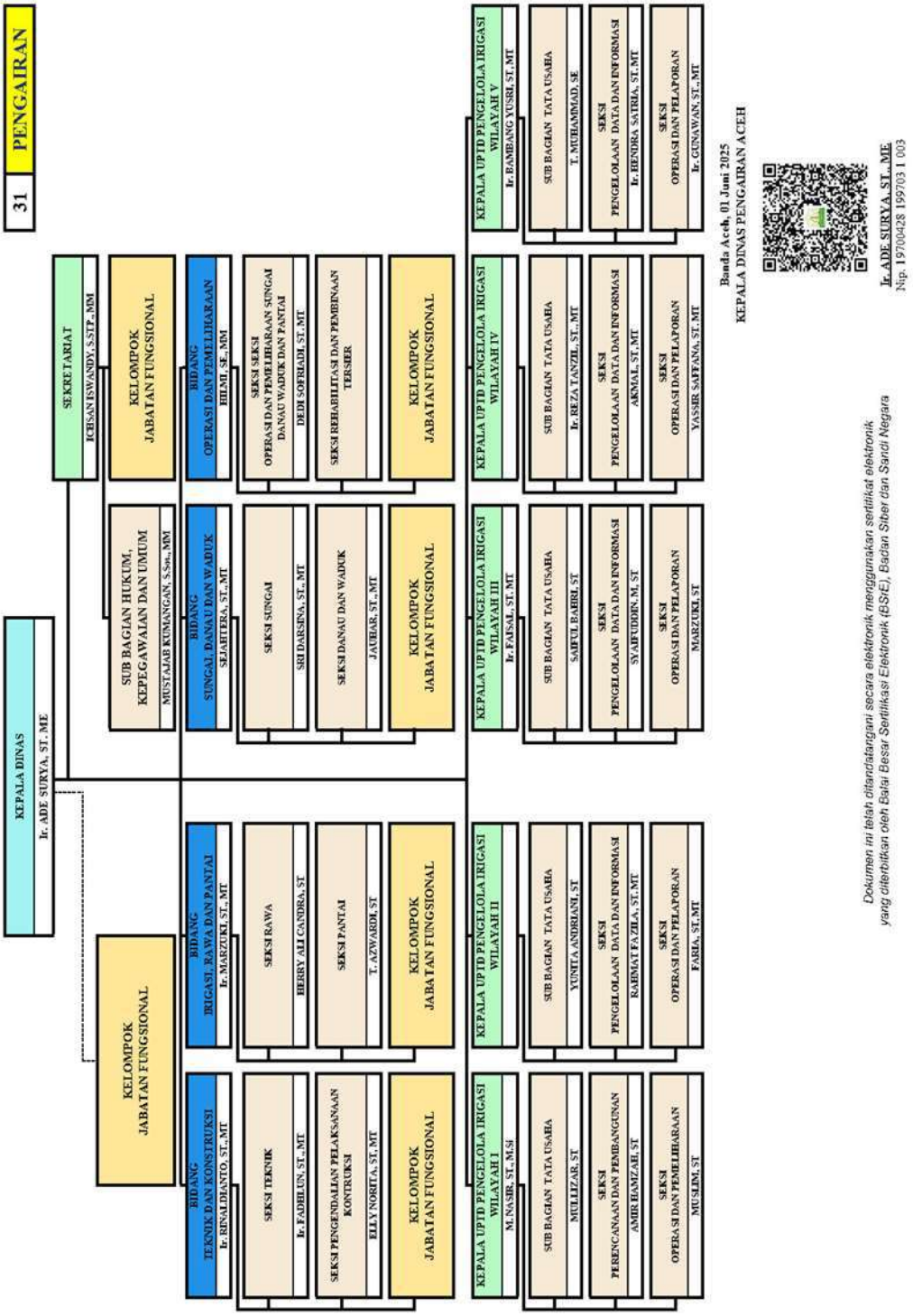
- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
- Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi prasarana sumber daya air pada Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Penyelenggaraan kegiatan pengamatan, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air pada Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pelaksanaan pengamatan pengelolaan irigasi kewenangan;

- Penyelenggaraan pelaksanaan alokasi air;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan migas-migas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

D. Seksi Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi sumber daya air pada Wilayah Sungai Baru – Kluet dan wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- Penyusunan program dan rencana kerja;
- Pelaksanaan Pemantauan kualitas air;
- Pelaksanaan Pemantauan banjir dan kekeringan;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- Penyusunan rencana aksi pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- Pelaksanaan pengelolaan hidrologi;
- Pelaksanaan pengolahan data pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Baru - Kluet;
- Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pengumpulan data pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksanaan pemberian dukungan data untuk membantu tugas anggota TKPSDA;
- Pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dan anggota TKPSDA dalam pelayanan informasi;
- Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagan struktur organisasi Dinas Pengairan Aceh yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :




**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengairan Aceh**

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan dibutuhkan Sumber Daya Manusia. Manusia merupakan sumber daya dalam organisasi yang berpartisipasi dan memberikan konstribusi sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya.

Sebagai salah satu sumber daya dalam organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penyebab utama apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi, sehingga kemampuannya perlu ditingkatkan. Arah kebijakan pembangunan di bidang penguatan birokrasi pemerintahan dan penegakan supremasi hukum dengan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merupakan aspek strategis untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengairan. Upaya yang dilakukan dalam hal peningkatan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan formal dan non formal.

## 1.3. Sumber Daya Dinas Pengairan

Sumber daya manusia atau dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur yang merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan tugas dan fungsi serta manajemen organisasi. Sumber daya manusia pada dasarnya adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal didalam organisasi agar dapat mencapai tujuan, target, sasaran serta dapat mewujudkan eksistensi organisasi. Dalam pelaksanaan manajemen organisasi, sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana kebijakan, program dan kegiatan yang dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam membangun infrastruktur yang handal serta mewujudkan *good governance*.

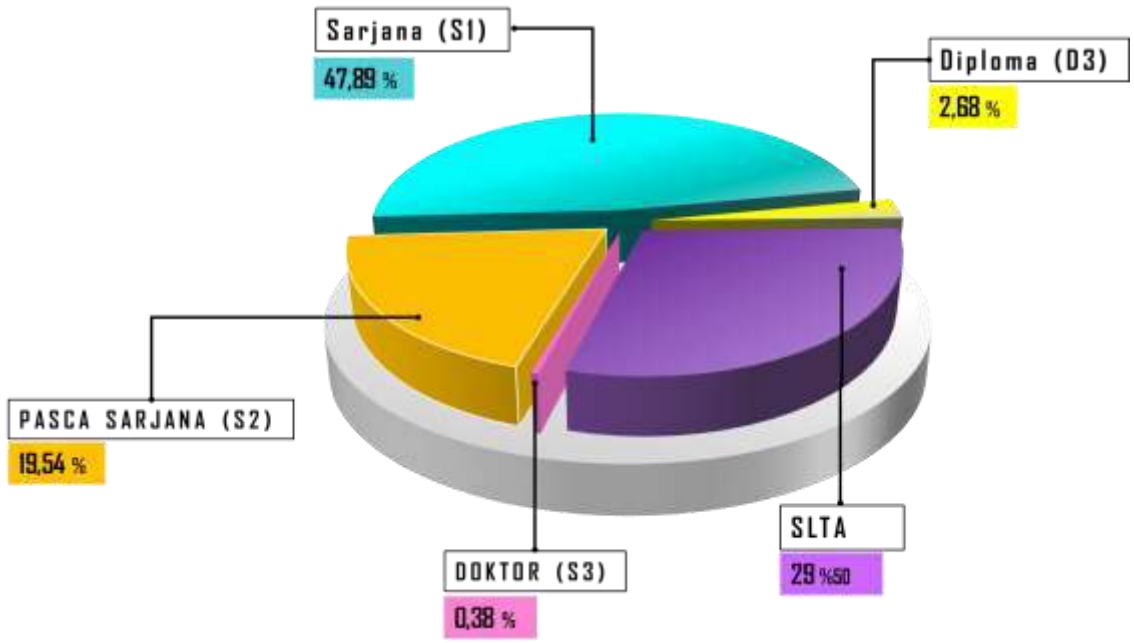
Sampai dengan tahun 2025, Dinas Pengairan Aceh memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan dan kualifikasi akademik. Komposisi Pegawai menunjukkan tingkat profesionalisme dan kapasitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Saaat ini Dinas Pengairan Aceh mengelola sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar diberbagai unit kerja di lingkungan Dinas Pengairan Aceh, dengan jumlah PNS sebanyak 261 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 93 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 34 orang dengan sebaran jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, latar belakang Pendidikan, jenis kelamin dan rentang usia dengan komposisi sebagaimana pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 1.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Terakhir**

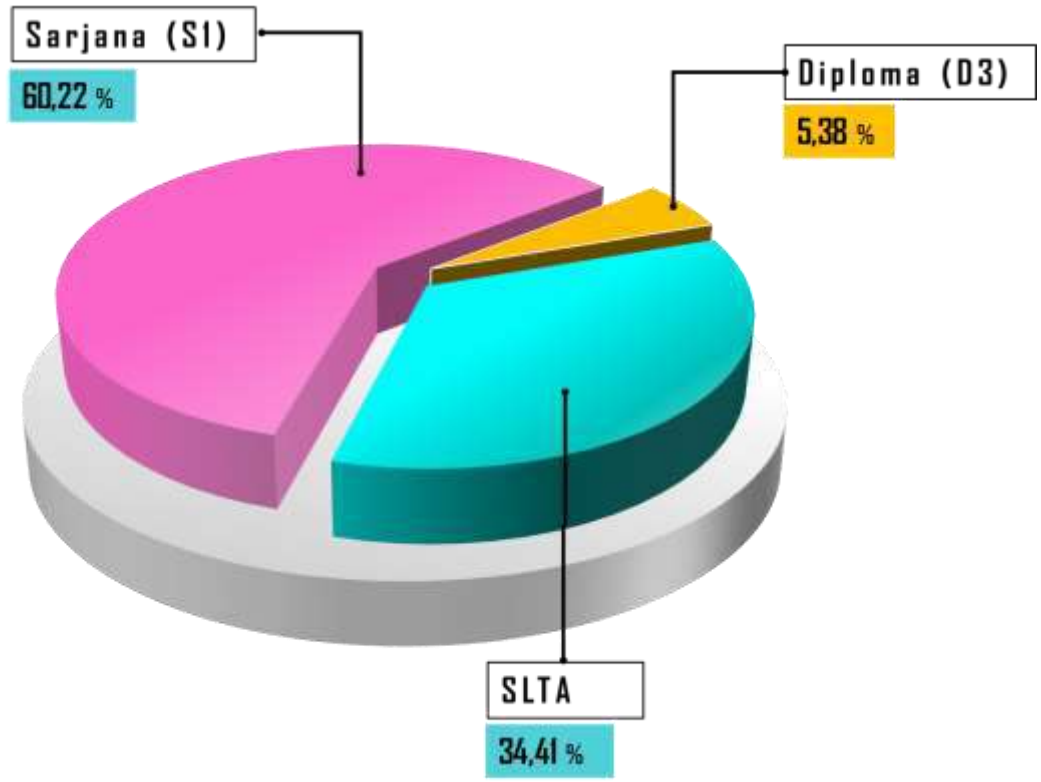
| NO. | JENJANG PENDIDIKAN | KLASIFIKASI PEGAWAI | | | | | | | | | JUMLAH KESELURUHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | | | PPPK | | | TENAGA KONTRAK | | | |
| | | LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH | |
| 1. | Doktor (S3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Pasca Sarjana (S2) | 41 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 3. | Sarjana (S1) | 89 | 36 | 125 | 39 | 17 | 56 | 7 | 3 | 10 | 191 |
| 4. | Diploma (D3) | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 5. | SLTA/Sederajat | 59 | 18 | 77 | 26 | 6 | 32 | 18 | 5 | 23 | 132 |
| | **TOTAL** | **194** | **67** | **261** | **68** | **25** | **93** | **25** | **9** | **34** | **388** |

*Sumber : Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Pengairan Aceh, 30 Agustus 2025*



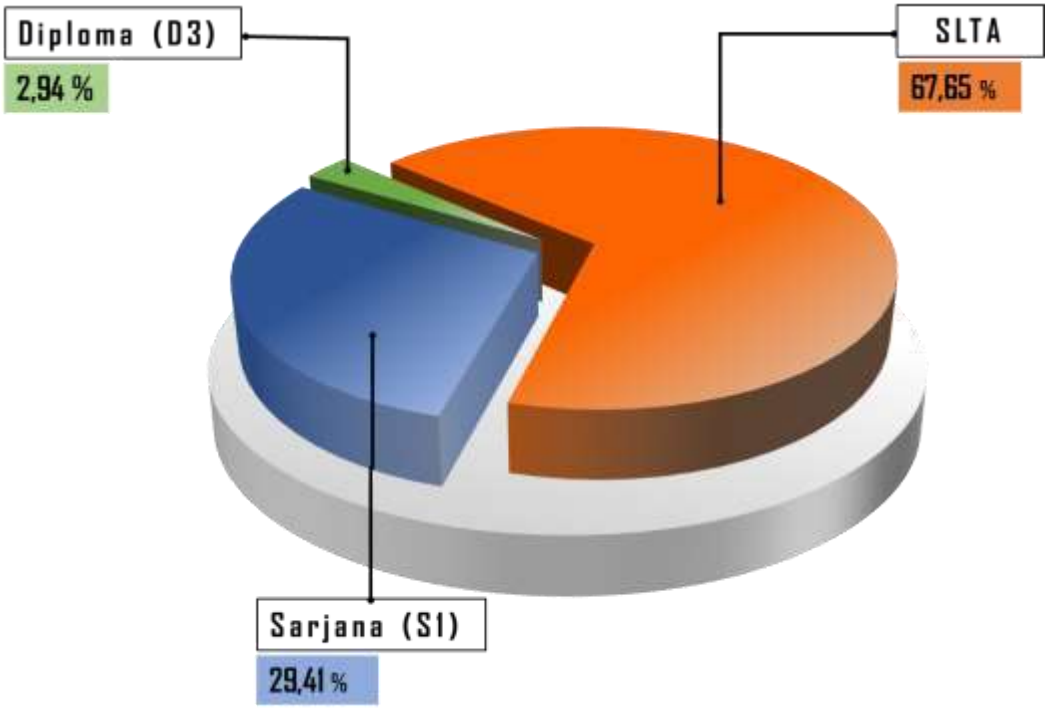

**Gambar 1.2 Diagram Komposisi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pengairan Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.2 tingkat pendidikan PNS pada Dinas Pengairan Aceh didominasikan oleh pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 125 orang (47,89%), SLTA/Sederajat 77 orang (29,50%), pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 51 orang (19,54%), pendidikan D-III sebanyak 7 orang (2,68%) dan pendidikan Doktor (S3) 1 orang dengan total pegawai (PNS) pada Dinas Pengairan sebanyak 261 orang.




**Gambar 1.3 Diagram Komposisi PPPK Pada Dinas Pengairan Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.3 jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pengairan sebanyak 93 orang dengan tingkat pendidikan didominasikan oleh Sarjana (S1) sebanyak 56 orang (60,22%), SLTA/Sederajat sebanyak 32 orang (34,41%), D-III sebanyak 5 orang (5,38%).




**Gambar 1.4 Diagram Komposisi Tenaga Kontrak Pada Dinas Pengairan Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

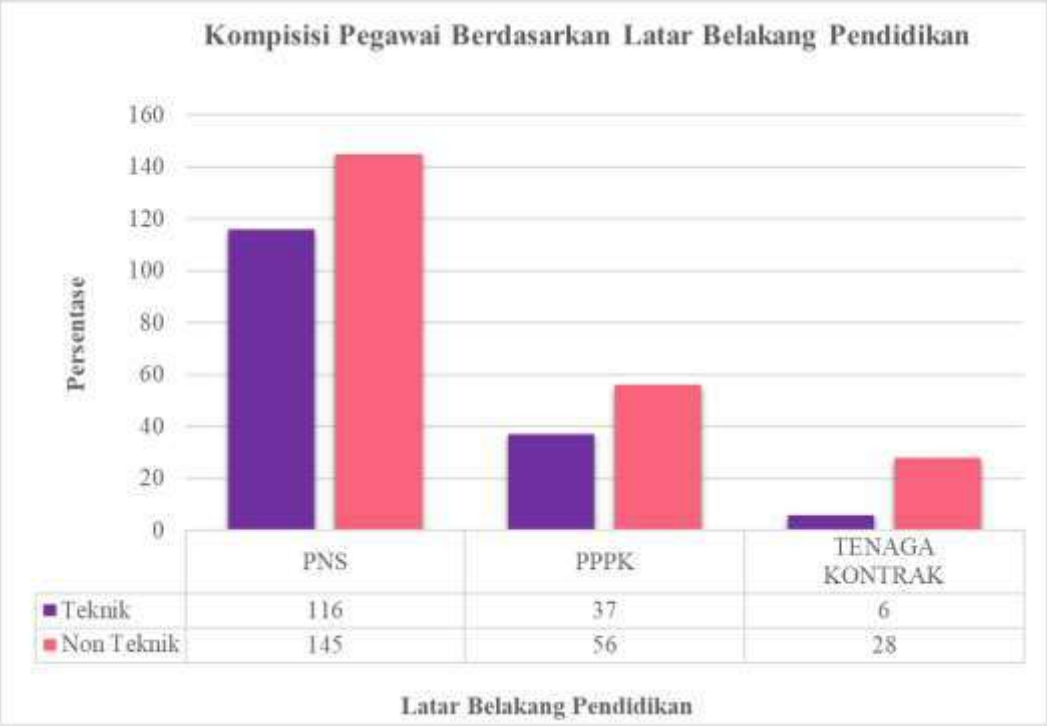
Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.4 jumlah Tenaga Kontrak pada Dinas Pengairan sebanyak 34 orang dengan tingkat pendidikan didominasikan oleh Sarjana (S1) sebanyak 10 orang (29,41%), SLTA/Sederajat sebanyak 23 orang (67,65%), D-III sebanyak 1 orang (2,94%).

Komposisi pegawai PNS dan Tenaga Kontrak berdasarkan latar belakang pendidikan disajikan dalam Tabel 1.2 dan Gambar 1.5 berikut.

**Tabel 1.2 Komposisi PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

| NO. | PENDIDIKAN | PNS | PPPK | TENAGA KONTRAK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teknik | 116 | 37 | 6 |
| 2. | Non Teknik | 145 | 56 | 28 |
| | **T O T A L** | **261** | **93** | **34** |

*Sumber : Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Pengairan Aceh, 30 Agustus 2025*



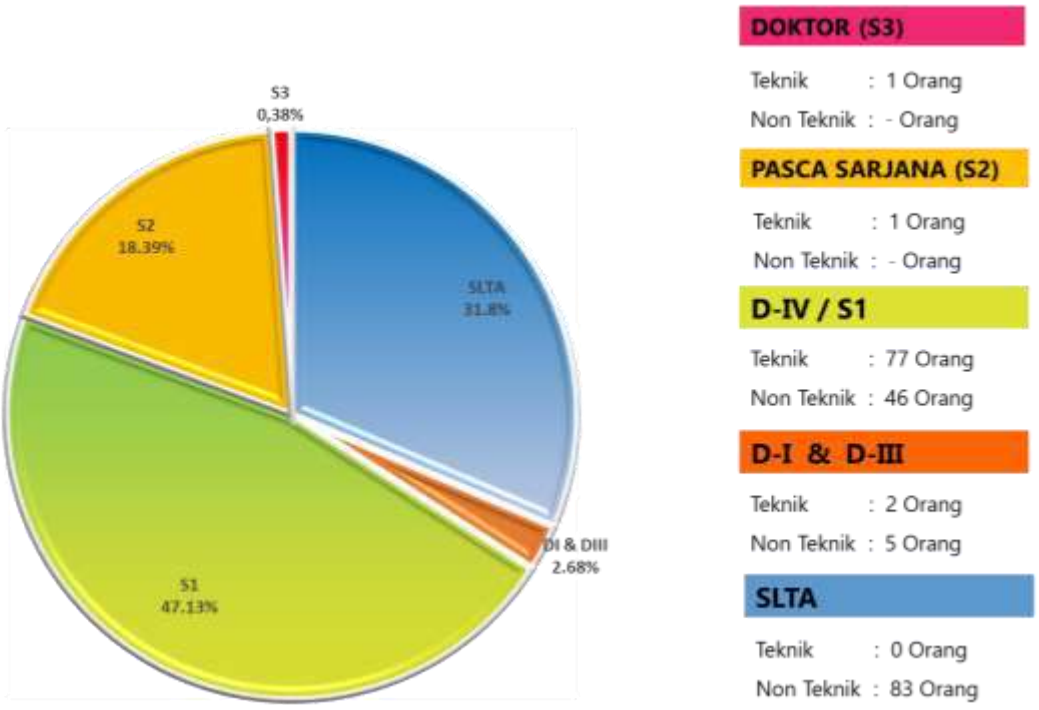

**Gambar 1.5 Diagram Komposisi PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak Dinas Pengairan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

Komposisi jumlah pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 1.3 dan Gambar 1.6 berikut.

**Tabel 1.3 Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| NO. | PENDIDIKAN | SLTA | D I - D III | D4 / S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teknik | 0 | 2 | 75 | 38 | 1 |
| 2. | Non Teknik | 83 | 5 | 48 | 9 | 0 |
| | **T O T A L** | **83** | **7** | **123** | **47** | **1** |

*Sumber : Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Pengairan Aceh, 30 Agustus 2025*




**Gambar 1.6 Grafik Komposisi PNS Dinas Pengairan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

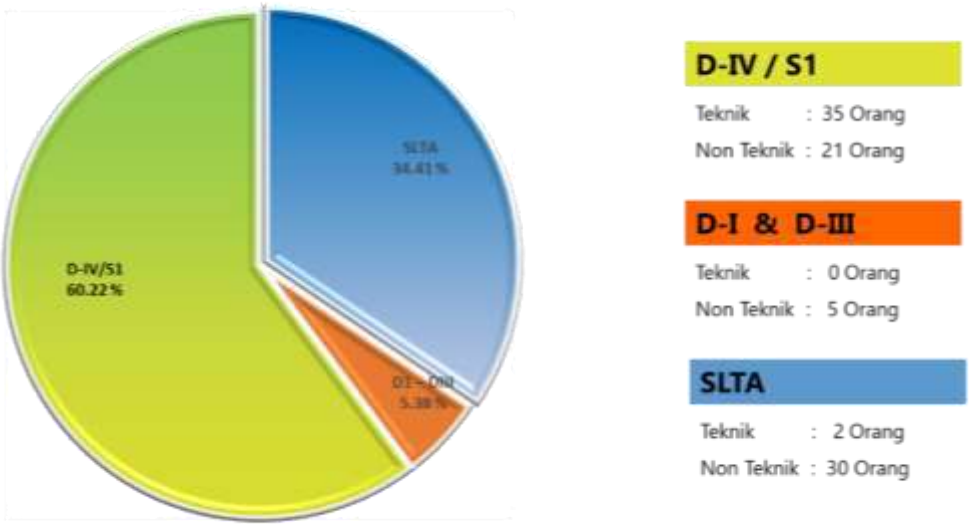
Pegawai dengan status Tenaga Kontrak di lingkungan Dinas Pengairan Aceh diupayakan guna memenuhi kekurangan SDM pada sisi kuantitas yang bertujuan dapat berfungsi maksimal dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pengairan Aceh.

Adapun komposisi jumlah tenaga kontrak berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 1.4 dan Gambar 1.7 berikut.

**Tabel 1.4 Komposisi Jumlah PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| NO. | PENDIDIKAN | SLTA | D I - D III | D4 / S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teknik | 2 | 0 | 35 |
| 2. | Non Teknik | 30 | 5 | 21 |
| | **T O T A L** | **32** | **5** | **56** |

*Sumber : Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Pengairan Aceh, 30 Agustus 2025*



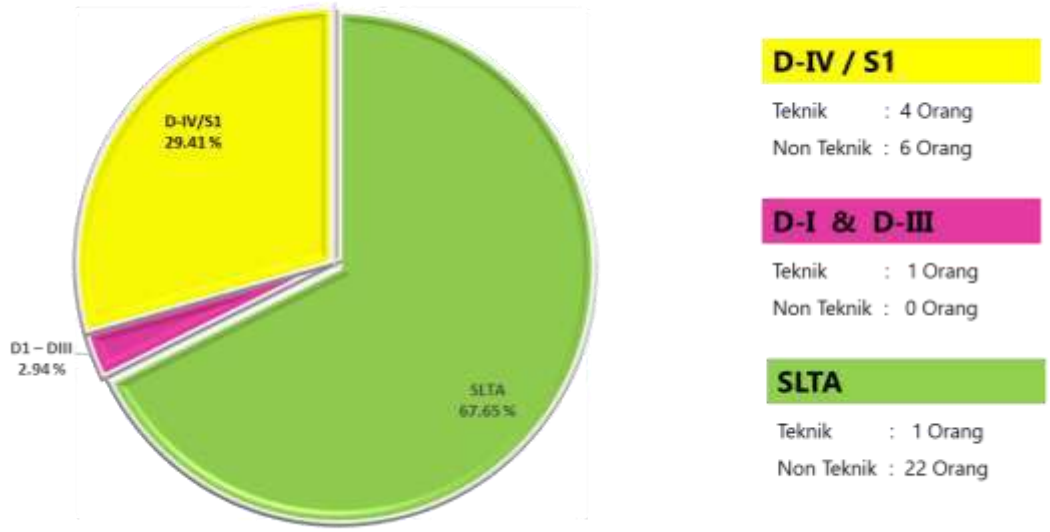

**Gambar 1.7 Grafik Komposisi PPPK Dinas Pengairan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Adapun komposisi jumlah tenaga kontrak berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 1.5 dan Gambar 1.8 berikut.

**Tabel 1.5 Komposisi Jumlah Tenaga Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| NO. | PENDIDIKAN | SLTA | D I - D III | D4 / S1 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teknik | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Non Teknik | 22 | 0 | 6 |
| | **T O T A L** | **23** | **1** | **10** |

*Sumber : Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Pengairan Aceh, 30 Agustus 2025*



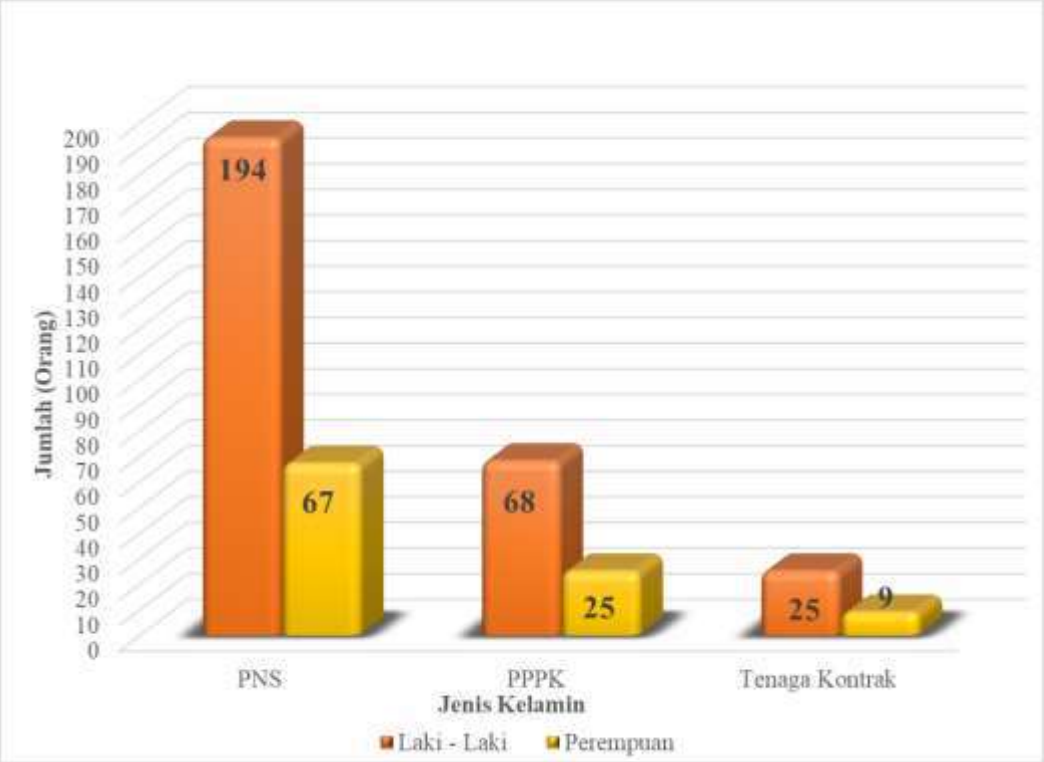

**Gambar 1.8 Grafik Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Pengairan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Komposisi jumlah  jumlah Pegawai (PNS) dan tenaga kontrak berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 1.6 dan Gambar 1.9 berikut.

**Tabel 1.6 Komposisi Jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak berdasarkan Jenis Kelamin**

| NO. | JENIS KELAMIN | STATUS PEGAWAI | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | PPPK | TENAGA KONTRAK | |
| 1. | Laki - laki | 194 | 68 | 25 | 287 |
| 2. | Perempuan | 67 | 25 | 9 | 101 |
| | **T O T A L** | **261** | **93** | **34** | **388** |

*Sumber :  Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Pengairan Aceh, 30 Agustus 2025*



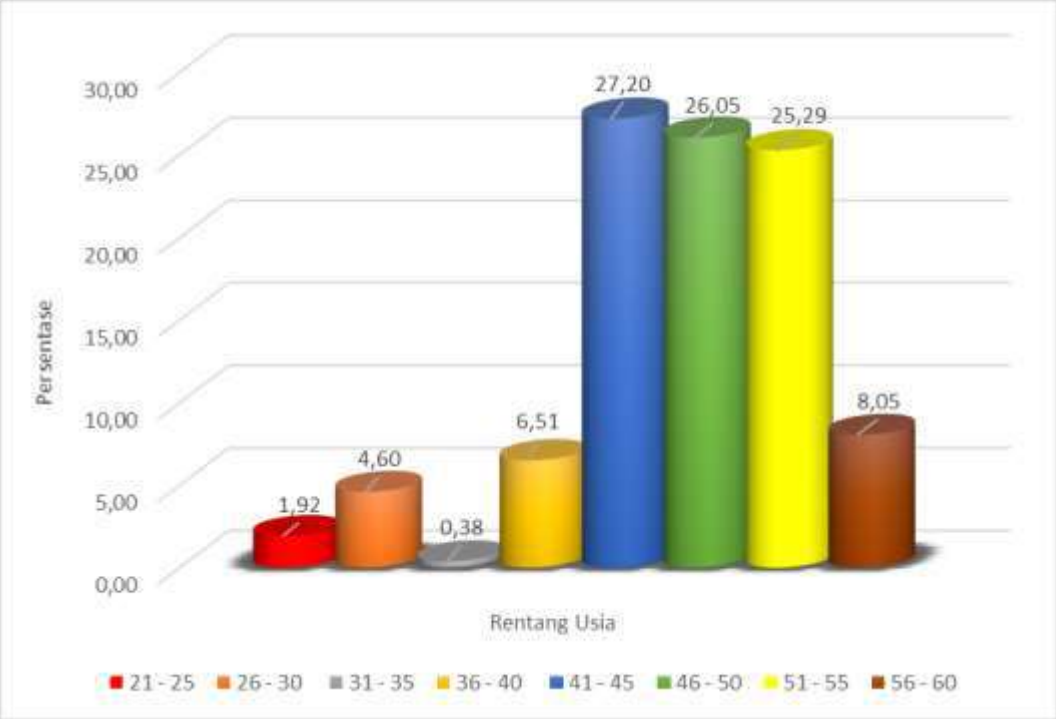

**Gambar 1.9 Grafik Komposisi PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak Dinas Pengairan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan rentang usia PNS Dinas Pengairan tersebar dalam kelompok rentang usia sebagaimana yang disajikan pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 1.7 Komposisi PNS berdasarkan Rentang Usia**

| NO. | USIA | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laki - laki | 0 | 7 | 1 | 15 | 51 | 53 | 52 | 15 |
| 2. | Perempuan | 5 | 5 | 0 | 2 | 20 | 15 | 14 | 6 |
| | **TOTAL** | **5** | **12** | **1** | **17** | **71** | **68** | **66** | **21** |

*Sumber : Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Pengairan Aceh, 30 Agustus 2025*




**Gambar 1.10 Grafik Komposisi PNS Dinas Pengairan Berdasarkan Rentang Usia**

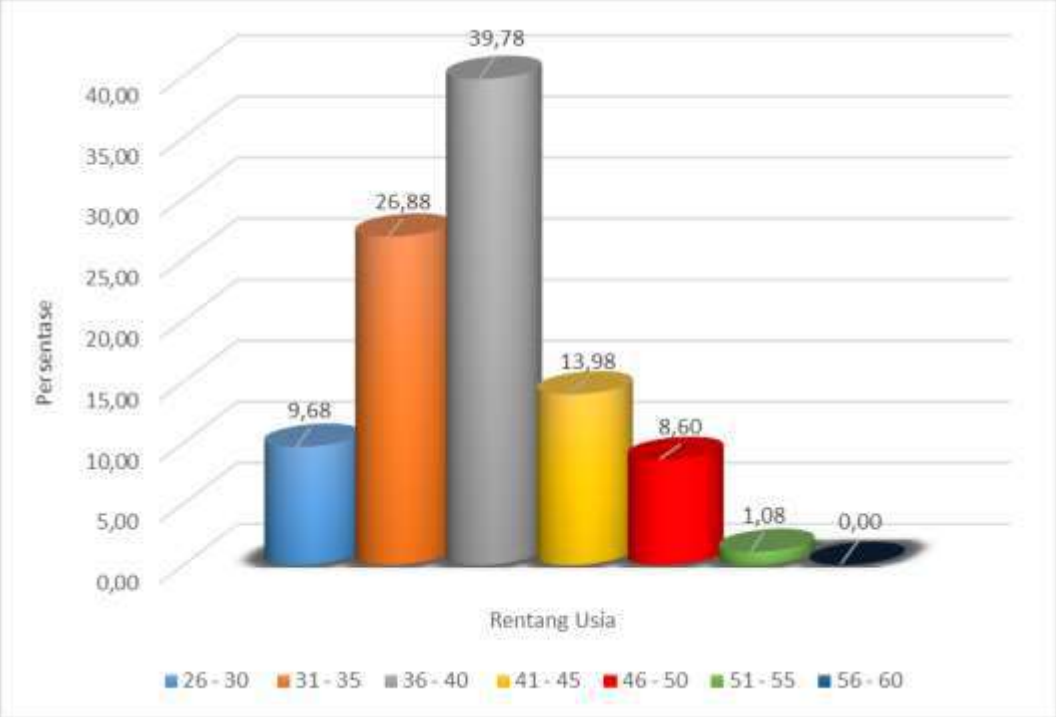
Sebagaimana tabel dan grafik diatas, pegawai dengan rentang usia paling tinggi berada pada usia 41 – 45 tahun sebanyak 71 orang atau sebesar 27,20% dengan jumlah pegawai laki-laki berjumlah 51 orang dan pegawai perempuan berjumlah 20 orang lalu diikuti usia 46 – 50 tahun yaitu sebanyak 68 orang atau sebesar 26,05% dengan pegawai laki-laki 53 orang dan pegawai perempuan 15

orang dan rentang usia 51 – 55 tahun sebanyal 66 orang atau 25,29% dengan pegawai laki-laki sebanyak 52 orang dan pegawai perempuan 14 orang.

**Tabel 1.8 Komposisi PPPK berdasarkan Rentang Usia**

| NO. | USIA | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laki - laki | 5 | 21 | 30 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2. | Perempuan | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| | **TOTAL** | **9** | **25** | **37** | **13** | **8** | **1** | **0** |

*Sumber : Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Pengairan Aceh, 30 Agustus 2025*




**Gambar 1.11 Grafik Komposisi PPPK Dinas Pengairan Berdasarkan Rentang Usia**

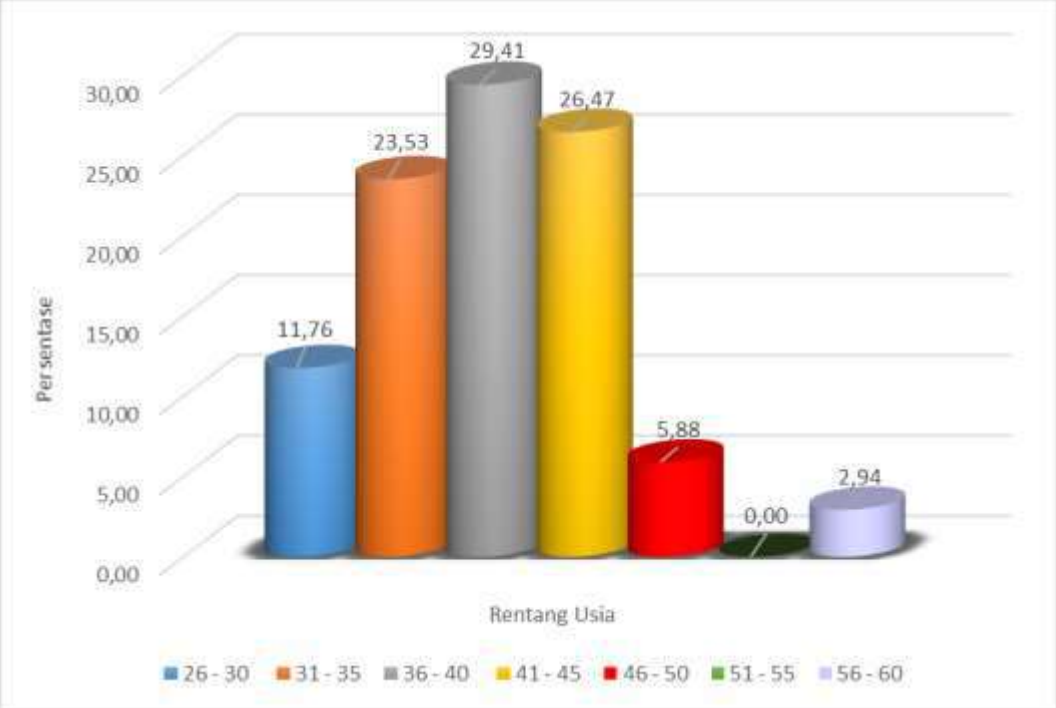
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, rentang usia paling banyak berada pada usia 36 – 40 tahun sebanyak 37 orang atau sebesar 39,78% dengan jumlah PPPK laki-laki berjumlah 30 orang dan PPPK perempuan berjumlah 7 orang, lalu tenaga kontrak pada usia 31 – 35 tahun sebanyak 25 orang atau sebesar

26,88% dengan jumlah PPPK laki-laki berjumlah 21 orang dan PPPK perempuan berjumlah 4 orang kemudian diikuti usia 41 – 45 tahun yaitu sebanyak 13 orang atau sebesar 13,98% dengan PPPK laki-laki 5 orang dan PPPK perempuan 8 orang.

**Tabel 1.9 Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Rentang Usia**

| NO. | USIA | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laki - laki | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Perempuan | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | **TOTAL** | **4** | **8** | **10** | **9** | **2** | **0** | **1** |

*Sumber : Subbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Pengairan Aceh, 30 Agustus 2025*




**Gambar 1.12 Grafik Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Pengairan Berdasarkan Rentang Usia**

Tenaga Kontrak dengan rentang usia paling banyak berada pada usia 36 – 40 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 29,41% dengan jumlah tenaga kontrak laki-laki berjumlah 6 orang dan tenaga kontrak perempuan berjumlah 4 orang, lalu tenaga kontrak pada usia 41 – 45 tahun sebanyak 9 orang atau sebesar

26,47% dengan jumlah tenaga kontrak laki-laki berjumlah 7 orang dan tenaga kontrak perempuan berjumlah 2 orang kemudian diikuti usia 31 – 35 tahun yaitu sebanyak 8 orang atau sebesar 23,53% dengan tenaga kontrak laki-laki 6 orang dan tenaga kontrak perempuan 2 orang.

## 1.4. Sarana dan Prasarana

Dinas Pengairan Aceh memiliki kantor yang beralamat di Jl. Ir. H. Mohd. Thaher Nomor 18 Lueng Bata – Banda Aceh juga memiliki Asset/Modal/Sarana dan Prasarana yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas. Pada Dinas Pengairan Aceh jumlah sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 1.8 berikut :

**Tabel 1.10 Sarana dan Prasarana Dinas Pengairan Aceh**

| NO. | URAIAN | KEPEMILIKAN ASET DINAS PENGAIRAN (Unit) | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|
| 1. | Alat Besar | 8 | Dinas Pengairan |
| 2. | Alat Angkutan | 108 | Dinas Pengairan |
| 3. | Alat Bengkel dan Ukur | 41 | Dinas Pengairan |
| 4. | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 2055 | Dinas Pengairan |
| 5. | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 88 | Dinas Pengairan |
| 6. | Alat Kedokteran dan Kesehatan | 5 | Dinas Pengairan |
| 7. | Alat Laboratorium | 122 | Dinas Pengairan |
| 8. | Komputer | 390 | Dinas Pengairan |
| 9. | Alat Keselamatan | 8 | Dinas Pengairan |
| 10. | Rambu - rambu | 5 | Dinas Pengairan |
| 11. | Peralatan Olah Raga | 1 | Dinas Pengairan |
| **J U M L A H** | | **2831** | |

*Sumber : Subbag. Keuangan dan Pengelolaan Asset Dinas Pengairan Aceh, 2025*

Sarana dan prasarana memberikan dukungan yang tinggi terdapat pelaksanaan anggaran pada tahun 2025. Peralatan berat, peralatan komunikasi dan komputer serta kendaraan dinas operasional, telah memberikan andil yang besar untuk mendukung kegiatan-kegiatan pada Dinas Pengairan Aceh.

## 1.5. Aspek Strategis

Strategi yang digunakan pada Dinas Pengairan Aceh di analisa dari Faktor Analisa Lingkungan Internal dengan Aspek Kekuatan *(Strengths)* dan Aspek Kelemahan *(Weaknesses)*, sedangkan Faktor Analisa Lingkungan Eksternal dengan Aspek Peluang (*Opportunities*), dan Aspek Tantangan*(Threats*), yang dijelaskan sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

Faktor Lingkungan internal yang memberikan pengaruh sebagai kekuatan (strength) dan kelemahan (*weakness*) pada kinerja Dinas Pengairan adalah :

**1. Aspek Kekuatan *(Strengths)*:**

a. Adanya Peraturan mengenai SOTK dan Tusi Dinas Pengairan;
b. Potensi Pengembangan Kapasitas SDM;
c. Adanya dukungan Anggaran APBA
d. Kecukupan jumlah pegawai;
e. Tersedianya kendaraan roda 4 dan roda 2;
f. Tersedianya gedung tempat kerja, alat kantor, dan peralatan teknis;
g. Lahan perkantoran cukup luas;
h. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi;
i. Adanya bendung dan jaringan irigasi dengan kondisi baik dan sedang;
j. Adanya bangunan pengendalian daya rusak air yang berfungsi;
k. Jumlah lembaga pengelola yang memadai.

**2. Aspek Kelemahan *(Weaknesses)***

a. Kurangnya data informasi dan koordinasi antar instansi terkait;
b. Sumber Daya Manusia masih belum memadai;
c. Sumber dana yang semakin berkurang;
d. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM di bidang Sumber Daya Air/Pengairan;

e. Ketersediaan Sarana dan Prasarana seperti Gedung/tempat kerja, alat kantor, dan peralatan teknis yang belum memadai.

B. Lingkungan Eksternal

Faktor Lingkungan eksternal yang memberikan peluang (opprtunities) dan tantangan (threats) pada kinerja Dinas Pengairan Aceh adalah :

**1. Aspek Peluang *(Opportunities)***

a. Adanya diklat teknis dan fungsional;
b. Rekruitmen pegawai sesuai dengan kebutuhan (pendidikan sesuai);
c. Regenerasi pegawai sesuai dengan kebutuhan;
d. Adanya program Operasi, Rehabilitasi dan Pemeliharaan bangunan-bangunan pemerintah di bidang Sumber Daya Air
e. Adanya Komitmen antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air/Pengairan;
f. Luasnya wilayah dan banyaknya sumber daya air yang belum terkelola;
g. Peluang untuk mencari dana diluar APBA, diantaranya melalui usulan kepada pemerintahan pusat atau menggali partisipasi masyarakat dalam memenuhi keterbatasan APBA.

**2. Aspek Tantangan (*Threats*)**

a. Kurangnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air;
b. Kondisi alam yang tidak menentu dan perubahan iklim global dimana musim hujan dan kemarau sulit diperidiksi. Sehingga pada musim penghujan yang bervariasi mengakibatkan bencana banjir, dan pada musim kemarau akan mengakibatkan semakin sulit mendapatkan air baku.
c. Masih rendahnya kualitas hasil pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultasi.

Berdasarkan uraian tentang analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal diatas, terdapat beberapa Alternatif Isu Strategis antara lain adalah :

1. Adanya Peraturan digunakan untuk membuat komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan sarana dan prasarana pengairan yang belum terkelola dengan baik;
2. Adanya Pengembangan Potensi Kapasitas SDM bermanfaat sebagai pelaksana pengembangan SDA/Pengairan yang belum terkelola dengan baik;
3. Adanya Dukungan Anggaran dari APBA dan APBN (DAK) berpontensi untuk meningkatkan kinerja sumber daya air yang sudah terkelola maupun belum terkelola dengan baik;
4. Mengoptimalkan peran serta eksekutif, legislatif dan masyarakat untuk berkoordinasi dan menghimpun data informasi mengenai sumber daya air yang belum terekelola dengan baik;
5. Membangun mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan Daerah untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah;
6. Mengoptimalkan dukungan Anggaran dari Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan SDM, sarana prasarana pendukung, dan peningkatan data informasi;
7. Dengan adanya Peraturan dan dukungan anggaran perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pemanfaatanpenggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air;
8. Potensi Kapasitas SDM dan dukungan anggaran dapat digunakan untuk mengantisipasi kondisi alam yang tidak menentu;
9. Adanya Peraturan dan Kapasitas SDM yang dapat digunakan sebagai pengawasan terhadap kualitas pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan Konsultansi;
10. Perlu Adanya Peraturan yang jelas dan tegas mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air;
11. Perlu Adanya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung dalam mengadapi dan mengantisipasi perubahan Iklim;

12. Perlu Adanya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas hasil pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultasi.

Gambaran dari Evaluasi Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal dengan menggunakan metode SWOT (Kekuatan/*Strengths*, Kelemahan/*Weaknesses*, Peluang/*Opportunities*, dan Tantangan/*Threats*) untuk menentukan alternatif strategi pencapaian dapat dilihat pada Tabel 1.9 dibawah ini:

**Tabel 1.11 Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal dengan menggunakan metode SWOT**

| **Faktor Internal** | **Kekuatan :** | **Kelemahan :** |
|---|---|---|
| | 1. Adanya Peraturan mengenai SOTK dan Tupoksi Dinas Pengairan;<br>2. Potensi Pengembangan Kapasitas SDM;<br>3. Adanya dukungan Anggaran APBA | 1. Kurangnya data informasi dan koordinasi antar instansi terkait;<br>2. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM di bidang Sumber Daya Air/Pengairan;<br>3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung yang kurang memadai yang berguna sebagai penunjang operasional kerja. |
| **Peluang :** | **Alternatif Strategi :** | **Alternatif Strategi :** |
| 1. Adanya Komitmen antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air/Pengairan; | Adanya peraturan digunakan untuk membuat komitmen Antara eksekutif dan legislative dalam pembangunan sarana dan prasarana pengairan yang belum terkelola dengan baik. | Mengoptimalkan peran serta eksekutif, legislative dan masyarakat untuk berkoordinasi dan menghimpun data informasi mengenai sumber daya air yang belum terkelola dengan baik. |
| **Peluang :** | **Alternatif Strategi :** | **Alternatif Strategi :** |
| 2. Luasnya wilayah dan banyaknya sumber daya air yang belum terkelola merupakan peluang bagi pengembangan tugas-tugas Pengairan; | Adanya pengembangan Potensi kapasitas SDM bermanfaat sebagai pelaksana pengembangan Pengairan yang belum terkelola dengan baik | Membangun mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan Daerah untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah |
| 3. Peluang untuk mencari dana diluar | Adanya dukungan anggaran dari APBAdan DAK | Mengoptimalkan dukungan anggaran dari Pusat dan |

| | | |
|---|---|---|
| APBA, Diantaranya melalui usulan kepada pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi atau menggali partisipasi masyarakat dalam memenuhi keterbatasan APBA merupakan peluang yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. | berpotensi untuk meningkatkan kinerja sumber daya air yang sudah terkelola maupun belum terkelola dengan baik | Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan SDM, sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan data informasi |
| **Ancaman :** | **Alternatif Strategi :** | **Alternatif Strategi :** |
| 1. Kurangnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air; | Dengan adanya Peraturan dan dukungan anggaran perlu dilakukan sosialisasi terhadapa masyarakat mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air | Perlu adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah sumber daya air |
| 2. Kondisi alam yang tidak menentu dan perubahan iklim global dimana musim hujan dan kemarau sulit diperidiksi. Sehingga pada musim penghujan yang berpariasi mengakibatkan bencana banjir, dan pada musim kemarau akan mengakibatkan semakin sulit mendapatkan air baku. | Potensi kapasitas SDM dan dukungan anggaran dapat digunakan untuk mengantisipasi kondisi alam yang tidak menentu. | Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan iklim. |
| **Ancaman :** | **Alternatif Strategi :** | **Alternatif Strategi :** |
| 3. Masih rendahnya kualitas hasil pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultasi. | Adanya peraturan dan kapasitas SDM yang dapat digunakan sebagai pengawasan terhadap kualitas pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultansi. | Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas hasil pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultansi. |

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## LAPORAN KINERJA
## DINAS PENGAIRAN ACEH
## TAHUN 2025

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 Renstra Tahun 2023 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh adalah dokumen perencanaan Dinas Pengairan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Kedua peraturan ini memberikan arahan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Jangka Pendek atau disebut juga Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja).

Penyusunan Renstra Dinas Pengairan Aceh disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Aceh. Upaya untuk merealisasikan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) untuk periode 5 (lima) tahun agar sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi Aceh dalam pembangunan Aceh tahun 2023 – 2026 adalah :

**"ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA"**

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Aceh tersebut ditempuh melalui misi-misi pembangunan Aceh, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami;
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat demokrasi berdasarkan hukum;
4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata;
6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Merujuk Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023 yang sesuai dengan pembangunan pada Dinas Pengairan Aceh adalah Tujuan **"**Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana" dengan Sasaran **"Meningkatkan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik"**

### 2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengairan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Daerah memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan. Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengairan dalam kurun waktu 2023 – 2026 disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengairan**

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| 6. Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana. | 6.3 Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik. | Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat. | ✓ Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian.<br>✓ Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA dan pengendalian |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| | | | daya rusak sumber air.<br>✓ Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir |

*Sumber : Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 - 2026*

### 2.1.3 Program dan Kegiatan

Program Dinas Pengairan Aceh merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program kerja Operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi. Program kerja operasional merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperuntukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai tanggapan terhadap kebijakan dan program yang dikembangkan Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Pengelolaan sumber daya air adalah sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan serta dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya penguasaan sumber daya air diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat dibidang sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, ketahanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan

sosial dan kemandirian. Penguasaan sumber daya air dapat dicapai dengan sebaik-baiknya dengan dilakukan upaya-upaya pendayagunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumber daya air secara optimal dan lestari.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2025 Dinas Pengairan menetapkan 2 (dua) program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan 1 (satu) program wajib yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Strategi yang dilakukan Dinas Pengairan Aceh untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh periode tahun ini yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   Indikator Kinerja : Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran
   Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Kegiatan : Perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
      - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
      - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
   c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
      - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kan
   - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   - ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
   - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

   Indikator Kinerja : Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik.

   Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
      - ✓ Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai.
      - ✓ Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
      - ✓ Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing.
      - ✓ Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.
      - ✓ Rehabilitasi Tanggul Sungai.
      - ✓ Normalisasi/Restorasi Sungai.
      - ✓ Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya.
      - ✓ Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi.
      - ✓ Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi.
      - ✓ Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi.
      - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi.
      - ✓ Operasi dan Pemeliharaan Sungai.

   b. Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha – 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
      - ✓ Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.

- ✓ Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan.
- ✓ Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan.
- ✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.
- ✓ Rehabilitasi Bendung Irigasi.
- ✓ Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.
- ✓ Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi.
- ✓ Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa.
- ✓ Operasional Kelembagaan Unit Pengelola Irigasi.
- ✓ Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi.

### 2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program terhadap sasaran dan tujuannya. Indikator kinerja utama sesuai dengan butir 11 (sebelas) Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dinas Pengairan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis dari Dinas Pengairan Aceh. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pengairan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pengairan**

| Sasaran Strategis : Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik | | |
|---|---|---|
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Persentase terhadap target akhir RPA 2026** |
| **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | | |
| Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % | 60,11% |
| **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** | | |
| Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % | 77,67% |
| Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama | 41,16 % | 42,56% |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | **60,11%** |

*Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2025*

### 2.1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Pemerintah Aceh kepada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh guna mewujudkan capaian sasaran strategis. Perjanjian Kinerja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

### 2.1.6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Perjanjian Kinerja 2025 Dinas Pengairan Aceh mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur SDA dalam kondisi baik dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja sebagai acuan penilaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik.
2. Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik.
3. Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama.

## 2.2 Metode Pengukuran

Penilaian kinerja yang diberikan pada rencana aksi tahun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada Permen PAN & RB Nomor 20 Tahun 2013. Penilaian dibagi menjadi 6 kategori dan dibedakan berdasarkan range nilai dan warna seperti dalam Tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3 Tabel Kriteria Penilaian**

| NO | KATEGORI | NILAI ANGKA | INTERPRETASI | KATEGORI WARNA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | > 85-100 | Memuaskan | |
| 2 | AA | > 75-85 | Sangat Baik | |
| 3 | B | > 65-75 | Baik, Perlu sedikit perbaikan | |
| 4 | CC | >50-65 | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar | |
| 5 | CC | > 30-50 | Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar | |
| 6 | D | 0-30 | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar | |

*Sumber : Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2013*

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan DPA - SKPA Tahun Anggaran 2025 Dinas Pengairan Aceh. Nilai Kinerja dari masing-masing *output* merupakan perbandingan nilai kinerja dari realisasi terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing *sub-output*.

### 2.2.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan target yang harus dicapai pada tahun 2025, sehingga keberhasilan dan kegagalan akan diukur dari Perjanjian Kinerja tersebut. Tingkat capaian sasaran strategis Dinas Pengairan Aceh tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4. Pengukuran Kinerja**

| Sasaran Strategis : Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Persentase Capaian Kinerja** | **Persentase terhadap target akhir RPA 2026** |
| **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | | | | |
| Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % | 56,54 % | 97,25% | 60,11% |
| **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** | | | | |
| Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % | 72,98 % | 97,15% | 77,67% |
| Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama | 41,16 % | 40,11 % | 97,45% | 42,56% |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | **97,28%** | **60,11%** |

*Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2025*

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas bahwa realisasi pencapaian indikator kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya infrastruktur SDA dalam kondisi baik terdapat 3 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik dengan target 58,14% dan pada capaian kinerja 56,54% dan persentase terhadap target akhir RPA Tahun 2026 adalah 60,11%.
2. Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik dengan target 75,12% dan pada capaian kinerja masih 72,98% dan persentase terhadap target akhir RPA Tahun 2026 adalah 77,67%.
3. Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama, dengan target 41,16% dan pada capaian kinerja 40,11% dan persentase terhadap target akhir RPA Tahun 2026 adalah 42,56%.

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## LAPORAN KINERJA
## DINAS PENGAIRAN ACEH
## TAHUN 2025

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengairan Aceh merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi Dinas Pengairan Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

## 3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja yang direalisasikan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja per triwulan (triwulan I sampai dengan triwulan IV) dan dapat dinilai berdasarkan kategori nilai dari kinerja sesuai Tabel 2.3 Kriteria Penilaian pada Bab II Halaman II-10, merupakan suatu penilaian rencana aksi yang selanjutnya rencana aksi capaian fisik triwulan Tahun 2025 dalam perjanjian kinerja menjelaskan bahwa rencana fisik yang telah ditargetkan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025.

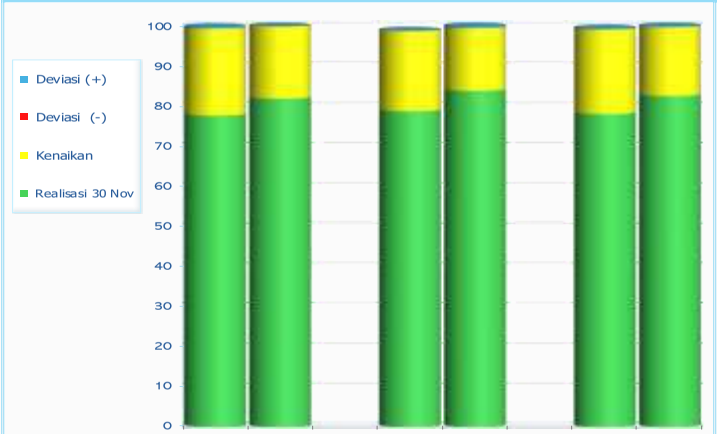
### 3.1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2025

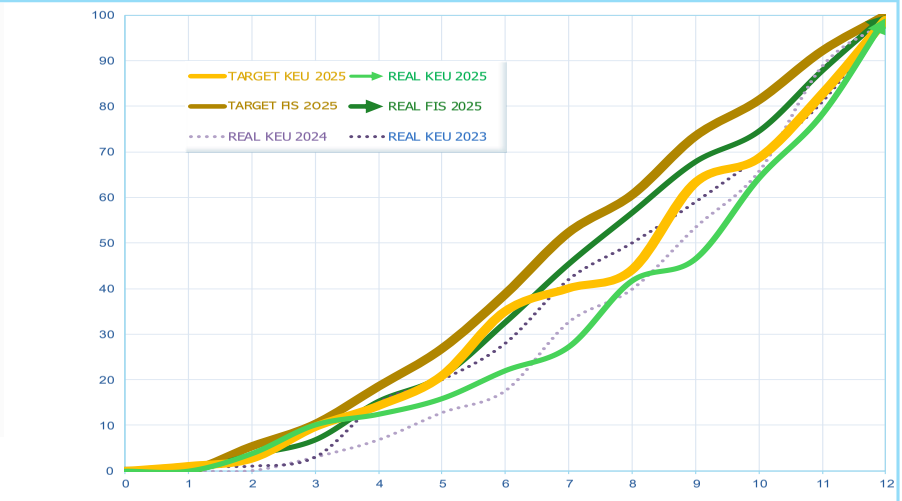
Hasil pencapaian kinerja per-Triwulan dan sekaligus dibandingkan terhadap rencana, untuk memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target per-Triwulanan. Adapun capaian fisik triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

## Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | KINERJA FISIK | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | TRIWULAN I | | | TRIWULAN II | | | TRIWULAN III | | | TRIWULAN IV | | |
| | | | | | | | | | RENCANA (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) | RENCANA (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) | RENCANA (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) | RENCANA (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % | **Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Luas Genangan Banjir yang terlindungi dari banjir akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama | 41,16 % | Pembangunan Tanggul Sungai | 4.709.751.904 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 26,80 | 38,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air | 1.479.422.345 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan UPTD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,02 | 0,23 | 0,53 | 78,99 | 33,10 | 41,90 | 100,00 | 93,72 | 93,72 |
| | | | | | | Normalisasi/Restorasi Sungai | 10.900.000.000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 27,58 | 39,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya | 74.963.268 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 34,42 | 24,55 | 71,33 | 78,71 | 70,65 | 89,77 | 100,00 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 1.093.735.548 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 10,18 | 6,31 | 62,01 | 77,02 | 12,95 | 16,81 | 89,18 | 81,40 | 91,27 | 100,00 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 89.800.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 17,37 | 34,74 | 86,97 | 36,48 | 41,94 | 100,00 | 98,23 | 98,23 |
| | | | | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 32.066.165.954 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 59,99 | 18,51 | 30,86 | 100,00 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai | 356.958.234 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 99,36 | 3,51 | 3,53 | 99,92 | 89,93 | 90,00 | 100,00 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | | Pembangunan Unit Air Baku | 500.000.000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.622.307.706 | Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 0,21 | 1,19 | 43,49 | 16,64 | 38,27 | 100,00 | 89,79 | 89,79 |
| | | | | | | Peningkatan Bendung Irigasi | 1.140.000.000 | Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 28,43 | 0,69 | 2,43 | 50,37 | 27,62 | 54,83 | 100,00 | 85,16 | 85,16 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 8.048.384.233 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 49,10 | 18,59 | 37,86 | 72,94 | 61,91 | 84,87 | 100,00 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 1.286.000.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 48,83 | 7,88 | 16,14 | 81,53 | 43,48 | 53,33 | 100,00 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 802.200.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 41,27 | 18,99 | 46,01 | 81,86 | 70,32 | 85,91 | 100,00 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 839.976.390 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 59,33 | 0,00 | 0,00 | 83,73 | 61,92 | 73,95 | 100,00 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | 103.908.980 | UPTD PI Wil-I, II, III, IV dan V | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 32,87 | 15,04 | 45,76 | 58,27 | 49,51 | 84,96 | 100,00 | 99,38 | 99,38 |
| | | | | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 400.000.000 | UPTD PI Wil-II, III, IV dan V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 99,82 | 99,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| APBA-P 2025 | PENGAIRAN Rp. 108.199.484.251,- | Target s.d 31 Des | | Realisasi s.d 31 Des | | Deviasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik |
| | | 98,9% | 98,8% | 99,2% | 99,8% | +0,3% | +0,99% |




| Progres (%) | Jenis Belanja | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | | |
| | Keu | Fis | Keu | Fis | Keu | Fis |
| Realisasi 30 Nov | 77,73 | 81,96 | 78,83 | 83,92 | 78,12 | 82,66 |
| Kenaikan | 21,69 | 18,04 | 20,01 | 15,57 | 21,09 | 17,16 |
| Deviasi (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deviasi (+) | 0,39 | 0,16 | 0,12 | 2,45 | 0,29 | 0,99 |
| Target s.d 31 Des | 99,0 | 99,8 | 98,7 | 97,0 | 98,9 | 98,8 |
| Realisasi s.d 31 Des | 99,4 | 100 | 98,8 | 99,5 | 99,2 | 99,8 |
| **Pagu Rp.** | **69.066.901.736** | | **39.132.582.515** | | **108.199.484.251** | |

| KETERANGAN | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Keu 2025 | 1 | 3 | 10 | 14 | 21 | 35 | 40 | 44 | 63 | 69 | 83 | 99 |
| **Real Keu 2025** | **0** | **4** | **10** | **12** | **16** | **22** | **27** | **42** | **46** | **64** | **78** | **99** |
| Target Fis 2025 | 0 | 5 | 10 | 19 | 27 | 39 | 52 | 61 | 73 | 81 | 92 | 100 |
| **Real Fis 2025** | **0** | **3** | **7** | **15** | **21** | **33** | **45** | **57** | **68** | **75** | **88** | **100** |
| Real Keu 2024 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 18 | 33 | 40 | 53 | 66 | 89 | 99 |
| Real Keu 2023 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 28 | 42 | 50 | 59 | 69 | 81 | 99 |

| Penjelasan Sisa Pagu | |
|---|---|
| **Kegiatan** | **853.705.087** |
| 1. Sisa Gaji dan Tunjangan | **188.774.687** |
| 2. Sisa Tender | **27.639.897** |
| 3. Sisa Kontrak/Kegiatan | **614.430.503** |
| 4. Tunda/Batal | **22.860.000** |

**Gambar 3.1 Time Schedule (Kurva S) Dinas Pengairan**

**Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan I**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | KINERJA FISIK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | TW I | | |
| | | | | | | | | | RENCANA (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Meningkatkan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | | | | | |
| | | | - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Luas Genangan Banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan Sungai dan Pasang Purnama | 41,16 % | Pembangunan Tanggul Sungai | 4.709.751.904 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | 1.479.422.345 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan UPTD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Normalisasi/Restorasi Sungai | 10.900.000.000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 74.963.268 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 10,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 1.093.735.548 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 10,18 | 6,31 | 62,01 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 89.800.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 13,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 32.066.165.954 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai | 3.58.958.274 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 4,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Pembangunan Unit Air Baku | 500.000.000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.622.307.706 | Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Peningkatan Bendung Irigasi | 1.140.000.000 | Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 8.048.384.233 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 19,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 1.286.000.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 10,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 802.200.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 18,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 839.976.900 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | 105.908.980 | UPTD PWS-I, II, III, IV dan V | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 400.000.000 | UPTD PWS-I, II, III, IV dan V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Sumber : Rencana Aksi Dinas Pengairan, 2025*

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas bahwa realisasi pencapaian indikator kinerja triwulan I dengan sasaran strategis meningkatnya infrastruktur SDA dalam kondisi baik pada indikator kinerja persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik terdapat 2 indikator kegiatan dari program pengelolaan sumber daya air yaitu :

a. Indikator kegiatan persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama dengan rencana aksi :
   - Pembangunan tanggul sungai dengan nilai kinerja 0% (sangat kurang).
   - Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi nilai kinerja 0% (sangat kurang).

- Normalisasi/Restorasi Sungai nilai kinerja 0% (sangat kurang)
- Evaluasi dan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi nilai kinerja masih 0% (sangat kurang).
- Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai Kewenangan Provinsi nilai kinerja 62,01% (cukup).
- Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya nilai kinerja masih 0% (sangat kurang).
- Pembangunan bangunan perkuatan tebing nilai kinerja masih 0% (sangat kurang).
- Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai nilai kinerja masih 0% (sangat kurang)
- Pembangunan unit air baku nilai kinerja juga masih 0% (sangat kurang).

b. Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik dengan rencana aksi :
   - Pembangunan jaringan irigasi permukaan nilai kinerja masih 0,0% (sangat kurang).
   - Pembangunan bendung irigasi nilai kinerja masih 0,00% (sangat kurang)
   - Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dengan nilai kinerja masih 0% (sangat kurang).
   - Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi nilai kinerja masih 0% (sangat kurang).
   - Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa nilai kinerja yang masih 0% (sangat kurang).
   - Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa nilai kinerja masih 0% (sangat kurang).
   - Operasional kelembagaan pengelola irigasi nilai kinerja 0% (sangat kurang).

- Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi dengan nilai kinerja juga masih 0% (sangat kurang).

Nilai kinerja yang masih sangat kurang disebabkan karena Proses pengadaan barang/jasa yang masih berlangsung dan penyesuaian dokumen perencanaan dan perubahan teknis di lapangan.

**Tabel 3.3 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan II**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | KINERJA FISIK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | TW II | | |
| | | | | | | | | | RENCANA (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Meningkatkan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % | **Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | | | | | | | | |
| | | | - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Luas Genangan Banjir yang terlindungi dari banjir akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama | 41,16 % | Pembangunan Tanggul Sungai | 4.709.751.904 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 29,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | 1.479.422.345 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan UPTD | 43,02 | 0,23 | 0,53 |
| | | | | | | Normalisasi/Restorasi Sungai | 10.900.000.000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 16,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 74.963.268 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 34,42 | 24,55 | 71,33 |
| | | | | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 1.093.735.548 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 77,02 | 12,95 | 16,81 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 89.800.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 50,00 | 17,37 | 34,74 |
| | | | | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 32.066.165.954 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 20,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai | 356.958.234 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 99,36 | 3,51 | 3,53 |
| | | | | | | Pembangunan Unit Air Baku | 500.000.000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.622.307.706 | Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai | 17,68 | 0,21 | 1,19 |
| | | | | | | Peningkatan Bendung Irigasi | 1.140.000.000 | Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai | 28,43 | 0,69 | 2,43 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 8.048.384.233 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 49,10 | 18,59 | 37,86 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 1.286.000.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 48,83 | 7,88 | 16,14 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 802.200.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 41,27 | 18,99 | 46,01 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 839.976.390 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 59,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | 103.908.980 | UPTD PI Wil-I, II, III, IV dan V | 32,87 | 15,04 | 45,76 |
| | | | | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 400.000.000 | UPTD PI Wil-II, III, IV dan V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Sumber : Rencana Aksi Dinas Pengairan, 2025*

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas bahwa realisasi pencapaian indikator kinerja triwulan II dengan sasaran strategis meningkatnya infrastruktur SDA dalam kondisi baik pada indikator kinerja persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam

kondisi baik terdapat 2 indikator kegiatan dari program pengelolaan sumber daya air yaitu :

a. Indikator kegiatan persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama dengan rencana aksi :
   - Pembangunan tanggul sungai dengan nilai kinerja 0% (sangat kurang).
   - Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi nilai kinerja 0,53% (sangat kurang).
   - Normalisasi/Restorasi Sungai nilai kinerja 0% (sangat kurang)
   - Evaluasi dan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi nilai kinerja masih 71,33% (baik).
   - Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai Kewenangan Provinsi nilai kinerja 16,81% (sangat kurang).
   - Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya nilai kinerja masih 34,74% (kurang).
   - Pembangunan bangunan perkuatan tebing nilai kinerja masih 0% (sangat kurang).
   - Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai nilai kinerja masih 3,53% (sangat kurang)
   - Pembangunan unit air baku nilai kinerja juga masih 0% (sangat kurang).

b. Indikator Kegiatan Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik dengan rencana aksi :
   - Pembangunan jaringan irigasi permukaan nilai kinerja masih 1,19% (sangat kurang).
   - Pembangunan bendung irigasi nilai kinerja masih 2,43% (sangat kurang)
   - Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dengan nilai kinerja masih 37,86% (kurang).

- Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi nilai kinerja masih 16,14% (sangat kurang).
- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa nilai kinerja yang masih 46,01% (kurang).
- Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa nilai kinerja masih 0% (sangat kurang).
- Operasional kelembagaan pengelola irigasi nilai kinerja 45,76% (kurang).
- Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi dengan nilai kinerja juga masih 0% (sangat kurang).

Nilai kinerja yang masih sangat kurang disebabkan karena roses pengadaan barang/jasa yang masih berlangsung dan enyesuaian dokumen perencanaan dan perubahan teknis di lapangan.

**Tabel 3.4 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan III**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | KINERJA FISIK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | TRIWULAN III | | |
| | | | | | | | | | RENCANA (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Meningkatkan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % | **Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | | | | | | | | |
| | | | - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Luas Genangan Banjir yang terlindungi dari banjir akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama | 41,16 % | Pembangunan Tanggul Sungai | 4.709.751.904 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 70,00 | 26,80 | 38,29 |
| | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air | 1.479.422.345 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan UPTD | 78,99 | 33,10 | 41,90 |
| | | | | | | Normalisasi/Restorasi Sungai | 10.900.000.000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 70,00 | 27,58 | 39,40 |
| | | | | | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya | 74.963.268 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 78,71 | 70,65 | 89,77 |
| | | | | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 1.093.735.548 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 89,18 | 81,40 | 91,27 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 89.800.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 86,97 | 36,48 | 41,94 |
| | | | | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 32.066.165.954 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 59,99 | 18,51 | 30,86 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai | 356.958.234 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 99,92 | 89,93 | 90,00 |
| | | | | | | Pembangunan Unit Air Baku | 500.000.000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.622.307.706 | Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai | 43,49 | 16,64 | 38,27 |
| | | | | | | Peningkatan Bendung Irigasi | 1.140.000.000 | Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai | 50,37 | 27,62 | 54,83 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 8.048.384.233 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 72,94 | 61,91 | 84,87 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 1.286.000.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 81,53 | 43,48 | 53,33 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 802.200.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 81,86 | 70,32 | 85,91 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 839.976.390 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 83,73 | 61,92 | 73,95 |
| | | | | | | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | 103.908.980 | UPTD PI Wil-I, II, III, IV dan V | 58,27 | 49,51 | 84,96 |
| | | | | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 400.000.000 | UPTD PI Wil-II, III, IV dan V | 100,0 | 99,82 | 99,82 |

*Sumber : Rencana Aksi Dinas Pengairan, 2025*

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas bahwa realisasi pencapaian indikator kinerja triwulan III dengan sasaran strategis meningkatnya infrastruktur SDA dalam kondisi baik pada indikator kinerja persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik terdapat 2 indikator kegiatan dari program pengelolaan sumber daya air yaitu :

a. Indikator kegiatan persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama dengan rencana aksi :
   - Pembangunan tanggul sungai dengan nilai kinerja 38,29% (kurang).
   - Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi nilai kinerja 41,90% (kurang).
   - Normalisasi/Restorasi Sungai nilai kinerja 39,40% (kurang)
   - Evaluasi dan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi nilai kinerja masih 89,77% (memuaskan).
   - Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai Kewenangan Provinsi nilai kinerja 91,27% (memuaskan).
   - Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya nilai kinerja masih 41,94% (kurang).
   - Pembangunan bangunan perkuatan tebing nilai kinerja masih 30,86% (kurang).
   - Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai nilai kinerja masih 90% (memuaskan)
   - Pembangunan unit air baku nilai kinerja juga masih 0% (sangat kurang).

b. Indikator Kegiatan Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik dengan rencana aksi :
   - Pembangunan jaringan irigasi permukaan nilai kinerja masih 38,27% (kurang).
   - Pembangunan bendung irigasi nilai kinerja masih 54,83% (cukup)

- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dengan nilai kinerja masih 84,87% (sangat baik).
- Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi nilai kinerja masih 53,33% (cukup).
- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa nilai kinerja yang masih 85,91% (memuaskan).
- Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa nilai kinerja masih 73,95% (baik).
- Operasional kelembagaan pengelola irigasi nilai kinerja 84,96% (sangat baik).
- Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi dengan nilai kinerja juga masih 99,82% (memuaskan).

Beberapa kegiatan masih belum optimal karena pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang masih berada pada tahap persiapan dan mobilisasi.

**Tabel 3.5 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan IV**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | KINERJA FISIK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | TRIWULAN IV | | |
| | | | | | | | | | RENCANA (%) | REALISASI (%) | KINERJA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % | **Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | | | | | | | | |
| | | | - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Luas Genangan Banjir yang terlindungi dari banjir akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama | 41,16 % | Pembangunan Tanggul Sungai | 4.709.751.904 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air | 1.479.422.345 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan UPTD | 100,00 | 93,72 | 93,72 |
| | | | | | | Normalisasi/Restorasi Sungai | 10.900.000.000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya | 74.963.268 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 100,00 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 1.093.735.548 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 100,00 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 89.800.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 100,00 | 98,23 | 98,23 |
| | | | | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 32.066.165.954 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 100,00 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai | 356.958.234 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 100,00 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | | Pembangunan Unit Air Baku | 500.000.000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.622.307.706 | Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai | 100,00 | 89,79 | 89,79 |
| | | | | | | Peningkatan Bendung Irigasi | 1.140.000.000 | Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai | 100,00 | 85,16 | 85,16 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 8.048.384.233 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 100,00 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 1.286.000.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 100,00 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 802.200.000 | Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 100,00 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 839.976.390 | Bidang Teknik dan Konstruksi | 100,00 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | 103.908.980 | UPTD PI Wil-I, II, III, IV dan V | 100,00 | 99,38 | 99,38 |
| | | | | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 400.000.000 | UPTD PI Wil-II, III, IV dan V | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber : Rencana Aksi Dinas Pengairan, 2025*

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas bahwa realisasi pencapaian indikator kinerja triwulan IV dengan sasaran strategis meningkatnya infrastruktur SDA dalam kondisi baik pada indikator kinerja persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik terdapat 2 indikator kegiatan dari program pengelolaan sumber daya air yaitu :

a. Indikator kegiatan persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama dengan rencana aksi :
   - Pembangunan tanggul sungai dengan nilai kinerja 100% (memuaskan).
   - Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi nilai kinerja 93,72% (memuaskan).
   - Normalisasi/Restorasi Sungai nilai kinerja 100% (memuaskan)
   - Evaluasi dan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi nilai kinerja masih 99,84% (memuaskan).
   - Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai Kewenangan Provinsi nilai kinerja 99,78% (memuaskan).
   - Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya nilai kinerja masih 98,23% (memuaskan).
   - Pembangunan bangunan perkuatan tebing nilai kinerja masih 99,74% (memuaskan).
   - Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai nilai kinerja masih 99,86% (memuaskan)
   - Pembangunan unit air baku nilai kinerja juga masih 100% (memuaskan).

b. Indikator Kegiatan Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik dengan rencana aksi :
   - Pembangunan jaringan irigasi permukaan nilai kinerja masih 89,79% (memuaskan).
   - Pembangunan bendung irigasi nilai kinerja masih 85,16% (memuaskan)

- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dengan nilai kinerja masih 99,61% (memuaskan).
- Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi nilai kinerja masih 99,72% (memuaskan).
- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa nilai kinerja yang masih 99,94% (memuaskan).
- Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa nilai kinerja masih 99,92% (memuaskan).
- Operasional kelembagaan pengelola irigasi nilai kinerja 99,38% (memuaskan).
- Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi dengan nilai kinerja juga masih 100% (memuaskan).

## 3.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja atas sasaran dan indikator yang telah ditetapkan.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dalam Kondisi Baik, yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

**Tabel 3.6 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| Sasaran Strategis : Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Persentase Capaian Kinerja** | **Persentase terhadap target akhir RPA 2026** |
| **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | | | | |
| Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % | 56,54 % | 97,25% | 60,11% |
| **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** | | | | |
| Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % | 72,98 % | 97,15% | 77,67% |
| Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama | 41,16 % | 40,11 % | 97,45% | 42,56% |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | **97,28%** | **60,11%** |

*Sumber : Dinas Pengairan, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik menunjukkan bahwa secara umum realisasi kinerja telah mendekati target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui IKU dan IKD yang merepresentasikan capaian outcome dan kinerja daerah pada sektor sumber daya air.

Rata-rata capaian kinerja sebesar 97,28% menunjukkan bahwa secara pelaksanaan, kinerja telah berjalan efektif dan relative sesuai dengan target tahunan. Namun demikian capaian terhadap target akhir RPA 2026 yang masih pada angka 60,11% mengindikasikan perlunya upaya percepatan dan penguatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya agar target akhir pembangunan dapat tercapai secara optimal.

### 3.2.1. Perbandingan antara Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara realisasi capaian Perjanjian Kinerja tahun 2021 sampai dengan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

**Tabel 3.7 Perbandingan antara Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Perjanjian Kinerja 2021 | | Capaian Perjanjian Kinerja 2022 | | Capaian Perjanjian Kinerja 2023 | | Capaian Perjanjian Kinerja 2024 | | Capaian Perjanjian Kinerja 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aceh | Nasional | Aceh | Nasional | Aceh | Nasional | Aceh | Nasional | Aceh | Nasional |
| 1. | Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik | Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 79,55% | 0,00% | 82,56% | 0,00% | 55,31% | 0,00% | 56,44% | 0,00% | 56,54% | 0,00% |
| | | Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik | 79,55% | 0,00% | 82,56% | 0,00% | 71,21% | 0,00% | 72,98% | 0,00% | 72,98% | 0,00% |
| | | Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama | 37,77% | 0,00% | 38,21% | 0,00% | 39,41% | 0,00% | 39,91% | 0,00% | 40,11% | 0,00% |

*Sumber : Dinas Pengairan, 2025*

Berdasarkan Tabel 3.7 diatas maka dapat dijelas untuk masing-masing indikator kinerja bahwa :

1. Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik.

   Capaian indikator Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik pada periode tahun 2021-2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 capaian tercatat sebesar 79,55% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 82,56%. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 55,31%, yang kemudian relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 56,44% dan tahun 2025 sebesar 56,54%. Penurunan capaian sejak tahun 2023 hingga 2025 mengindikasikan adanya perubahan kondisi dan tantangan dalam pengelolaan infrastruktur SDA, antara lain keterbatasan peningkatan kondisi fisik infrastruktur serta fokus kegiatan yang lebih diarahkan pada pemeliharaan jaringan eksisting. Capaian tahun 2025 menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas kinerja, meskipun peningkatan signifikan masih memerlukan penguatan strategi dan dukungan sumber daya pada tahun-tahun berikutnya.

2. Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik

   Capaian indikator persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 79,55% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 82,56%. Selanjutnya, pada tahun 2023 capaian menurun menjadi 71,21%, namun

kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 72,98% dan tetap pada angka yang sama pada tahun 2025 yaitu 72,98%. Tidak berubahnya capaian pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa belum terdapat penambahan luasan jaringan irigasi sehingga capaian kinerja masih sama dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan lebih difokuskan pada pemeliharaan dan penjagaan kondisi jaringan irigasi untuk tetap bisa mempertahankan tingkat layanan irigasi agar tidak mengalami penurunan.

3. Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama

Indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode tahun 2021–2025. Pada tahun 2021 capaian tercatat sebesar 37,77%, meningkat menjadi 38,21% pada tahun 2022, pada tahun 2023 sebesar 39,41%, pada tahun 2024 sebesar 39,91% dan mencapai 40,11% pada tahun 2025. Peningkatan capaian secara bertahap tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengendalian banjir, meskipun masih dihadapkan pada tantangan eksternal seperti intensitas curah hujan dan pasang purnama. Upaya pengendalian banjir yang dilakukan telah memberikan dampak, namun tetap memerlukan penguatan dan keberlanjutan program agar hasil yang ingin dicapai dapat lebih optimal.

### 3.2.2. Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025, Target Renstra Tahun 2023 - 2026 dan Target RPA Tahun 2023 - 2025

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 terhadap Target Renstra Tahun 2025 dan Target RPA Tahun 2025 dapat diuraikan pada Tabel 3.8 berikut :

**Tabel 3.8 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Target Renstra Tahun 2025 dan Target RPA Tahun 2025**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Renstra 2025 | | Target RPA 2025 | | Capaian Perjanjian Kinerja 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aceh | Nasional | Aceh | Nasional | Aceh | Nasional |
| 1. | Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik | Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14% | 0,00% | 60,11% | 0,00% | 56,54% | 0,00% |
| | | Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12% | 0,00% | 77,67% | 0,00% | 72,98% | 0,00% |
| | | Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama | 41,16% | 0,00% | 42,56% | 0,00% | 40,11% | 0,00% |

*Sumber : Dinas Pengairan, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengukuran kinerja untuk indikator kinerja :

1. Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik

   Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 56,54%. Capaian tersebut belum mencapai target Rencana Strategis (Renstra 2023-2026) sebesar 58,14% maupun target Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPA 2023-2025) sebesar 60,11%. Adapun perbandingan kinerja dengan tingkat nasional belum dapat dilakukan, mengingat data pembanding nasional untuk indikator ini belum tersedia (0%). Oleh karena itu, evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian internal terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

   Belum tercapainya target kinerja tersebut antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan kondisi fisik infrastruktur SDA yang memerlukan penanganan lanjutan, keterbatasan anggaran, serta prioritas pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan persentase infrastruktur dalam kondisi baik. Meskipun demikian capaian yang diperoleh menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur SDA agar tetap dalam kondisi baik.

2. Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik

   Capaian indikator persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik pada tahun 2025 tetap sebesar 72,98% sama dengan capaian tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan luasan jaringan

irigasi. Capaian ini juga belum sepenuhnya mencapai target Rencana Strategis (Renstra 2023–2026) sebesar 75,12% maupun target Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPA 2023-2026) sebesar 77,67%. Adapun perbandingan kinerja dengan tingkat nasional belum dapat dilakukan, mengingat data pembanding nasional untuk indikator ini belum tersedia (0%). Dengan demikian evaluasi kinerja difokuskan pada perbandingan antara capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini lebih difokuskan pada pemeliharaan dan penjagaan kondisi jaringan irigasi yang bertujuan untuk mempertahankan tingkat layanan irigasi agar tidak mengalami penurunan. Dengan demikian, meskipun upaya pengelolaan dan pemeliharaan tetap dilakukan dampaknya belum mendorong peningkatan persentase irigasi secara keseluruhan.

3. Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama

   Capaian Perjanjian Kinerja untuk indikator ini sebesar 40,11%. Capaian ini juga belum sepenuhnya mencapai target Rencana Strategis (Renstra 2023-2026) sebesar 41,16% maupun target Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPA 2023-2026) sebesar 42,56%. Adapun perbandingan kinerja dengan tingkat nasional belum dapat dilakukan, mengingat data pembanding nasional untuk indikator ini belum tersedia (0%). Dengan demikian evaluasi kinerja difokuskan pada perbandingan antara capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

### 3.2.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2029

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2029 menunjukkan bahwa capaian tahun berjalan masih merupakan bagian dari tahapan pencapaian target Renstra.

Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan penajaman strategi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya guna memastikan ketercapaian target jangka menengah secara optimal.

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2029**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 2024 | Realisasi 2025 | | | Tingkat Akhir RPJM (2029) | % Capaian RPJM 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Tingkat Capaian | | |
| 1. | Indeks Ketahanan Air | Indeks | 3,58 | 3,58 | 3,55 | 99,16 | 3,72 | 95,43 |
| 2. | Kapasitas Air Baku | $m^3$/detik | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 100,00 | 2,03 | 9,36 |
| 3. | Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | % | 56,59 | 56,59 | 56,54 | 99,91 | 57,12 | 98,98 |
| 4. | Persentase Irigasi Modern | % | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 100,00 | 69,58 | 95,53 |

*Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2025*

- Pada tahun 2025, target Indeks Ketahanan Air sebesar 3,58% telah tercapai dengan realisasi 3,55%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,16%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJM tahun 2029 sebesar 3,72%, persentase capaian RPJM 2029 untuk indikator kinerja indeks ketahanan air mencapai 95,43%. Kedepan upaya peningkatan kinerja akan terus difokuskan pada penguatan infrastruktur pengairan, konservasi sumber daya air, dan peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim guna mencapai target RPJM secara optimal.

- Pada tahun 2025 target Kapasitas Air Baku sebesar 0,19% telah terealisasi sebesar 0,19% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kapasitas air baku telah dilaksanakan sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan dan tidak mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2024.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJM tahun 2029 sebesar 2,03%, persentase capaian RPJM 2029 mencapai 9,36%, sehingga masih diperlukan upaya percepatan melalui peningkatan pembangunan dan optimalisasi infrastruktur air baku agar target RPJM dapat dicapai secara optimal.

- Persentase ketersediaan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi baik, tahun 2025 ditargetkan 56,59% dan realisasi capaian 56,54% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,91%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan SDA telah berjalan sangat baik dan hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJM tahun 2029 sebesar 57,12%, persentase capaian RPJM 2029 mencapai 98,98% yang mengindikasikan bahwa indikator ini berjalan sesuai rencana menuju pencapaian target RPJM.

- Persentase irigasi modern tahun 2025 ditargetkan sebesar 66,47% dan realisasi capaian mencapai 66,47% sehingga tingkat capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan target RPJM tahun 2029 sebesar 69,58%, persentase capaian RPJM 2029 mencapai 98,98%. Hal ini menunjukkan proses indikator ini mendekati target jangka menengah dengan fokus kedepan pada peningkatan kualitas dan pemeliharaan irigasi modern untuk memastikan pencapaian target RPJM secara berkelanjutan.

## 3.3. Analisis Kinerja Kegiatan

Analisis kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode pelaporan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

### 3.3.1. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Pengairan Tahun 2025

Pengelolaan sumber daya manusia Dinas Pengairan pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Dengan jumlah pegawai sebanyak

388 orang, yang terdiri dari 261 orang PNS, 93 orang PPPK dan 34 orang Tenaga Kontrak. Struktur sumber daya manuasi telah disusun secara proposional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dominasi PNS memberikan stabilitas kelembagaan dan keberlanjutan pelaksanaan program, sementara keberadaan PPPK dan tenaga kontrak berperan sebagai pendukung fleksibilitas operasional.

Untuk meningkatkan efisiensi secara berkelanjutan, diperlukan penataan beban kerja yang lebih merata, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kinerja pegawai agar output instansi dapat dicapai secara optimal dengan sumber daya yang tersedia.

### 3.3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan

Dari analisa pencapaian sasaran program dan sasaran strategis Dinas Pengairan Aceh, didapat beberapa faktor keberhasilan dan faktor kegagalan yang mempe ngaruhi pencapaian target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

a. Faktor keberhasilan, antara lain :
    1. Tersedianya kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur SDA yang dilaksanakan berkelanjutan menjadi faktor utama dalam menjaga dan meningkatkan kondisi infrastruktur SDA. Kegiatan tersebut mendukung tercapainya indikator ketersediaan infrastruktur SDA dan jaringan irigasi dalam kondisi baik.
    2. Adanya dokumen perencanaan yang selaras antara pusat dan daerah, seperti Renstra, Renja, serta Perjanjian Kinerja yang memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDA. Keselarasan kebijakan ini mendukung konsistensi pencapaian kinerja dari tahun ke tahun.
    3. Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) yang dilakukan secara rutin berkontribusi signifikan dalam mempertahankan kondisi infrastruktur SDA dan jaringan irigasi agar tetap berfungsi optimal, sehingga capaian indikator dapat dipertahankan bahkan mengalami peningkatan.

4. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders (Pemerintah Daerah Setempat, masyarakat calon penerima manfaat dan lembaga/institusi terkait lainnya) sehingga semua permasalahan, kendala dan hambatan dapat diselesaikan tepat waktu, terutama berkaitan dengan pembebasan lahan.
5. Dukungan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat yang terkena dampak pekerjaan dan Pemda setempat, baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor kegagalan, antara lain :

Pada Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengairan Tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian. Pada Tabel 3.10 dibawah ini ditampilkan beberapa permasalahan yang menyebabkan kegagalan pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pengairan serta solusi penyelesaian.

**Tabel 3.10 Permasalahan dan Solusi Dinas Pengairan Tahun 2025**

| NO. | PERMASALAHAN | SOLUSI PENYELESAIAN |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah tenaga teknis dan manajerial belum mencukupi, serta kompetensi dalam perencanaan, pemeliharaan, dan mitigasi risiko bencana belum sepenuhnya memadai. | Pengembangan SDM dengan dilakukannya pelatihan teknis dan manajerial secara berkala, standarisasi kompetensi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mendukung pengelolaan SDA. |
| 2. | Terkait maraknya pelanggaran yang terjadi, diantaranya : pemanfaatan sepadan jaringan irigasi dengan mendirikan bangunan-bangunan liar diatas maupun dipinggir saluran irigasi seperti warung-warung, kios-kios, sadap liar, bercocok tanam diatas tanggul irigasi, pemanfaatan air irigasi diluar peruntukannya dan sebagainya yang dapat mengganggu | Terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran diperlukan tindak turun tangan melalui upaya penertiban oleh pemerintah daerah setempat dengan melibatkan seluruh stake holder yang ada sesuai aturan yang berlaku, kondisi ini perlu dituntaskan sesegera mungkin agar permasalahan tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaan kegiatan operasi |

| NO. | PERMASALAHAN | SOLUSI PENYELESAIAN |
|---|---|---|
| | kinerja irigasi pada hampir semua daerah irigasi. | dan pemeliharaan dimasa mendatang. |
| 3. | Luas Daerah Irigasi pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, disebutkan bahwa luas Daerah Irigasi yang ditangani oleh Dinas Pengairan Aceh pada kenyataannya kondisi fungsional yang ada tidak mencapai lagi luasan yang telah ditetapkan bahkan terus berkurang seiring dengan adanya alih fungsi lahan. | Berkaitan dengan nomenklatur Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 untuk luasan Daerah Irigasi yang tidak sesuai dengan kondisi luasan yang ada dilapangan agar diusulkan revisi luasan pada tahun mendatang. |
| 4. | Kondisi geografis yang telah terjadi yaitu bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur SDA dan irigasi. | Akibat bencana hidrometeorologi terjadi rescoping anggaran maka diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur dalam penanggulangan rekonstruksi pasca bencana. |

### 3.3.3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tiap Program Pada Dinas Pengairan

Rincian pengukuran kinerja kegiatan tiap program pada Dinas Pengairan adalah sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 46.304.024.239,- (Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.068.825.070,- (Empat Puluh Enam Miliar Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah) sehingga persentase penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2025 mencapai 99,94%. Program ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan

kualitas pelayanan prima bidang serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah lancarnya kebutuhan operasional perkantoran.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan dari program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **A** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran** | | **46.304.024.239,00** | | **46.068.825.070,00** | **99,49** | **99,49** |
| **1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tingkat Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja** | | **233.380.199,00** | | **233.237.750,00** | **99,94** | **100,00** |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dok | 233.380.199,00 | 6 Dok | 233.237.750,00 | 99,94 | 100,00 |
| **2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tingkat Capaian kinerja dan keuangan** | | **38.628.083.595,00** | | **38.436.690.908,00** | **99,50** | **100,00** |
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 360 OB | 36.921.365.595,00 | 360 OB | 36.732.590.908,00 | 99,49 | 100,00 |
| 2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dok | 1.706.718.000,00 | 1 Dok | 1.704.100.000,00 | 99,85 | 100,00 |
| **3** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor** | | **51.505.021,00** | | **51.394.300,00** | **99,79** | **100,00** |
| 3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Lap | 51.505.021,00 | 5 Lap | 51.394.300,00 | 99,79 | 100,00 |
| **4** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi** | | **438.294.111,00** | | **437.267.200,00** | **99,77** | **100,00** |
| 4.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 303.690.000,00 | 1 Paket | 303.690.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 21.360.000,00 | 5 Orang | 21.360.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 60 Orang | 113.244.111,00 | 80 Orang | 112.217.200,00 | 99,09 | 100,00 |
| **5** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor** | | **1.400.574.956,00** | | **1.382.789.893,00** | **98,73** | **100,00** |
| 5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 22.225.000,00 | 2 Paket | 22.219.980,00 | 99,98 | 100,00 |
| 5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | 379.163.269,00 | 12 Paket | 369.805.340,00 | 97,53 | 100,00 |
| 5.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 190.434.230,00 | 8 Paket | 188.008.122,00 | 98,73 | 100,00 |
| 5.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 51.825.230,00 | 2 Paket | 51.688.983,00 | 99,74 | 100,00 |
| 5.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dok | 11.998.000,00 | 12 Dok | 8.068.800,00 | 67,25 | 100,00 |
| 5.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Lap | 744.929.227,00 | 2 Lap | 742.998.668,00 | 99,74 | 100,00 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **6** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Dinas** | | **3.850.800.311,00** | | **3.836.541.001,00** | **99,63** | **99,61** |
| 6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Lap | 1.014.000,00 | - | - | - | - |
| 6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lap | 741.019.519,00 | 12 Lap | 740.942.760,00 | 99,99 | 100,00 |
| 6.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Lap | 182.188.492,00 | 12 Lap | 181.574.910,00 | 99,66 | 100,00 |
| 6.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Lap | 2.926.578.300,00 | 12 Lap | 2.914.023.331,00 | 99,57 | 100,00 |
| **7** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara** | | **1.701.386.046,00** | | **1.690.904.018,00** | **99,38** | **100,00** |
| 7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 11 Unit | 433.268.000,00 | 11 Unit | 432.537.770,00 | 99,83 | 100,00 |
| 7.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 86 Unit | 942.368.046,00 | 63 Unit | 934.083.570,00 | 99,12 | 100,00 |
| 7.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 325.750.000,00 | 4 Unit | 324.282.678,00 | 99,55 | 100,00 |

*Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2025*

Tahun 2025 kegiatan penyediaan surat menyurat tidak dapat dilaksanakan karena proses surat menyurat dilakukan melalui pengiriman langsung dan media elektronik seperti whatsapp (WA), email, dan lain-lain sehingga kegiatan ini tidak dapat direalisasikan.

## B. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Capaian pada program ini adalah persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik dengan alokasikan anggaran sebesar Rp. 61.895.460.012,- (Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Dua Belas Rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran pada tahun

anggaran 2025 sebesar Rp. 61.276.954.094,- (Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga persentase penyerapan anggaran mencapai 99,99%.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah sebagai berikut :

**I. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator capaian berupa persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik. Adapun keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama. Hasil kegiatan yang diharapkan adalah terlaksananya sub kegiatan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai. Terdapat 9 (sembilan) sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

a. Pembangunan tanggul sungai. Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu untuk melindungi areal permukiman, pertanian dan pusat kegiatan masyarakat dari ancaman banjir sungai. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya panjang tanggul sungai yang dibangun untuk melindungi areal permukiman, pertanian dan pusat kegiatan masyarakat dari ancaman banjir sungai. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | OUTPUT | OUTCOME | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang tanggul sungai yang dibangun | 0,30 Km | 4.405.765.951,00 | 0,30 Km | 60 Ha | 4.405.756.450,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Panjang tanggul sungai dan pengaman tebing sungai yang dibangun | 0,30 Km | 4.374.833.555,00 | 0,30 Km | 60 Ha | 4.374.833.200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.1 | Pembangunan Tanggul dan Pengaman Tebing Sungai Kr. Tamiang Kab. Aceh Tamiang | Panjang tanggul sungai dan pengaman tebing sungai yang dibangun | 0,30 Km | 4.207.756.355,00 | 0,30 Km | 60 Ha | 4.207.756.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.2 | Supervisi Pembangunan Tanggul dan Pengaman Tebing Sungai Kr. Tamiang Kab. Aceh Tamiang | Jumlah dokumen supervisi/pengawasan pembangunan tanggul sungai | 1 Dok | 167.077.200,00 | 1 Dok | 1 Dok | 167.077.200,00 | 100,00 | 100,00 |

b. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan Provinsi. Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA WS kewenangan Provinsi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi pengelolaan SDA terpadu dan berkelanjutan. Adapun kegiatan yang selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 yaitu :

a) Kegiatan pada Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Aceh

Kegiatan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Aceh yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 yaitu Rapat Tim kerja Dewan Sumber Daya Air, Sidang Dewan Sumber Daya Air, Pemilihan Anggota Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Aceh dan Kunjungan Lapangan Dewan Sumber Daya Air.

Rapat tim kerja Dewan Sumber Daya Air dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Rapat Tim | Tanggal | Materi Pembahasan | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokja 1 | 24 April 2025 | Terjadwalnya Program dan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air Aceh Tahun 2025 | 16 Orang |
| 2. | Pokja 2 | 24 Juli 2025 | Permasalahan tentang penyediaan insfrastruktur air bersih di Aceh dan BUMD Air minum dalam pelayanan air bersih di Aceh | 16 Orang |
| 3. | Pokja 3 | 11 September 2025 | Pengelolaan Air Tanah di Aceh | 9 Orang |
| 4. | Pokja 4 | 09 Oktober 2025 | Penyusunan draf Keputusan Gubernur tentang Pedoman Perhitungan Indeks Ketahanan Air Aceh | 15 Orang |
| 5. | Pokja 5 | 16 Oktober 2025 | Rencana Implementasi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) di Aceh | 16 Orang |
| 6. | Pokja 6 | 06 November 2025 | Penyusunan Rancangan Perhitungan Indeks Ketahanan Air (IKtA) Aceh | 16 Orang |

| No. | Rapat Tim | Tanggal | Materi Pembahasan | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Pokja 7 | 11 November 2025 | Penyusunan Rancangan Perhitungan Indeks Ketahanan Air (IKtA) Aceh | 17 Orang |
| 8. | Pokja 8 | 13 November 2025 | Pembahasan informasi terkait isu-isu strategis pada Wilayah Sungai Kewenangan Pusat dan isu-isu strategis pada Wilayah Sungai kewenangan Provinsi | 13 Orang |

Sidang Dewan Sumber Daya Air Aceh dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Sidang pertama dilaksanakan di Dinas Pengairan Aceh pada tanggal 21 Agustus 2025. Peserta yang menghadiri sidang ini berjumlah 29 orang yang terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah dan unsur non pemerintah. Tujuan sidang ini yaitu untuk mendorong dan mencari Solusi terhadap permasalahan BUMD Air Minum dalam pelayanan penyediaan air bersih di Aceh. Adapun materi pokok yang menjadi pembahasan adalah :
  - Sosialisasi Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air dan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
  - Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Penyediaan Air Minum Tahun 2025 – 2029 dan kondisi eksisting SPAM Provinsi Aceh;
  - Rekomendasi teknis dan tindak lanjut dalam mendukung BUMD air minum;
  - Permasalahan BUMD air minum dalam pelayanan air bersih di Aceh.

- Sidang kedua dilaksanakan di Dinas Pengairan Aceh pada tanggal 25 September 2025. Peserta yang menghadiri sidang ini berjumlah 27 orang yang terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah dan unsur non pemerintah. Tujuan sidang ini yaitu untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Air Tanah di Aceh. Adapun materi pokok yang menjadi pembahasan yaitu Kebijakan Pengelolaan Air Tanah di Aceh.

- Sidang ketiga dilaksanakan di Dinas Pengairan Aceh pada tanggal 29 Oktober 2025. Peserta yang menghadiri sidang ini berjumlah 35 orang yang terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah dan unsur non pemerintah. Tujuan sidang ini yaitu untuk merumuskan Rencana Implementasi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Aceh. Adapun materi pokok yang menjadi pembahasan adalah :
  - Dasar Hukum dan Kelembagaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Aceh;
  - Jenis-jenis pajak dan restribusi Aceh;
  - Pengalaman penyelenggaraan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) pada wilayah sungai kewenangan Provinsi.

Kegiatan pemilihan anggota Dewan Sumber Daya Air (DSDA) unsur non pemerintah periode 2026 – 2030 dilakukan secara terbuka dengan mendaftarkan organisasi/asosiasi yang sesuai dengan kelompok unsur organisasi Dewan Sumber Daya Air (DSDA). Wilayah kerja organisasi/asosiasi tersebut meliputi seluruh wilayah yang ada di Provinsi Aceh. Hasil pengumuman pengelompokkan organisasi/asosiasi calon anggota Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Aceh unsur non pemerintah periode 2026 – 2030 dapat diakses pada tautan https://bit.ly/4p66wEY. Kunjungan lapangan Dewan Sumber Daya Air Aceh dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Lokasi | Tanggal | Tujuan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan | 24 – 27 November 2025 | Koordinasi terkait isu-isu strategis Pengelolaan Sumber Daya Air |
| 2. | Kabupaten Pidie Jaya | 25 – 27 November 2025 | Koordinasi terkait isu-isu strategis Pengelolaan Sumber Daya Air |
| 3. | Kabupaten Aceh Tamiang | 19 – 22 Desember 2025 | Identifikasi infrastruktur Sumber Daya Air yang rusak akibat bencana Hidrometeorologi |
| 4. | Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa | 19 – 22 Desember 2025 | Identifikasi infrastruktur Sumber Daya Air yang rusak akibat bencana Hidrometeorologi |

b) Kegiatan pada UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II

Kegiatan pada UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II yaitu pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pase – Peusangan yang dilaksanakan dengan tujuan tersedianya laporan kegiatan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pase – Peusangan. Hasil yang diharapkan berupa terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 yaitu Rapat Pokja TKPSDA WS Pase – Peusangan dan Sidang TKPSDA WS Pase – Peusangan. Rapat Pokja TKPSDA WS Pase – Peusangan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Rapat Tim | Tanggal | Materi Pembahasan | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokja 1 | 17 Juli 2025 | Usulan Isu-isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Pase-Peusangan | 9 Orang |
| 2. | Pokja 2 | 19 Agustus 2025 | Pembahasan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) pada WS. Pase-Peusangan | 9 Orang |
| 3. | Pokja 3 | 11 November 2025 | Penyusunan Sinkronisasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS. Pase – Peusangan | 9 Orang |

Sidang TKPSDA WS Pase – Peusangan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Sidang pertama pembahasan draft Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) pada Wilayah Sungai Pase – Peusangan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 di Luxury Hotel, Bireuen. Peserta yang ikut dalam sidang ini terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan unsur non pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Adapun materi pokok yang dibahas adalah :
  - Prospek curah hujan dan prakiraan musim tahun 2025/2026;
  - Pembahasan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) pada Wilayah Sungai Pase – Peusangan.

- Sidang kedua Pembahasan Isu – isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air WS Pase – Peusangan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 di Luxury Hotel, Bireuen. Peserta yang ikut dalam sidang ini terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan unsur non pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Adapun materi pokok yang didiskusikan yaitu :
  - Optimalisasi layanan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengaduan Masyarakat Pengairan (SI PADUM PENG);
  - Pengantar isu-isu strategis Wilayah Sungai Pase – Peusangan.

c) Kegiatan pada UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III

Kegiatan pada UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Tamiang – Langsa, dilaksanakan dengan tujuan tersedianya laporan kegiatan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Tamiang – Langsa. Hasil yang diharapkan berupa terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Rapat Pokja TKPSDA WS Tamiang – Langsa dan

Sidang TKPSDA WS Tamiang – Langsa. Rapat Pokja TKPSDA WS Tamiang – Langsa dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Rapat Tim | Tanggal | Materi Pembahasan | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokja I | 20 Agustus 2025 | Petunjuk Pelaksanaan RAAT dan Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan WS Tamiang – Langsa | 9 orang |
| 2. | Pokja II | 09 Oktober 2025 | Usulan Isu-isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Wilayah Sungai Tamiang – Langsa | 9 orang |
| 3. | Pokja III | 12 November 2025 | Sinkronisasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) | 9 orang |

Sidang TKPSDA WS Tamiang - Langsa dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Sidang pertama Pembahasan Draft Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Wilayah Sungai Tamiang - Langsa musim tanam 2025/2026 yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2025 di Hotel Kartika, Langsa. Peserta yang ikut dalam sidang ini terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan unsur non pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Adapun materi pokok yang menjadi pembahasan yaitu :
  - Prospek musim hujan 2025/2026 dan layanan informasi iklim Aceh;
  - Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT);
  - Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan WS. Tamiang – Langsa;
  - Draft Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) pada WS Tamiang – Langsa musim tanam 2025/2026.

- Sidang kedua pembahasan isu – isu strategis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Tamiang yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025 di Hotel Kartika, Langsa. Peserta yang ikut dalam sidang ini terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan unsur non pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Adapun materi pokok yang menjadi pembahasan yaitu :
  - Optimalisasi layanan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengaduan Masyarakat Pengairan (SI PADUM PENG);
  - Optimalisasi pengelolaan data dan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi melalui SPOPIT (Sistem Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Terpadu) pada UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh;
  - Pengantar isu – isu strategis Wilayah Sungai Tamiang – Langsa.

d) Kegiatan pada UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV

Kegiatan pada UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi yang dilaksanakan dengan tujuan tersedianya laporan kegiatan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi. Hasil yang diharapkan berupa terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 yaitu Rapat Pokja TKPSDA WS Teunom – Lambesoi dan Sidang TKPSDA WS Teunom – Lambesoi.

Rapat Pokja TKPSDA WS Teunom – Lambesoi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Rapat Tim | Tanggal | Materi Pembahasan | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapat Pokja 1 TKPSDA WS. Teunom-Lambesoi | 09 Juli 2025 | Sistem Informasi, Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi | 8 Orang |

| No. | Rapat Tim | Tanggal | Materi Pembahasan | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|---|
| | | | (SIH3) pada WS Teunom - Lambesoi | |
| 2. | Rapat Pokja 2 TKPSDA WS. Teunom-Lambesoi | 04 September 2025 | Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) WS. Teunom-Lambesoi tahun 2025/2026 | 8 Orang |
| 3. | Rapat Pokja 3 TKPSDA WS. Teunom-Lambesoi | 15 Oktober 2025 | Pembahasan isu-isu strategis pada WS. Teunom – Lambesoi | 8 Orang |

Sidang TKPSDA WS Teunom – Lambesoi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Sidang pertama monitoring dan evaluasi matrik rencana aksi pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 23 Juli 2025 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh. Peserta yang ikut dalam sidang ini terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah sebanyak 13 (tiga belas) orang dan unsur non pemerintah sebanyak 13 (tiga belas) orang. Adapun materi yang dibagikan adalah :
  - Pelaksanaan Sistem Informasi Hidrometeorologi pada Stasiun Klimatologi Aceh;
  - Pelaksanaan Sistem Informasi Hidrogeologi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - Pelaksanaan Sistem Informasi Hidologi pada Dinas Pengairan Aceh;
  - Portal SIH3 ACEH.

- Sidang kedua pembahasan draft Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) pada Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi musim tanam 2025/2026 yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 September 2025 bertempat di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh. Peserta yang ikut dalam sidang ini

terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah sebanyak 13 (tiga belas) orang dan unsur non pemerintah sebanyak 13 (tiga belas) orang. Adapun materi yang dibagikan adalah :

- Perkiraan musim hujan tahun 2025- 2026;
- Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT);
- Tata cara penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi.

- Sidang ketiga pembahasan isu – isu strategis pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 di Hotel Grand Nanggoe, Banda Aceh. Peserta yang ikut dalam sidang ini terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah sebanyak 13 (tiga belas) orang dan unsur non pemerintah sebanyak 13 (tiga belas) orang. Tujuan dari pelaksanaan sidang ini adalah untuk membahas sinkronisasi program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi. Adapun materi yang dibagikan adalah :
  - Upaya penanggulangan tambang logam tanpa izin dalam rangka mencegah kerusakan daerah aliran sungai pada Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi;
  - Upaya Penanganan pembalakan liar dalam rangka mencegah kerusakan daerah aliran sungai pada Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi;
  - Upaya Pemulihan daerah aliran sungai pada Wilayah Sungai Teunom – Lambesoi.

e) Kegiatan pada UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V

Kegiatan pada UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Baru – Kluet, dilaksanakan dengan tujuan tersedianya laporan kegiatan dan rekomendasi untuk meningkatkan

kualitas pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Baru - Kluet. Hasil yang diharapkan berupa terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Rapat Pokja TKPSDA WS Baru - Kluet dan Sidang TKPSDA WS Baru - Kluet.

Rapat Pokja TKPSDA WS Baru - Kluet dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) Kali dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Rapat Tim | Tanggal | Materi Pembahasan | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapat Pokja Pertama | 21 Juli 2025 | Pembahasan isu-isu strategis Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru – Kluet | 9 Orang |
| 2. | Rapat Pokja Kedua | 03 September 2025 | Pembahasan Draft Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) WS. Baru - Kluet Musim Tanam Tahun 2025/2026 | 9 Orang |
| 3. | Rapat Pokja Ketiga | 04 November 2025 | Sinkronisasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) | 9 Orang |

Sidang TKPSDA WS Baru - Kluet dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Sidang Pertama pembahasan draft Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) pada Wilayah Sungai Baru – Kluet yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025 di Grand Lauser Hotel, Blangpidie. Peserta yang ikut dalam sidang ini terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan unsur non pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Adapun materi pokok yang menjadi pembahasan yaitu :
  - Prediksi musim hujan 2025/2026 dan prospek curah hujan pada Wilayah Sungai Baru – Kluet;

- Petunjuk pelaksanaan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT);
- Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan Wilayah Sungai Baru – Kluet.

- Sidang kedua pembahasan isu – isu strategis pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Baru – Kluet yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025 di Grand Lauser Hotel, Blangpidie. Peserta yang ikut dalam sidang ini terdiri dari instansi-instansi yang mewakili unsur pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan unsur non pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Adapun materi pokok yang menjadi pembahasan yaitu :
  - Optimalisasi layanan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengaduan Masyarakat Pengairan (SI PADUM PENG);
  - Rencana penanganan banjir trumon;
  - Ekpose akhir DED pengendalian banjir Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;
  - Penyebab dan dampak banjir Trumon.

f) Komisi Irigasi

Kegiatan Komisi Irigasi yang selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 yaitu Rapat Pokja Sekretariat Komisi Irigasi dan Sidang Komisi Irigasi.

Rapat Pokja Sekretariat Komisi Irigasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Rapat Tim | Tanggal | Materi Pembahasan | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapat Pokja Pertama | 10 Juli 2025 | Pembahasan Materi Sidang Pertama Komisi Irigasi Tahun 2025 | 22 Orang |
| 2. | Rapat Pokja Kedua | 05 November 2025 | Pembahasan Materi Sidang Kedua Komisi Irigasi Tahun 2025 | 18 Orang |

Sidang Komisi Irigasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut :

- Sidang Komisi Irigasi Tahap I dilaksanakan pada tanggal 29 - 30 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand Nanggroe Hotel, Banda Aceh. Acara ini dihadiri oleh 24 (dua puluh empat) orang dari unsur non Pemerintah, 27 (dua puluh tujuh) orang dari unsur Pemerintah, 13 (tiga belas) orang dari Sekretariat Komisi Irigasi dan 26 (dua puluh enam) orang dari Dinas Pengairan. Tujuan dari sidang ini adalah mengevaluasi Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 600.1.2.3/960/2024 tentang Penetapan Rencana Pola dan Tata Tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh 2024/2025, serta membahas tentang Rencana Pola dan Tata Tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh 2025/2026. Sasaran yang ingin dicapai adalah menyepakati luas tanam, musim tanam rendengan dan musim gadu 2025/2026 serta mengetahui kebutuhan air irigasi dimasing-masing daerah irigasi baik kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh, sehingga mencapai hasil panen yang maksimal dengan mengoptimalkan ketersediaan air irigasi selama masa tanam. Adapun materi pokok yang disampaikan pada Sidang Komisi Irigasi tahap I adalah sebagai berikut :
  - Pengaruh iklim terhadap penentuan pola dan tata tanam tahun 2025/2026;
  - Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;
  - Potensi dan ketersediaan air pada daerah irigasi dalam menghadapi musim gadu dan rendengan tahun 2025/2026.

- Sidang Komisi Irigasi Tahap II dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 November 2025. Sidang ini dilaksanakan di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh dan dihadiri oleh 22 (dua puluh dua) orang dari unsur non pemerintah, 27 (dua puluh tujuh) orang dari unsur pemerintah, 12 (dua

belas) orang dari Sekretariat Komisi Irigasi dan 19 (sembilan belas) orang dari Dinas Pengairan dan unsur terkait lainnya. Tujuan dari sidang ini adalah mengevaluasi hasil Rekomendasi Sidang Kedua tahun 2024 serta merumuskan rencana operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan dan prioritas rehabilitasi untuk tahun 2026. Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan susunan rekomendasi rencana kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan dan prioritas rehabilitasi pada masing-masing daerah irigasi untuk tahun 2026 sehingga menjamin sarana dan prasarana jaringan irigasi dapat berfungsi secara optimal. Adapun materi yang disampaikan pada Sidang Komisi Irigasi Aceh tahap II adalah sebagai berikut :

- Peningkatan jaringan tersier melalui kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI);
- Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada jaringan utama.

c. Normalisasi/restorasi sungai. Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu untuk mengembalikan penampang ataupun kapasitas sungai dalam keadaan optimal sehingga mampu menampung debit sungai pada saat banjir. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya kapasitas penampang sungai yang optimal sehingga mampu menampung debit sungai pada saat banjir. Pada tahun 2025 terdapat pekerjaan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu pekerjaan normalisasi sungai Kr. Lageun – Pante Kuyun Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya yang ditargetkan sepanjang 5 km dan terealisasi sepanjang 1,20 km, hal ini disebabkan karena adanya pembangunan perkuatan tebing sepanjang 0,17 km yang mempengaruhi anggaran yang tersedia untuk kegiatan normalisasi/restorasi sungai. Pekerjaan normalisasi sungai Kr. Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya target sepanjang 2,18 km dan terealisasi sepanjang 2,10 km, hal ini terjadi karena adanya rescoping akibat bencana hidrometeorologi.

Adapun pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | | REALISASI | | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET OUTPUT | TARGET OUTCOME | ANGGARAN (Rp.) | OUTPUT | OUTCOME | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *5* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 3 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi | 7,77 Km | 1.216 Ha | 9.781.370.671,00 | 6,10 Km | 1.284 Ha | 9.781.220.652,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1 | Belanja Barang | Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran | 100% | | 3.777.302,00 | 100% | | 3.765.200,00 | 99,68 | 100,00 |
| 3.2 | Belanja Pemeliharaan | Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi | 7,77 Km | 1.216 Ha | 9.721.717.765,00 | 6,10 Km | 1.284 Ha | 9.721.626.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.1 | Normalisasi Sungai Kr. Lageun - Pante Kuyun Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya | Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi | 3,69 Km | 1000 Ha | 4.525.760.525,00 | 1,2 Km | 738 Ha | 4.525.760.000 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.2 | Normalisasi Sungai Kr. Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya | Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi | 2,5 Km | - | 3.948.089.000,00 | 2,1 Km | - | 3.948.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.3 | Normalisasi Sungai Kr. Trumon Gp. Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan | Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi | 1,58 Km | 216 Ha | 912.000.000,00 | 2,80 Km | 546 Ha | 911.999.000 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.4 | Supervisi Normalisasi Sungai Kr. Lageun - Pante Kuyun Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya | Jumlah dokumen yang direncanakan | 1 Dokumen | | 143.004.630,00 | 1 Dokumen | | 143.004.000 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.5 | Supervisi Normalisasi Sungai Kr. Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya | Jumlah dokumen yang direncanakan | 1 Dokumen | | 143.113.410,00 | 1 Dokumen | | 143.113.000 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.6 | Supervisi Normalisasi Sungai Kr. Trumon Gp. Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan | Jumlah dokumen yang direncanakan | 1 Dokumen | | 49.750.200,00 | 1 Dokumen | | 49.750.000 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3 | Belanja Perjalanan Dinas | Meningkatnya efektivitas koordinasi, monitoring dalam pelaksanaan program kegiatan | 100% | | 55.875.604,00 | 100% | | 55.829.452 | 99,92 | 100,00 |

d. Evaluasi dan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Provinsi. Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu melakukan monitoring dan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi teknis dalam pemanfaatan Sumber Daya Air pada wilayah sungai kewenangan Provinsi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlayaninya permohonan rekomendasi teknis atau izin penggunaan/pengusahaan SDA dengan keluaran berupa dokumen rekomendasi. Pada tahun 2025 jumlah dokumen evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Provinsi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

| NO. | PEMOHON | TUJUAN | LOKASI | SUNGAI | WILAYAH SUNGAI | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CV. Pante Cermen Gampong (Nazaruddin Syam) | Penambangan Galian C | Aceh Jaya | Kr. Teunom | Teunom-Lambeuso | REKOMTEK |

| NO. | PEMOHON | TUJUAN | LOKASI | SUNGAI | WILAYAH SUNGAI | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | PT. Qasas Sabang Berjaya | Penambangan Galian C | Aceh Selatan | Kr. Baru | Baru-Kluet | REKOMTEK |
| 3. | BUMG AL-HILAL | Penambangan Galian C | Bireuen | Kr. Peudada | Pase-Peusangan | REKOMTEK |
| 4. | PT. PN 1 Tanjung Seumantok | PKS | Aceh Tamiang | Kr. Tamiang | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 5. | CV. Tirta Aqia Jaya Radiens | AMDK | Bener Meriah | Mata Air | Pase-Peusangan | REKOMTEK |
| 6. | CV. HK Jaya Perkasa | Penambangan Galian C | Aceh Selatan | Kr. Meukek | Baru-Kluet | REKOMTEK |
| 7. | CV. PJ Muna | Penambangan Galian C | Aceh Selatan | Kr. Kluet | Baru-Kluet | REKOMTEK |
| 8. | PT. Dharma Agung | Pembibitan Kelapa Sawit | Aceh Tamiang | Kr. Simpang Kiri | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 9. | PT. PP Dagang dan Industri Nilam Wangi | Perumahan PKS | Aceh Tamiang | Merah | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 10. | PT. Bukit Safa | Perumahan PKS | Aceh Tamiang | Bampo | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 11. | PT. Dharma Sawita Nusantara | Perumahan PKS | Aceh Tamiang | Tenggulon | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 12. | PT. Tenggulon Raya | Pembibitan Kelapa Sawit & Perumahan | Aceh Tamiang | Kr. Simpang Kiri | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 13. | CV. Anugerah Alam Bersaudara | GALIAN C | Aceh Tamiang | Kr. Simpang Kanan | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 14. | CV. Alfath Moda | GALIAN C | Aceh Tamiang | Kr. Simapng Kanan | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |

| NO. | PEMOHON | TUJUAN | LOKASI | SUNGAI | WILAYAH SUNGAI | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Koperasi Wisata Alam Gayo | Arung Jeuram | Aceh Tengah | Kr. Peusangan | Pase-Peusangan | REKOMTEK |
| 16. | PT. PEMA Global Energi | Instalasi Pipa Penyalur Gas | Aceh Utara | Kr. Keureuto | Pase-Peusangan | REKOMTEK |
| 17. | Perumda Air Minum Tirta Pase | PDAM | Aceh Utara | Waduk Keureuto | Pase-Peusangan | REKOMTEK |
| 18. | PT. Surya Mata Ie | Pembibitan Kelapa Sawit & Perumahan | Aceh Selatan | Tamiang | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 19. | BUMG Mate Ie Buleun | Galian C | Aceh Selatan | Kr. Baru | Baru-Kluet | REKOMTEK |
| 21. | UD Higien | AMDK | Bener Meriah | Matai Air DAS Peusangan | Pase-Peusangan | REKOMTEK |
| 20. | PT. Anugerah Fajar Rezeki | Pabrik Kelapa Sawit | Aceh Timur | Alue Gadeng | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 22. | PT. Bumi Tamiang Sentosa | Pabrik Kelapa Sawit | Aceh Tamiang | Kaloy | Tamaiang-langsa | REKOMTEK |
| 23. | PT. SKPI/ACEH TIMUR INDONESIA | Pabrik Kelapa Sawit | Aceh Tamiang | Simpang Kiri | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 24. | PT. PN I PKS Pulo Tiga | Pabrik Kelapa Sawit | Aceh Tamiang | Kaloy | Tamaiang-langsa | REKOMTEK |
| 25. | PDAM Tirta Keumuneng | PDAM | Aceh Tamiang | Kr. Langsa | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 26. | CV. Anugerah Alam Sinar Jaya | Galian C | Aceh Tamiang | Sekundur | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 27. | PT. TAKABEYA PERKASA GROUP | Galian C | Bireuen | Peudada | Pase-Peusangan | REKOMTEK |

| NO. | PEMOHON | TUJUAN | LOKASI | SUNGAI | WILAYAH SUNGAI | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | CV. Agam Nago Perkasa | Galian C | Aceh Jaya | Teunom | Teunom-Lambeuso | REKOMTEK |
| 29. | CV. Afip Group | Galian C | Aceh Tamiang | Kaloy | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 30. | CV.Tanjung Perkasa | Galian C | Bireuen | Kr. Meuh | Pase-Peusangan | REKOMTEK |
| 31. | PT. ACEH TRUMON ANUGERAH KITA | PKS | Aceh Selatan | Kr. Luas | Baru-Kluet | REKOMTEK |
| 32. | PT. ZAITUN NUSANTARA OIL | PKS | Aceh Timur | Kr. Bayeun | Tamiang-Langsa | REKOMTEK |
| 33. | PT. Pupuk Iskandar Muda | PIM | Bireuen | Kr. Peusangan | Pase-Peusangan | REKOMTEK |
| 34. | PT. Perta Arun Gas | Pengolahan Gas Alam | Bireuen | Kr. Peusangan | Pase-Peusangan | REKOMTEK |
| 35. | PT. Syaukath Sejahtera | Pemanfaatan Air Permukaan | Bireuen | Kr. Mane | Pase-Peusangan | REKOMTEK |
| 36. | PT. Syaukath Agro | Pemakaian Air Permukaan | Aceh Jaya | Kr. Tilong | Teunom-Lambeuso | REKOMTEK |

e. Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan Provinsi. Pengelolaan Hidrologi merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, inventarisasi, pengolahan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan baik data dan informasi hidrologi, pos/bangunan hidrologi, termasuk peralatan hidrologi sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya data hidrologi yang memadai, akurat, tepat waktu, berkesinambungan dan dikelola dengan efektif dan efisien serta dapat dipercayai dalam pengelolaan sumber daya air. Hasil yang didapat dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah terkelolanya pos hidrologi dan kualitas air pada 4 (empat) Wilayah Sungai kewenangan yaitu WS Pase – Peusangan, WS Tamiang – Langsa, WS Teunom – Lambesoi dan WS Baru – Kluet.

f. Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempertahankan kinerja embung dan penampung air lainnya dalam kondisi optimum. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah beroperasi dan terpeliharanya embung dan penampung air lainnya. Adapun pekerjaan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 6 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 11 Unit | 89.800.000,00 | 7 Unit | 88.208.000,00 | 98,23 | 100,00 |
| 6.1 | Belanja Jasa | Meningkatnya efektivitas koordinasi, monitoring dan pelaksanaan program | 100% | 46.800.000,00 | 100% | 46.800.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.2 | Belanja Pemeliharaan | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 11 Unit | 43.000.000,00 | 7 Unit | 41.408.000,00 | 96,30 | 100,00 |
| 6.2.1 | Pemeliharaan Rutin Embung Lhok Gajah Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | 7.000.000,00 | 1 Unit | 6.994.500,00 | 99,92 | 100,00 |
| 6.2.2 | Pemeliharaan Rutin Embung Meurandeh Kota Langsa (Swakelola) | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | 5.000.000,00 | 1 Unit | 3.437.300,00 | 68,75 | 100,00 |
| 6.2.3 | Pemeliharaan Rutin Embung pada D.I. Cubo/Trienggadeng Wilayah I (Embung Alue Drien, Embung Lhok Pisang) (Kab. Pidie Jaya) (Swakelola) | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | 8.000.000,00 | 1 Unit | 7.995.200,00 | 99,94 | 100,00 |
| 6.2.4 | Pemeliharaan Rutin Embung pada D.I. Cubo/Trienggadeng Wilayah II (Embung Paya Seupat, Embung Paya Reuleut, Embung Paya Pie) (Kab. Pidie Jaya) (Swakelola) | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 3 Unit | 8.000.000,00 | 1 Unit | 7.992.200,00 | 99,90 | 100,00 |
| 6.2.5 | Pemeliharaan Rutin Embung pada D.I. Cubo/Trienggadeng Wilayah III (Embung Jurong Beurangkat, Embung Gleebruk, Embung Hutan Pantang) (Kab. Pidie Jaya) (Swakelola) | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 3 Unit | 8.000.000,00 | 2 Unit | 7.992.700,00 | 99,91 | 100,00 |
| 6.2.6 | Pemeliharaan Rutin Embung Teupin Keubeu Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | 7.000.000,00 | 1 Unit | 6.996.100,00 | 99,94 | 100,00 |

Untuk Embung Alue Drien, Embung Paya Sepat, Embung Paya Pie dan Embung Jurong Beurangkat tidak bisa dilakukan pekerjaan pemeliharaan rutin dikarekanakan areal genangan yang lebih luas dari yang ditargetkan sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan.

g. Pembangunan bangunan perkuatan tebing.

Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu untuk melindungi tebing sungai dari kerusakan yang disebabkan oleh daya rusak aliran sungai. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang dibangun untuk melindungi tebing sungai dari kerusakan yang disebabkan oleh arus sungai. Pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 7 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun | 1,24 Km | 29.565.382.717,00 | 0,74 Km | 29.488.291.600,00 | 99,74 | 100,00 |
| 7.1 | Belanja Barang | Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran | 100% | 6.165.954,00 | 100% | 6.162.800,00 | 99,95 | 100,00 |
| 7.2 | Belanja Perjalanan Dinas | Meningkatnya efektivitas koordinasi, monitoring dalam pelaksanaan program kegiatan | 100% | 35.000.000,00 | 100% | 34.928.800,00 | 99,80 | 100,00 |
| 7.3 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun | 1,24 Km | 29.524.216.763,00 | 0,74 Km | 29.447.200.000,00 | 99,74 | 100,00 |
| 7.3.1 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Lambeusoi Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya | Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun | 0,619 Km | 14.319.235.453,00 | 0,34 Km | 14.319.235.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.3.2 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Teunom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya (Lanjutan) | Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun | 0,619 Km | 14.262.102.022,00 | 0,40 Km | 14.262.102.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.3.3 | Supervisi Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Lambeusoi Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya | Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun | 1 Dokumen | 470.551.644,00 | 1 Dokumen | 470.551.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.3.4 | Supervisi Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Teunom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya (Lanjutan) | Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun | 1 Dokumen | 472.327.644,00 | 1 Dokumen | 395.312.000,00 | 83,69 | 100,00 |

Untuk pekerjaan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan karena pada pembangunan bangunan perkuatan tebing sungai Kr. Lambesoi Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya dari yang ditargetkan adalah sepanjang 0,619 Km, realisasi yang dapat dikerjakan adalah sepanjang 0,34 Km hal ini terjadi karena pergeseran titik lokasi yang disebabkan oleh adanya kegiatan BPBD Kabupaten/Kota sepanjang 250 M.

Pembangunan bangunan perkuatan tebing sungai kr. Teunom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya (lanjutan) dari yang ditargetkan adalah sepanjang 0,619 Km, realisasi yang dapat dikerjakan adalah sepanjang 0,40 Km hal ini terjadi karena terjadinya abrasi/longsoran pada titik pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

h. Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai. Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu untuk menyusun dokumen perencanaan konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang disusun. Pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 8 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, dan pengaman pantai yang disusun | 6 Dokumen | 646.074.462,00 | 6 Dokumen | 645.183.182,00 | 99,86 | 100,00 |
| 8.1 | Belanja Barang | Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran | 100% | 6.294.836,00 | 100% | 6.293.582,00 | 99,98 | 100,00 |
| 8.2 | Belanja Jasa | Meningkatnya efektivitas koordinasi, monitoring dan pelaksanaan program | 100% | 589.116.228,00 | 100% | 588.366.000,00 | 99,87 | 100,00 |
| 8.2.1 | DED Normalisasi Sungai Kr. Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, dan pengaman pantai yang disusun | 1 Dokumen | 99.713.187,00 | 1 Dokumen | 99.713.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.2.2 | DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Teunom Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, dan pengaman pantai yang disusun | 1 Dokumen | 99.841.947,00 | 1 Dokumen | 99.841.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.2.3 | DED Pembangunan Krib Pengarah Arus Sungai Kr. Tamiang Kab. Aceh Tamiang | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, dan pengaman pantai yang disusun | 1 Dokumen | 99.561.094,00 | 1 Dokumen | 99.561.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.2.4 | Perencanaan Normalisasi Saluran Pembuangan Gp. Pulo Tinggi dan Pembuatan Pintu Air Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, dan pengaman pantai yang disusun | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | 1 Dokumen | 89.644.000,00 | 99,60 | 100,00 |
| 8.2.5 | DED Prasarana Pengaman Pantai Gp. Lhok Puuk Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, dan pengaman pantai yang disusun | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 1 Dokumen | 99.816.000,00 | 99,82 | 100,00 |
| 8.2.6 | Reviu SID Pengendalian Banjir dan Pengaturan Sungai Kr. Sawang Kec. Gandapura dan Muara Batu Kab. Bireuen/Aceh Utara | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, dan pengaman pantai yang disusun | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 1 Dokumen | 99.791.000,00 | 99,79 | 100,00 |
| 8.3 | Belanja Perjalanan Dinas | Meningkatnya efektivitas koordinasi, monitoring dalam pelaksanaan program kegiatan | 100% | 50.663.398,00 | 100% | 50.523.600,00 | 99,72 | 100,00 |

i. Pembangunan unit air baku. Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu untuk menambah jumlah unit air baku yang dapat difungsikan sehingga dapat menjamin kontiunitas debit air. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

bertambahnya unit air baku yang terbangun. Pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 9 | Pembangunan Unit Air Baku | Jumlah unit air baku yang dibangun | 1 Unit | 357.130.000,00 | 1 Unit | 357.130.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9.1 | Pembangunan Unit Air Baku Ds. Bale Nosar Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah (Swakelola) | Jumlah unit air baku yang dibangun | 1 Unit | 357.130.000,00 | 1 Unit | 357.130.000,00 | 100,00 | 100,00 |

## II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini mempunyai indikator capaian berupa persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik. Adapun keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik. Hasil kegiatan yang diharapkan adalah terlaksananya Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

a. Pembangunan jaringan irigasi permukaan. Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu melakukan pengelolaan berupa pembangunan dan pengembangan pada luasan sawah potensial/tadah hujan agar dapat memiliki jaringan irigasi teknis dalam rangka meningkatkan presentase luas tanam serta meningkatnya indeks produktivitas tanam. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun. Pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | | REALISASI | | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET OUTPUT | TARGET OUTCOME | ANGGARAN (Rp.) | OUTPUT | OUTCOME | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *5* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun | 0,32 Km | 950 Ha | 2.576.843.364,00 | 0,304 Km | 950 Ha | 2.313.786.780,00 | 89,79 | 100,00 |
| 1.1 | Belanja Barang dan Jasa | Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran dan efektivitas koordinasi, monitoring dan pelaksanaan program | 100% | 100% | 262.645.060,00 | 100% | 100% | 202.041.864,00 | 76,93 | 100,00 |
| 1.2 | Belanja Modal Tanah | Jumlah luasan tanah yang dibebaskan | 573,1 M | 0,5731 Ha | 859.662.646,00 | 606,4 M | 0,6064 Ha | 819.685.816,00 | 95,35 | 100,00 |
| 1.2.1 | Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi D.I. Aneuk Gajah Rheut Sub D.I. Krueng Peudada Kab. Bireuen | Jumlah luasan tanah yang dibebaskan | 573,1 M | 0,5731 Ha | 859.662.646 | 606,4 M | 0,6064 Ha | 819.685.816,00 | 95,35 | 100,00 |
| 1.3 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun | 0,32 Km | 950 Ha | 1.454.535.658 | 0,304 Km | 950 Ha | 1.292.059.100,00 | 88,83 | 100,00 |
| 1.3.1 | Pembangunan Saluran Suplesi D.I Nalan Kab. Bireuen Lanjutan) | Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun | 0,32 Km | 950 Ha | 1.372.384.558 | 0,304 Km | 950 Ha | 1.219.898.000,00 | 88,89 | 100,00 |
| 1.3.2 | Supervisi Pembangunan Saluran Suplesi D.I Nalan Kab. Bireuen Lanjutan) | Jumlah dokumen yang direncanakan | 1 Dok | 1 Dok | 82.151.100,00 | 1 Dok | 1 Dok | 72.161.100,00 | 87,84 | 100,00 |

b. Peningkatan bendung irigasi. Bendung merupakan bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai ketinggian yang diperlukan agar air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan. Pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 2 | Peningkatan Bendung Irigasi | Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan | 1 Unit | 1.113.276.152,00 | 1 Unit | 948.031.438,00 | 85,16 | |
| 2.1 | Belanja Barang dan Jasa | Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran dan efektivitas koordinasi, monitoring dan pelaksanaan program | 100% | 66.365.954,00 | 100% | 66.353.788,00 | 99,98 | 100,00 |
| 2.2 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan | 1 Unit | 1.046.910.198,00 | 1 Unit | 881.677.650,00 | 84,22 | |
| 2.2.1 | Peningkatan Bendung D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Lanjutan) | Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan | 1 Unit | 952.432.548,00 | 1 Unit | 797.190.000,00 | 83,70 | 100,00 |
| 2.2.2 | Supervisi Peningkatan Bendung D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Lanjutan) | Jumlah dokumen supervisi/pengawasan peningkatan bendung | 1 Dokumen | 94.477.650,00 | 1 Dokumen | 84.487.650,00 | 89,43 | 100,00 |

c. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan. Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu untuk mempertahankan kinerja jaringan irigasi dalam kondisi optimum. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah panjang jaringan

irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara. Pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 3 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 515,62 Km | 7.722.584.872,00 | 515,62 Km | 7.692.747.157,00 | 99,61 | 100,00 |
| 3.1 | Belanja Barang dan Jasa | Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran dan efektivitas koordinasi, monitoring dan pelaksanaan program | 100% | 1.228.331.908,00 | 100% | 1.228.328.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2 | Belanja Pemeliharaan | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 515,62 Km | 6.267.234.600,00 | 515,62 Km | 6.237.400.917,00 | 99,52 | 100,00 |
| 3.2.1 | Pemeliharaan Berkala pada D.I. Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 4,11 Km | 100.000.000,00 | 4,11 Km | 80.148.200,00 | 80,15 | 100,00 |
| 3.2.2 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 15,98 Km | 50.000.000,00 | 15,98 Km | 49.789.800,00 | 99,58 | 100,00 |
| 3.2.3 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.809.228,00 | 99,62 | 100,00 |
| 3.2.4 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Beutong Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 10,40 Km | 38.510.000,00 | 10,40 Km | 38.510.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.5 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 9,23 Km | 50.000.000,00 | 9,23 Km | 49.737.400,00 | 99,47 | 100,00 |
| 3.2.6 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.841.100,00 | 99,68 | 100,00 |
| 3.2.7 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 38,24 Km | 50.000.000,00 | 38,24 Km | 49.891.400,00 | 99,78 | 100,00 |
| 3.2.8 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.965.100,00 | 99,93 | 100,00 |
| 3.2.9 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 28,18 Km | 50.000.000,00 | 28,18 Km | 49.810.268,00 | 99,62 | 100,00 |
| 3.2.10 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 49.668.000,00 | | 49.668.100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.11 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 25 74 Km | 50.000.000,00 | 25 74 Km | 49.944.800,00 | 99,89 | 100,00 |
| 3.2.12 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.943.600,00 | 99,89 | 100,00 |
| 3.2.13 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Jamuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 4,60 Km | 50.000.000,00 | 4,60 Km | 49.882.000,00 | 99,76 | 100,00 |
| 3.2.14 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Krueng Nalan Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 27,76 Km | 50.000.000,00 | 27,76 Km | 49.901.000,00 | 99,80 | 100,00 |
| 3.2.15 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Krueng Nalan Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.997.400,00 | 99,99 | 100,00 |
| 3.2.16 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Krueng Pandrah Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 24,76 Km | 50.000.000,00 | 24,76 Km | 49.951.800,00 | 99,90 | 100,00 |
| 3.2.17 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Krueng Pandrah Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.952.600,00 | 99,91 | 100,00 |
| 3.2.18 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 34,16 Km | 50.000.000,00 | 34,16 Km | 49.967.100,00 | 99,93 | 100,00 |
| 3.2.19 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 49.751.000,00 | | 49.750.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.20 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 14,37 Km | 50.000.000,00 | 14,37 Km | 49.971.000,00 | 99,94 | 100,00 |
| 3.2.21 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.932.600,00 | 99,87 | 100,00 |
| 3.2.22 | Pemeliharaan Berkala Tahap 3 pada D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.932.600,00 | 99,87 | 100,00 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 3.2.23 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 7,60 Km | 50.000.000,00 | 7,60 Km | 49.818.900,00 | 99,64 | 100,00 |
| 3.2.24 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 17,56 Km | 50.000.000,00 | 17,56 Km | 49.987.100,00 | 99,97 | 100,00 |
| 3.2.25 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Mbang Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 9,89 Km | 50.000.000,00 | 9,89 Km | 49.938.600,00 | 99,88 | 100,00 |
| 3.2.26 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 35,48 Km | 50.000.000,00 | 35,48 Km | 49.966.200,00 | 99,93 | 100,00 |
| 3.2.27 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 20,82 Km | 50.000.000,00 | 20,82 Km | 49.932.600,00 | 99,87 | 100,00 |
| 3.2.28 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.931.321,00 | 99,86 | 100,00 |
| 3.2.29 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Samalanga Kab. Bireuen dan Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 38,03 Km | 50.000.000,00 | 38,03 Km | 49.950.700,00 | 99,90 | 100,00 |
| 3.2.30 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Samalanga Kab. Bireuen dan Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.807.500,00 | 99,62 | 100,00 |
| 3.2.31 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Ulee Gajah Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 13,91 Km | 50.000.000,00 | 13,91 Km | 49.866.000,00 | 99,73 | 100,00 |
| 3.2.32 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Ule Glee Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 24,69 Km | 50.000.000,00 | 24,69 Km | 49.998.200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.33 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 25,31 Km | 50.000.000,00 | 25,31 Km | 49.929.100,00 | 99,86 | 100,00 |
| 3.2.34 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 49.756.000,00 | | 49.755.700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.35 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada D.I. Weih Tillis Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 36,50 Km | 50.000.000,00 | 36,50 Km | 49.821.300,00 | 99,64 | 100,00 |
| 3.2.36 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada D.I. Weih Tillis Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 50.000.000,00 | | 49.941.100,00 | 99,88 | 100,00 |
| 3.2.37 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 15,98 Km | 42.666.600,00 | 15,98 Km | 42.175.600,00 | 98,85 | 100,00 |
| 3.2.38 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 41.930.600,00 | | 41.770.600,00 | 99,62 | 100,00 |
| 3.2.39 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 42.026.600,00 | | 42.026.600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.40 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 42.666.600,00 | | 41.214.600,00 | 96,60 | 100,00 |
| 3.2.41 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Beutong Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 10,40 Km | 23.192.000,00 | 10,40 Km | 23.192.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.42 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Beutong Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 22.719.000,00 | | 22.719.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.43 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Beutong Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 22.815.000,00 | | 22.815.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.44 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Beutong Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 22.163.000,00 | | 22.163.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.45 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 9,23 Km | 27.068.900,00 | 9,23 Km | 27.068.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.46 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 26.731.900,00 | | 26.731.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.47 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 26.827.900,00 | | 26.827.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.48 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 13.727.300,00 | | 13.727.300,00 | 100,00 | 100,00 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 3.2.49 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 35,02 Km | 101.707.400,00 | 35,02 Km | 101.707.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.50 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 101.370.400,00 | | 101.370.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.51 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 101.466.400,00 | | 101.466.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.52 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 98.647.800,00 | | 98.647.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.53 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 28,18 Km | 74.761.500,00 | 28,18 Km | 74.761.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.54 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 74.186.500,00 | | 74.186.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.55 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 74.282.500,00 | | 74.282.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.56 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 73.630.500,00 | | 73.630.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.57 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 25,74 Km | 68.725.800,00 | 25,74 Km | 68.581.400,00 | 99,79 | 100,00 |
| 3.2.58 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 68.176.400,00 | | 68.176.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.59 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 68.272.400,00 | | 68.272.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.60 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 67.620.400,00 | | 67.620.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.61 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Jamuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 13,63 Km | 12.282.000,00 | 13,63 Km | 12.037.600,00 | 98,01 | 100,00 |
| 3.2.62 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Jamuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 11.712.100,00 | | 11.712.100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.63 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Jamuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 11.808.100,00 | | 11.808.100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.64 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Jamuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 11.224.100,00 | | 11.224.100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.65 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Krueng Nalan Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 27,76 Km | 73.895.700,00 | 27,76 Km | 73.895.700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.66 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Krueng Nalan Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 73.490.700,00 | | 73.490.700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.67 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Krueng Nalan Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 73.586.700,00 | | 73.586.700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.68 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Krueng Nalan Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 68.454.200,00 | | 67.626.500,00 | 98,79 | 100,00 |
| 3.2.69 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Krueng Pandrah Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 24,76 Km | 65.750.900,00 | 24,76 Km | 65.750.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.70 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Krueng Pandrah Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 65.345.900,00 | | 65.345.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.71 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Krueng Pandrah Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 65.441.900,00 | | 65.441.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.72 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Krueng Pandrah Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 64.789.900,00 | | 64.789.900,00 | 100,00 | 100,00 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 3.2.73 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Krueng Peudada Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 13,63 Km | 35.939.800,00 | 13,63 Km | 35.939.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.74 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Krueng Peudada Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 35.466.800,00 | | 35.466.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.75 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 34,16 Km | 90.696.900,00 | 34,16 Km | 90.696.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.76 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 90.451.900,00 | | 90.451.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.77 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 90.547.900,00 | | 90.547.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.78 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 82.873.300,00 | | 82.071.100,00 | 99,03 | 100,00 |
| 3.2.79 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 6,54 Km | 16.793.800,00 | 6,54 Km | 16.793.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.80 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 16.252.800,00 | | 16.252.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.81 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 16.348.800,00 | | 16.348.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.82 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 15.764.800,00 | | 15.764.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.83 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 14,37 Km | 38.367.900,00 | 14,37 Km | 37.938.900,00 | 98,88 | 100,00 |
| 3.2.84 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 37.431.900,00 | | 37.431.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.85 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 37.527.900,00 | | 37.528.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.86 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 36.875.900,00 | | 36.875.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.87 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 7,60 Km | 16.898.600,00 | 7,60 Km | 16.898.600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.88 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 16.187.600,00 | | 16.187.600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.89 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 16.283.600,00 | | 16.283.600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.90 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 15.699.600,00 | | 15.699.600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.91 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 17,56 Km | 33.038.800,00 | 17,56 Km | 32.963.800,00 | 99,77 | 100,00 |
| 3.2.92 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 32.638.300,00 | | 32.558.800,00 | 99,76 | 100,00 |
| 3.2.93 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 33.038.800,00 | | 32.464.800,00 | 98,26 | 100,00 |
| 3.2.94 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 32.082.300,00 | | 32.002.800,00 | 99,75 | 100,00 |
| 3.2.95 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Mbang Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 9,89 Km | 26.076.800,00 | 9,89 Km | 26.076.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.96 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Mbang Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 25.671.800,00 | | 25.671.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.97 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Mbang Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 25.767.800,00 | | 25.767.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.98 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Mbang Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 10.541.900,00 | | 10.541.900,00 | 100,00 | 100,00 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 3.2.99 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 35,48 Km | 94.731.600,00 | 35,48 Km | 94.662.600,00 | 99,93 | 100,00 |
| 3.2.100 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 94.257.600,00 | | 94.257.600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.101 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 94.731.600,00 | | 94.353.600,00 | 99,60 | 100,00 |
| 3.2.102 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 23.612.500,00 | | 23.612.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.103 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 4,11 Km | 10.740.400,00 | 4,11 Km | 10.660.900,00 | 99,26 | 100,00 |
| 3.2.104 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 10.267.400,00 | | 10.187.900,00 | 99,23 | 100,00 |
| 3.2.105 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 10.973.700,00 | | 10.187.900,00 | 92,84 | 100,00 |
| 3.2.106 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 9.779.400,00 | | 9.699.900,00 | 99,19 | 100,00 |
| 3.2.107 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 20,82 Km | 55.152.300,00 | 20,82 Km | 55.152.300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.108 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 54.747.300,00 | | 54.747.300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.109 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 54.843.300,00 | | 54.843.300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.110 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 54.191.300,00 | | 54.191.300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.111 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Samalanga Kab. Bireuen dan Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 38,00 Km | 101.181.500,00 | 38,00 Km | 101.181.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.112 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Samalanga Kab. Bireuen dan Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 100.844.500,00 | | 100.844.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.113 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Samalanga Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 100.872.500,00 | | 100.810.000,00 | 99,94 | 100,00 |
| 3.2.114 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Samalanga Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 93.358.900,00 | | 93.238.900,00 | 99,87 | 100,00 |
| 3.2.115 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Tenggulon Kab. Aceh Tamiang (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 7,66 Km | 19.863.900,00 | 7,66 Km | 18.735.400,00 | 94,32 | 100,00 |
| 3.2.116 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Tenggulon Kab. Aceh Tamiang (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 170.000,00 | | 1.219.000,00 | 717,06 | 100,00 |
| 3.2.117 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Ulee Gajah Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 13,91 Km | 33.871.000,00 | 13,91 Km | 33.871.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.118 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Ulee Gajah Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 33.466.000,00 | | 33.466.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.119 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Ulee Gajah Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 33.562.000,00 | | 33.562.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.120 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Ulee Gajah Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 32.820.000,00 | | 32.820.000,00 | 100,00 | 100,00 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 3.2.121 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Ule Glee Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 24,69 Km | 64.299.700,00 | 24,69 Km | 64.299.700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.122 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Ule Glee Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 63.894.700,00 | | 63.894.700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.123 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Ule Glee Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 63.990.700,00 | | 63.990.700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.124 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Ule Glee Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 16.024.000,00 | | 16.024.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.125 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 38,11 Km | 32.796.400,00 | 38,11 Km | 32.796.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.126 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 32.459.400,00 | | 32.459.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.127 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 32.555.400,00 | | 32.555.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.128 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 30.419.000,00 | | 30.419.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.129 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I. Weih Tillis Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 36,51 Km | 31.783.500,00 | 36,51 Km | 31.783.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.130 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I. Weih Tillis Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 31.446.500,00 | | 31.446.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.131 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I. Weih Tillis Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 31.542.500,00 | | 31.542.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.132 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I. Weih Tillis Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 29.867.200,00 | | 29.867.200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3 | Belanja Perjalanan Dinas | Meningkatnya efektivitas koordinasi, monitoring dalam pelaksanaan program kegiatan | 100% | 227.018.364,00 | 100% | 227.017.840,00 | 100,00 | 100,00 |

d. Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar kondisi bendung terpelihara dengan baik sehingga bendung dapat beroperasi secara maksimal. Hasil yang didapatkan yaitu jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara. Pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 4 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 24 Unit | 981.423.200,00 | 24 Unit | 978.653.285,00 | 99,72 | 100,00 |
| 4.1 | Belanja Jasa | Meningkatnya efektivitas koordinasi, monitoring dan pelaksanaan program | 100% | 312.000.000,00 | 100% | 311.939.100,00 | 99,98 | 100,00 |
| 4.2 | Belanja Pemeliharaan | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 24 Unit | 669.423.200,00 | 24 Unit | 666.714.185,00 | 99,60 | 100,00 |
| 4.2.1 | Pemeliharaan Bendung D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 5.000.000,00 | 1 Unit | 7.036.700,00 | 140,73 | 100,00 |
| 4.2.2 | Pemeliharaan Bendung D.I. Beutong Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 5.000.000,00 | 1 Unit | 4.995.000,00 | 99,90 | 100,00 |
| 4.2.3 | Pemeliharaan Bendung D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 35.000.000,00 | 1 Unit | 34.935.400,00 | 99,82 | 100,00 |
| 4.2.4 | Pemeliharaan Bendung D.I. Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 40.000.000,00 | 1 Unit | 39.957.700,00 | 99,89 | 100,00 |
| 4.2.5 | Pemeliharaan Bendung D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 15.000.000,00 | 1 Unit | 14.914.700,00 | 99,43 | 100,00 |
| 4.2.6 | Pemeliharaan Bendung D.I. Krueng Nalan Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 15.000.000,00 | 1 Unit | 14.990.250,00 | 99,94 | 100,00 |
| 4.2.7 | Pemeliharaan Bendung D.I. Krueng Pandrah Kab. Bireuen (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 35.000.000,00 | 1 Unit | 34.982.800,00 | 99,95 | 100,00 |
| 4.2.8 | Pemeliharaan Bendung D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 15.000.000,00 | 1 Unit | 13.022.200,00 | 86,81 | 100,00 |
| 4.2.9 | Pemeliharaan Bendung D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 50.000.000,00 | 1 Unit | 49.968.835,00 | 99,94 | 100,00 |
| 4.2.10 | Pemeliharaan Bendung D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 23.000.000,00 | 1 Unit | 22.933.500,00 | 99,71 | 100,00 |
| 4.2.11 | Pemeliharaan Bendung D.I. Mbang Kab. Aceh Utara (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 15.000.000,00 | 1 Unit | 13.438.800,00 | 89,59 | 100,00 |
| 4.2.12 | Pemeliharaan Bendung D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 40.000.000,00 | 1 Unit | 39.907.500,00 | 99,77 | 100,00 |
| 4.2.13 | Pemeliharaan Bendung D.I. Samalanga Kab. Bireuen dan Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 6.670.000,00 | 1 Unit | 6.660.000,00 | 99,85 | 100,00 |
| 4.2.14 | Pemeliharaan Bendung D.I. Ulee Gajah Kab. Aceh Timur (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 15.000.000,00 | 1 Unit | 14.988.000,00 | 99,92 | 100,00 |
| 4.2.15 | Pemeliharaan Bendung D.I. Ule Glee Kab. Pidie Jaya (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 35.000.000,00 | 1 Unit | 34.987.200,00 | 99,96 | 100,00 |
| 4.2.16 | Pemeliharaan Bendung D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 35.000.000,00 | 1 Unit | 34.995.600,00 | 99,99 | 100,00 |
| 4.2.17 | Pemeliharaan Bendung D.I. Weih Tillis Kab. Gayo Lues (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 35.000.000,00 | 1 Unit | 34.990.600,00 | 99,97 | 100,00 |
| 4.2.18 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada Bendung D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 25.000.000,00 | 1 Unit | 24.995.000,00 | 99,98 | 100,00 |
| 4.2.19 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada Bendung D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | | 25.000.000,00 | | 24.995.000,00 | 99,98 | 100,00 |
| 4.2.20 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada Bendung D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 25.000.000,00 | 1 Unit | 24.995.000,00 | 99,98 | 100,00 |
| 4.2.21 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada Bendung D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | | 25.000.000,00 | | 24.995.000,00 | 99,98 | 100,00 |
| 4.2.22 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada Bendung D.I. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 25.000.000,00 | 1 Unit | 24.997.000,00 | 99,99 | 100,00 |
| 4.2.23 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada Bendung D.I. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | | 25.000.000,00 | | 24.997.000,00 | 99,99 | 100,00 |
| 4.2.24 | Pemeliharaan Berkala Tahap 1 pada Bendung D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 25.000.000,00 | 1 Unit | 24.995.000,00 | 99,98 | 100,00 |
| 4.2.25 | Pemeliharaan Berkala Tahap 2 pada Bendung D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | | 25.000.000,00 | | 24.995.000,00 | 99,98 | 100,00 |
| 4.2.26 | Pemeliharaan Rutin Bendung D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 5.000.000,00 | 1 Unit | 4.996.600,00 | 99,93 | 100,00 |
| 4.2.27 | Pemeliharaan Rutin Bendung D.I. Jambo Dalem Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 3.000.000,00 | 1 Unit | 2.998.200,00 | 99,94 | 100,00 |
| 4.2.28 | Pemeliharaan Rutin Bendung D.I. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 5.000.000,00 | 1 Unit | 4.902.100,00 | 98,04 | 100,00 |
| 4.2.29 | Pemeliharaan Rutin Bendung D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 5.000.000,00 | 1 Unit | 4.999.200,00 | 99,98 | 100,00 |
| 4.2.30 | Pemeliharaan Rutin Bendung D.I.R. Keutengga Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 8.001.700,00 | 1 Unit | 7.416.600,00 | 92,69 | 100,00 |
| 4.2.31 | Pemeliharaan Rutin Bendung D.I. Tenggulon Kab. Aceh Tamiang (Swakelola) | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 3.751.500,00 | 1 Unit | 3.745.500,00 | 99,84 | 100,00 |
| 4.2.32 | Pemeliharaan Rutin Bendung D.I. Alue Geureutut Kab. Aceh Utara | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 1 Unit | 20.000.000,00 | 1 Unit | 19.987.200,00 | 99,94 | 100,00 |

e. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa. Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu untuk mempertahankan kinerja jaringan irigasi rawa dalam kondisi optimum. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara. Pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 5 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 41,79 Km | 948.200.000,00 | 41,79 Km | 947.592.612,00 | 99,94 | 100,00 |
| 5.1 | Belanja Jasa | Meningkatnya efektivitas koordinasi, monitoring dan pelaksanaan program | 100% | 220.200.000,00 | 100% | 220.200.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2 | Belanja Pemeliharaan | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 41,79 Km | 728.000.000,00 | 41,79 Km | 727.392.612,00 | 99,92 | 100,00 |
| 5.2.1 | Pemeliharaan Berkala Ruas 1 pada D.I.R. Keutengga Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa (Swakelola P3A) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 0,84 Km | 20.000.000,00 | 0,84 Km | 19.908.000,00 | 99,54 | 100,00 |
| 5.2.2 | Pemeliharaan Berkala Ruas 2 pada D.I.R. Keutengga (Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa) (Swakelola P3A) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 0,47 Km | 20.000.000,00 | 0,47 Km | 19.991.000,00 | 99,96 | 100,00 |
| 5.2.3 | Pemeliharaan Berkala Ruas 3 pada D.I.R. Keutengga (Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa) (Swakelola P3A) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 1,22 Km | 20.000.000,00 | 1,22 Km | 19.970.800,00 | 99,85 | 100,00 |
| 5.2.4 | Pemeliharaan Berkala Ruas 4 pada D.I.R. Keutengga (Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa) (Swakelola P3A)) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 0,86 Km | 20.000.000,00 | 0,86 Km | 19.911.900,00 | 99,56 | 100,00 |
| 5.2.5 | Pemeliharaan Berkala Ruas 5 pada D.I.R. Keutengga (Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa (Swakelola P3A) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 0,01 Km | 20.000.000,00 | 0,01 Km | 19.908.000,00 | 99,54 | 100,00 |
| 5.2.6 | Pemeliharaan Berkala Ruas 6 pada D.I.R. Keutengga (Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa) (Swakelola P3A) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 0,01 Km | 20.000.000,00 | 0,01 Km | 19.926.800,00 | 99,63 | 100,00 |
| 5.2.7 | Pemeliharaan Berkala Ruas 7 pada D.I.R. Keutengga (Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa) (Swakelola) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 0,01 Km | 50.000.000,00 | 0,01 Km | 49.999.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.8 | Pemeliharaan Berkala Ruas 8 pada D.I.R. Keutengga (Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa) (Swakelola) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 0,01 Km | 118.000.000,00 | 0,01 Km | 117.987.000,00 | 99,99 | 100,00 |
| 5.2.9 | Pemeliharaan Rutin Tahap 1 pada D.I.R. Keutengga (Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa) (Swakelola) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 41,79 Km | 110.000.000,00 | 41,79 Km | 109.947.328,00 | 99,95 | 100,00 |
| 5.2.10 | Pemeliharaan Rutin Tahap 2 pada D.I.R. Keutengga (Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa) (Swakelola) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 41,79 Km | 110.000.000,00 | 41,79 Km | 109.947.328,00 | 99,95 | 100,00 |
| 5.2.11 | Pemeliharaan Rutin Tahap 3 pada D.I.R. Keutengga (Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa) (Swakelola) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 41,79 Km | 110.000.000,00 | 41,79 Km | 109.947.328,00 | 99,95 | 100,00 |
| 5.2.12 | Pemeliharaan Rutin Tahap 4 pada D.I.R. Keutengga (Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Timur dan Kota Langsa) (Swakelola) | Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara | 41,79 Km | 110.000.000,00 | 41,79 Km | 109.947.328,00 | 99,95 | 100,00 |

f. Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa. Tujuan dari pelaksaaan kegiatan yaitu untuk menyusun dokumen perencanaan konstruksi irigasi dan rawa. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun. Pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 6 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun | 3 Dokumen | 839.740.870,00 | 3 Dokumen | 839.111.000,00 | 99,92 | 100,00 |
| 6.1 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun | 3 Dokumen | 814.740.870,00 | 3 Dokumen | 814.731.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.1.1 | DED Rehabilitasi Free Intake dan Jaringan Irigasi D.I. Lambeusoi Kab. Aceh Jaya | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun | 1 Dokumen | 99.884.460,00 | 1 Dokumen | 99.884.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.1.2 | Penyusunan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) (SWAK) | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun | 1 Dokumen | 614.976.390,00 | 1 Dokumen | 614.967.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.1.3 | Reviu Desain Bendung dan Jaringan Suplesi Sub D.I. Aneuk Gajah Rheut D.I. Krueng Peudada Kab. Bireuen | Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun | 1 Dokumen | 99.880.020,00 | 1 Dokumen | 99.880.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.2 | Belanja Perjalanan Dinas | Meningkatnya efektivitas koordinasi, monitoring dalam pelaksanaan program kegiatan | 100% | 25.000.000,00 | 100% | 24.380.000,00 | 97,52 | 100,00 |

g. Operasional kelembagaan pengelola irigasi.

UPTD Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pengairan Aceh mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut UPTD Pengelolaan Irigasi memerlukan operasional unit pengelola irigasi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu terkelolanya 5 (lima) unit pengelola irigasi pada Dinas Pengairan.

h. Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi. Alokasi air merupakan rangkaian tindakan yang diperlukan untuk mengatur jatah/ kuota air yang sesuai dengan jenis penggunaan air. Tujuan utama pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi adalah memberikan pelayanan agar air tidak menjadi terlalu sedikit, terlalu banyak dan terlalu kotor. Penghematan, perlindungan dan pemenuhan air tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi harus

mampu menjamin kesinambungan pelayanan di masa depan karena hal ini secara langsung menyangkut eksistensi manusia. Rencana alokasi sumber daya air disusun berdasarkan urutan prioritas alokasi sumber daya air serta disusun pada setiap wilayah sungai. Kegiatan ini terdiri atas Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) dan Rencana Alokasi Air Rinci (RAAR). Rencana Alokasi Air Tahunan disusun berdasarkan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan. Sementara Rencana Alokasi Air Rinci merupakan rencana operasional dari rencana alokasi air tahunan pada setiap sumber air yang menggambarkan besaran volume, lokasi, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dalam periode yang ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat. Pekerjaan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah :

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | ALOKASI | | REALISASI | | PERSENTASE REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | FISIK | ANGGARAN REALISASI LRA/ EVIDENCE (Rp.) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 8 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | 4 Dokumen | 399.270.486,00 | 4 Dokumen | 399.269.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.1 | Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) WS. Baru-Kluet | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | 1 Dokumen | 99.875.980,00 | 1 Dokumen | 99.875.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.2 | Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) WS. Pase - Peusangan | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | 1 Dokumen | 99.800.100,00 | 1 Dokumen | 99.800.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.3 | Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) WS. Tamiang-Langsa | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | 1 Dokumen | 99.847.031,00 | 1 Dokumen | 99.847.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.4 | Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) WS. Teunom-Lambesoi | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | 1 Dokumen | 99.747.375,00 | 1 Dokumen | 99.747.000,00 | 100,00 | 100,00 |

## 3.4. Pagu Anggaran Dinas Pengairan Tahun 2025

Pada awal Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran Dinas Pengairan Aceh yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan sebesar Rp. 113.682.179.095,- (Seratus Tiga Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah). Dalam perjalanannya, seiring dengan dilakukannya penyesuaian terhadap kebijakan dan penyesuaian kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tanggal 26 September 2025 dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 110.009.915.055,- (Seratus Sepuluh Miliar Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Puluh Lima Rupiah). Pada tanggal 5 November 2025, adanya

penyesuaian lanjutan terhadap prioritas dan kondisi pelaksanaan kegiatan maka anggaran kembali mengalami perubahan menjadi Rp. 110.209.915.055,- (Seratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Puluh Lima Rupiah). Pada tahap akhir tahun anggaran, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2025 dilakukan pergeseran anggaran kedua sehingga pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 108.199.484.251,- (Seratus Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). Perubahan/pergeseran pagu anggaran tersebut dilaksanakan secara terencana dan terukur dengan tetap berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

Tabel 3.11 berikut menjelaskan perjalanan anggaran tahun 2025 beserta komposisinya, postur pagu awal, pagu perubahan/pergeseran serta pagu anggaran per jenis belanja pada Dinas Pengairan Aceh tahun anggaran 2025.

**Tabel 3.11 Komposisi Pagu Anggaran Dinas Pengairan Tahun 2025**

| NO. | JENIS BELANJA | DPA MURNI (Rp.) | DPA PERGESERAN (Rp.) | DPA PERUBAHAN (Rp.) | DPA PERGESERAN II (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BELANJA DAERAH** | **113.682.179.095,00** | **110.009.915.055,00** | **110.209.915.055,00** | **108.199.484.251,00** |
| **I** | **BELANJA OPERASI** | **71.505.232.446,00** | **70.734.462.540,00** | **70.934.462.540,00** | **69.066.901.736,00** |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 35.182.333.990,00 | 36.901.107.515,00 | 36.901.107.515,00 | 36.632.425.595,00 |
| 1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.322.898.456,00 | 33.833.355.025,00 | 34.033.355.025,00 | 32.434.476.141,00 |
| **II.** | **BELANJA MODAL** | **42.176.946.649,00** | **39.275.452.515,00** | **39.275.452.515,00** | **39.132.582.515,00** |
| 2.1 | Belanja Modal Tanah | 859.662.646,00 | 859.662.646,00 | 859.662.646,00 | 859.662.646,00 |
| 2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 933.898.053,00 | 916.023.209,00 | 916.023.209,00 | 916.023.209,00 |
| 2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 40.183.385.950,00 | 37.299.766.660,00 | 37.299.766.660,00 | 37.156.896.660,00 |

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA. 2025, 2025*




**Gambar 3.2 Postur Pagu Anggaran Dinas Pengairan Tahun 2025**

### 3.5. Realisasi Keuangan

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2025, Dinas Pengairan Aceh menggunakan beberapa indikator masukan yaitu sumber daya manusia, dana, peralatan dan pedoman kerja. Tingkat pencapaian target indikator kinerja input berupa dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan dana APBA yang dapat direalisasi sebesar Rp. 107.345.779.164,- (Seratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau 99,21% dari total pagu anggaran setelah pergeseran II sebesar Rp. 108.199.484.251,- (Seratus Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) sehingga terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 853.705.087,-

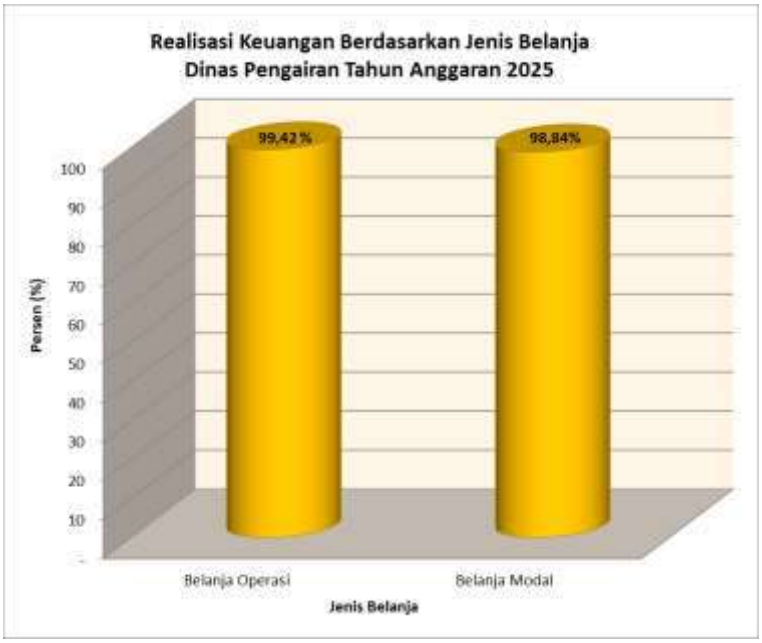
(Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Dalam melaksanakan kegiatan, Dinas Pengairan Aceh mengalokasikan dana yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Rincian realisasi keuangan berdasarkan jenis belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut :

**Tabel 3.12 Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja**

| NO. | JENIS BELANJA | DPA PERGESERAN II (Rp.) | REALISASI KEUANGAN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Rp.) | (%) |
| | **BELANJA DAERAH** | **108.199.484.251,00** | **107.345.779.164,00** | **99,21** |
| **I** | **BELANJA OPERASI** | **69.066.901.736,00** | **68.668.256.684,00** | **99,42** |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 36.632.425.595,00 | 36.443.650.908,00 | 99,48 |
| 1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.434.476.141,00 | 32.224.605.776,00 | 99,35 |
| **II.** | **BELANJA MODAL** | **39.132.582.515,00** | **38.677.522.480,00** | **98,84** |
| 2.1 | Belanja Modal Tanah | 859.662.646,00 | 819.685.816,00 | 95,35 |
| 2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 916.023.209,00 | 906.268.036,00 | 98,94 |
| 2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 200.000.000,00 | 199.399.678,00 | 99,70 |
| 2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 37.156.896.660,00 | 36.752.168.950,00 | 98,91 |

*Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pengairan Aceh, 31 Desember 2025*




**Gambar 3.3 Persentase Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja**

Penetapan Anggaran Dinas Pengairan dalam 5 (lima) tahun terakhir serta realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini :

**Tabel 3.13 Penetapan Anggaran Dinas Pengairan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir serta Realisasi Anggaran**

| TAHUN | PAGU AKHIR (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 405.065.627.819 | 274.481.007.419 | 67,76 |
| 2022 | 360.530.165.158 | 352.487.116.847 | 97,77 |
| 2023 | 347.197.104.138 | 343.332.224.517 | 98,89 |
| 2024 | 174.602.584.785 | 167.548.071.978 | 95,96 |
| 2025 | 108.199.484.251 | 107.345.779.164 | 99,21 |

*Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pengairan Aceh, 31 Desember 2025*




**Gambar 3.4 Persentase Penyerapan Anggaran Dinas Pengairan serta Realisasi 5 Tahun Terakhir**

Kegiatan pembangunan dibidang sumber daya air yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan, rincian persentase pencapaian penggunaan dana berdasarkan pada pembagian program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut :

## Tabel 3.14 Realisasi Keuangan Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2025

| NO | KODE REK. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI KEUANGAN | | SISA ANGGARAN | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rp. | % | Rp. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 5. | BELANJA DAERAH | 108.199.484.251 | 107.345.779.164 | 99,21 | 853.705.087 | 0,79 | |
| | 5.1. | BELANJA OPERASI | 69.066.901.736 | 68.668.256.684 | 99,42 | 398.645.052 | 0,58 | |
| | 5.2. | BELANJA MODAL | 39.132.582.515 | 38.677.522.480 | 98,84 | 455.060.035 | 1,16 | |
| A. | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 46.304.024.239,00 | 46.068.825.070 | 99,49 | 235.199.169 | 0,51 | |
| I. | 1.03.01.1.01 | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 233.380.199 | 233.237.750 | 99,94 | 142.449 | 0,06 | |
| 1. | 1.03.01.1.01.01 | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | 233.380.199 | 233.237.750 | 99,94 | 142.449 | 0,06 | |
| II. | 1.03.01.1.02 | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 38.628.083.595 | 38.436.690.908 | 99,50 | 191.392.687 | 0,50 | |
| 1. | 1.03.01.1.02.01 | PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN | 36.921.365.595 | 36.732.590.908 | 99,49 | 188.774.687 | 0,51 | |
| 2. | 1.03.01.1.02.02 | PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN | 1.706.718.000 | 1.704.100.000 | 99,85 | 2.618.000 | 0,15 | |
| III. | 1.03.01.1.03 | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | 51.505.021 | 51.394.300 | 99,79 | 110.721 | 0,21 | |
| 1. | 1.03.01.1.03.06 | PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD | 51.505.021 | 51.394.300 | 99,79 | 110.721 | 0,21 | |
| IV. | 1.03.01.1.05 | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | 438.294.111 | 437.267.200 | 99,77 | 1.026.911 | 0,23 | |
| 1. | 1.03.01.1.05.02 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA | 303.690.000 | 303.690.000 | 100,00 | - | - | |
| 2. | 1.03.01.1.05.09 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 21.360.000 | 21.360.000 | 100,00 | - | - | |
| 3. | 1.03.01.1.05.11 | BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 113.244.111 | 112.217.200 | 99,09 | 1.026.911 | 0,91 | |
| V. | 1.03.01.1.06 | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 1.400.574.956 | 1.382.789.893 | 98,73 | 17.785.063 | 1,27 | |
| 1. | 1.03.01.1.06.01 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 22.225.000 | 22.219.980 | 99,98 | 5.020 | 0,02 | |
| 2. | 1.03.01.1.06.02 | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 379.163.269 | 369.805.340 | 97,53 | 9.357.929 | 2,47 | |
| 3. | 1.03.01.1.06.04 | PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR | 190.434.230 | 188.008.122 | 98,73 | 2.426.108 | 1,27 | |
| 4. | 1.03.01.1.06.05 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 51.825.230 | 51.688.983 | 99,74 | 136.247 | 0,26 | |
| 5. | 1.03.01.1.06.06 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 11.998.000 | 8.068.800 | 67,25 | 3.929.200 | 32,75 | |
| 6. | 1.03.01.1.06.09 | PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD | 744.929.227 | 742.998.668 | 99,74 | 1.930.559 | 0,26 | |
| VI. | 1.03.01.1.08 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 3.850.800.311 | 3.836.541.001 | 99,63 | 14.259.310 | 0,37 | |
| 1. | 1.03.01.1.08.01 | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 1.014.000 | - | - | 1.014.000 | 100,00 | |
| 2. | 1.03.01.1.08.02 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 741.019.519 | 740.942.760 | 99,99 | 76.759 | 0,01 | |
| 3. | 1.03.01.1.08.03 | PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 182.188.492 | 181.574.910 | 99,66 | 613.582 | 0,34 | |
| 4. | 1.03.01.1.08.04 | PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | 2.926.578.300 | 2.914.023.331 | 99,57 | 12.554.969 | 0,43 | |
| VII. | 1.03.01.1.09 | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1.701.386.046 | 1.690.904.018 | 99,38 | 10.482.028 | 0,62 | |
| 1. | 1.03.01.1.09.01 | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | 433.268.000 | 432.537.770 | 99,83 | 730.230 | 0,17 | |
| 2. | 1.03.01.1.09.02 | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN | 942.368.046 | 934.083.570 | 99,12 | 8.284.476 | 0,88 | |
| 3. | 1.03.01.1.09.09 | PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA | 325.750.000 | 324.282.678 | 99,55 | 1.467.322 | 0,45 | |
| B. | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 61.895.460.012 | 61.276.954.094 | 99,00 | 618.505.918 | 1,00 | |
| I. | 1.03.02.1.01 | PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA | 47.210.212.088 | 47.054.500.672 | 99,67 | 155.711.416,00 | 0,33 | |
| 1. | 1.03.02.1.01.09 | PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI | 4.405.765.951 | 4.405.756.450 | 100,00 | 9.501,00 | 0,00 | |
| 2. | 1.03.02.1.01.75 | KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KEWENANGAN PROVINSI | 1.169.796.775 | 1.096.374.650 | 93,72 | 73.422.125,00 | 6,28 | |
| 3. | 1.03.02.1.01.79 | NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI | 9.781.370.671 | 9.781.220.652 | 100,00 | 150.019,00 | 0,00 | |
| 4. | 1.03.02.1.01.87 | EVALUASI DAN REKOMENDASI TEKNIS (REKOMTEK) PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI | 94.963.268 | 94.815.022 | 99,84 | 148.246,00 | 0,16 | |
| 5. | 1.03.02.1.01.103 | PENGELOLAAN HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI | 1.099.928.244 | 1.097.521.116 | 99,78 | 2.407.128,00 | 0,22 | |
| 6. | 1.03.02.1.01.105 | OPERASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR | 89.800.000 | 88.208.000 | 98,23 | 1.592.000,00 | 1,77 | |
| 7. | 1.03.02.1.01.118 | PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING | 29.565.382.717 | 29.488.291.600 | 99,74 | 77.091.117,00 | 0,26 | |
| 8. | 1.03.02.1.01.122 | PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI | 646.074.462 | 645.183.182 | 99,86 | 891.280,00 | 0,14 | |
| 9. | 1.03.02.1.01.123 | PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU | 357.130.000 | 357.130.000 | 100,00 | - | - | |
| II. | 1.03.02.1.02 | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA-3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.685.247.924 | 14.222.453.422 | 96,85 | 462.794.502,00 | 3,15 | |
| 1. | 1.03.02.1.02.02 | PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN | 2.576.843.364 | 2.313.786.780 | 89,79 | 263.056.584,00 | 10,21 | |
| 2. | 1.03.02.1.02.0009 | PENINGKATAN BENDUNG IRIGASI | 1.113.276.152 | 948.031.438 | 85,16 | 165.244.714,00 | 14,84 | |
| 3. | 1.03.02.1.02.21 | OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN | 7.722.584.872 | 7.692.747.157 | 99,61 | 29.837.715,00 | 0,39 | |
| 4. | 1.03.02.1.02.22 | OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI | 981.423.200 | 978.653.285 | 99,72 | 2.769.915,00 | 0,28 | |
| 5. | 1.03.02.1.02.23 | OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA | 948.200.000 | 947.592.612 | 99,94 | 607.388,00 | 0,06 | |
| 6. | 1.03.02.1.02.32 | PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA | 839.740.870 | 839.111.000 | 99,92 | 629.870,00 | 0,08 | |
| 7. | 1.03.02.1.02.34 | OPERASIONAL KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI | 103.908.980 | 103.262.150 | 99,38 | 646.830,00 | 0,62 | |
| 8. | 1.03.02.1.02.37 | PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI AIR DI DAERAH IRIGASI | 399.270.486 | 399.269.000 | 100,00 | 1.486,00 | 0,00 | |
| JUMLAH TOTAL | | | 108.199.484.251 | 107.345.779.164 | 99,21 | 853.705.087 | 0,79 | |

*Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pengairan Aceh, 31 Desember 2025*

Realisasi keuangan Dinas Pengairan pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 107.345.779.164,- (seratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah) dari pagu sebesar Rp. 108.199.484.251,- (seratus delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 853.705.087,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2025 mencapai 99,21% dan realisasi fisik mencapai 95,07%. Realisasi fisik yang tidak mencapai 100% disebabkan tidak terlaksananya kegiatan penyediaan surat menyurat karena proses surat menyurat dilakukan melalui pengiriman langsung dan media elektronik seperti whatsapp (WA), email serta terdapat 2 (dua) pekerjaan yang mengalami rescoping karena bencana alam hidrometeorologi, 1 (satu) pekerjaan mengalami abrasi/longsoran pada titik pekerjaan dan 1 (satu) pekerjaan terjadi pergeseran titik lokasi pekerjaan, yang penyesuaian ruang lingkup pekerjaan tersebut tanpa pembatalan kontrak.

## 3.6. Perbandingan Kinerja dengan Instansi Lain yang sejenis

Dalam rangka mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Pengairan Aceh melaksanakan kegiatan benchmark antar unit kerja, khususnya antara Dinas Pengairan Aceh dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pembantuan (SKPD TP-OP) Dinas Pengairan Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, keselarasan indikator kinerja, serta optimalisasi tata kelola pengelolaan sumber daya air. Hasil benchmark menunjukkan bahwa koordinasi yang lebih terstruktur antara Dinas Pengairan Aceh dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pembantuan (SKPD TP-OP) Dinas Pengairan Aceh berkontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian indikator kinerja, khususnya pada aspek pemeliharaan jaringan irigasi, tingkat fungsional infrastruktur pengairan.

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pengairan Aceh untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berhasil mengelola luas layanan irigasi seluas 38.462 ha dengan panjang jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara sepanjang 473,95 km, mencakup 25 Daerah Irigasi di 10 Kabupaten dalam Provinsi Aceh. Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.722.584.872,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.692.747.157,- (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau 99,61%.

Tahun anggaran 2025, SKPD TP-OP Dinas Pengairan Aceh berhasil mengelola luas layanan irigasi seluas 39.585 ha dengan panjang jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara sepanjang 615,83 km, mencakup 8 Daerah Irigasi di 6 Kabupaten dalam Provinsi Aceh. Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.695.307.000,- (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.205.399.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau 96,42%.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa SKPD TP-OP Dinas Pengairan Aceh mengelola jaringan irigasi dengan cakupan layanan dan panjang jaringan irigasi yang lebih besar dibandingkan dengan Dinas Pengairan Aceh. Hal ini karena SKPD TP-OP Dinas Pengairan Aceh merupakan kewenangan pusat dengan luas layanan lebih besar 3.000 Ha.

### 3.7. Dampak Infrastruktur SDA Pasca Bencana hidrometeorologi

Pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2025, sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam Wilayah Sungai, khususnya DAS yang berada di pesisir timur Aceh, mengalami kerusakan yang cukup berat akibat peningkatan debit sungai secara ekstrem. Sungai-sungai utama seperti Krueng Meureudu, Krueng Peusangan, Krueng Jambo Aye, dan Krueng Tamiang

mengalami sedimentasi signifikan berupa endapan lumpur, pasir, serta material kayu yang menutupi badan sungai dan menghambat aliran air.

Selain itu, pada beberapa lokasi terjadi jebolnya tanggul sungai yang mengakibatkan material lumpur meluap dan menutupi kawasan permukiman serta lahan pertanian masyarakat. Peristiwa ini juga memicu perubahan morfologi sungai, termasuk pergeseran alur secara signifikan, serta menyebabkan kerusakan menyeluruh terhadap bangunan pengaman sungai dan sistem konstruksi yang sedang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Seluruh konstruksi yang telah terbangun pada lokasi terdampak mengalami kerusakan berat hingga kerusakan total. Kerusakan pada sungai-sungai tersebut memerlukan penanganan segera dan komprehensif guna memulihkan fungsi alur sungai serta mencegah terjadinya banjir berulang di masa mendatang.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan pasca bencana banjir bandang, diketahui bahwa pekerjaan konstruksi tidak dapat dilanjutkan sesuai metode pelaksanaan awal. Oleh karena itu, terhadap paket pekerjaan yang terdampak dilakukan langkah rescouping atau penghentian kontrak, disertai evaluasi teknis dan perencanaan ulang sesuai dengan kondisi lapangan terkini.

Beberapa pekerjaan ditahun 2025 yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yaitu :

1. Pembangunan Unit Air Baku Ds. Balee Nosar Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah (Swakelola) di wilayah Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, menyebabkan kerusakan menyeluruh terhadap bangunan dan sistem konstruksi PLTMH/Air Baku Nosar yang sedang dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Pekerjaan yang dilaksanakan berupa pemasangan pipa sepanjang 168 m, karena terjadinya bencana hidrometeorologi terjadinya rescouping anggaran, maka pembangunan dihentikan.



2. Pembangunan Tanggul Sungai

   Pembangunan tanggul dan pengaman tebing Sungai Krueng Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang ini telah selesai dibangun, akibat bencana hidrometeorologi terjadi maka menjadi dampak terhadap masyarakat jika air meluap.



3. Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

   Ada beberapa Daerah Irigasi yang mengalami kerusakan berat akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, yaitu :

- D.I. Buloh Blang Ara - (Sal. Primer BBBA0 -BBBAki1) Kabupaten Aceh Utara




- D.I. Jamuan – Bendung, Tanggul dan Saluran Pembawa Kabupaten Aceh Utara




- D.I. Mbang - Bendung dan Sal. Primer Kabupaten Aceh Utara




- D.I. Meureudu Bendung dan Saluran Pembawa Kabupaten Pidie Jaya




- D.I. Ule Glee Saluran Pembawa Kabupaten Pidie Jaya




- D.I. Nalan Saluran Pembawa Kabupaten Bireuen



- D.I. Pandrah Saluran Pembawa Kabupaten Bireuen




- D.I. Samalanga Trashrack Bendung dan Saluran Irigasi Kabupaten Bireuen




### 3.8. Prestasi/Penghargaan yang diperoleh pada Tahun 2025

Beberapa prestasi/penghargaan yang diperoleh Dinas Pengairan Aceh pada tahun anggaran 2025 yaitu :

**Tabel 3.15 Prestasi/Penghargaan yang diperoleh Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025**

| No | Prestasi/Penghargaan yang diperoleh | Pemberi Penghargaan | Dokumentasi |
|---|---|---|---|
| 1. | Piagam Penghargaan PROAKSI Awards 2025 Nomor: PA-572/KPN.0101/2025 Satker Capaian IKPA Terbaik Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai : "**100 – Sangat Baik**" | Kepala KPPN Banda Aceh pada tanggal 27 Oktober 2025 |  |
| 2. | Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh Kualifikasi "**Informatif**" | Komisi Informasi Aceh pada tanggal 30 Oktober 2025 |  |
| 3. | Piagam Penghargaan Nomor: 208/PENG/2025 dengan kualifikasi "**Sangat baik**" diberikan dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh | Sekretaris Daerah Aceh Tanggal 14 November 2025 |  |

| No | Prestasi/Penghargaan yang diperoleh | Pemberi Penghargaan | Dokumentasi |
|---|---|---|---|
| 4. | Terbentuknya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.4/1291/2025 tentang Penetapan Rencana Alokasi Air Tahunan Wilayah Sungai Pase – Peusangan Tahun 2025/2026 | Gubernur Aceh Tanggal 22 Oktober 2025 |  GUBERNUR ACEH KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 600.1.4 /1291/ / 2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN WILAYAH SUNGAI PASE-PEUSANGAN TAHUN 2025/2026 GUBERNUR ACEH, |
| 5. | Terbentuknya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.4/1427/2025 tentang Penetapan Rencana Alokasi Air Tahunan Wilayah Sungai Baru - Kluet Tahun 2025/2026 | Gubernur Aceh Tanggal 20 Oktober 2025 |  GUBERNUR ACEH KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 600.1.4 / 1427/ 2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN WILAYAH SUNGAI BARU-KLUET TAHUN 2025/2026 GUBERNUR ACEH, |
| 6. | Terbentuknya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.4/1334/2025 tentang Penetapan Rencana Alokasi Air Tahunan Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi Tahun 2025/2026 | Gubernur Aceh Tanggal 30 Oktober 2025 |  GUBERNUR ACEH KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 600 / 1334 / 2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN WILAYAH SUNGAI TEUNOM-LAMBESOI TAHUN 2025/2026 GUBERNUR ACEH, |

# BAB IV
# PENUTUP

## LAPORAN KINERJA
## DINAS PENGAIRAN ACEH
## TAHUN 2025

# BAB IV
# PENUTUP

## 4.1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Pengairan Aceh adalah wujud pertanggungjawaban Dinas Pengairan Aceh kepada Pemerintah Aceh dan masyarakat sebagai pemanfaat sarana dan prasarana yang dibangun. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan dan pengelolaan bidang sumber daya air tahun 2025 khususnya pada sasaran strategis meningkatnya infrastruktur SDA dalam kondisi baik dengan 3 (tiga) indikator kinerja Dinas Pengairan Aceh tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada dilingkup Dinas Pengairan Aceh, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian ketiga sasaran strategis dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajeman pelaksanaan tugas Dinas Pengairan Aceh.

Selain itu fungsi pengawasan dan pengendalian internal juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan dan akuntabel. Disamping dukungan yang berasal dari internal Dinas Pengairan Aceh, kinerja pembangunan bidang sumber daya air tahun 2025 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh *stakeholders* pembangunan bidang pengairan, baik di Provinsi maupun di Daerah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa suksesnya pembangunan bidang pengairan tahun 2025 terletak pada komitmen dan kerja keras bersama sesuai dengan Visi Aceh dalam pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026 yaitu

**“ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”**

Pengukuran capaian sasaran strategis Dinas Pengairan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan target yang harus dicapai pada tahun 2025.

Capaian sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pengairan Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

| Sasaran Strategis : Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Persentase Capaian** | **Persentase terhadap target akhir RPA 2026** |
| **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | | | | |
| Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % | 56,54 % | 97,25% | 60,11% |
| **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** | | | | |
| Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % | 72,98 % | 97,15% | 77,67% |
| Persentase Luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama | 41,16 % | 40,11 % | 97,45% | 42,56% |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | **97,28%** | **60,11%** |

*Sumber : Dinas Pengairan, 2025*

## 4.2. Realisasi Keuangan

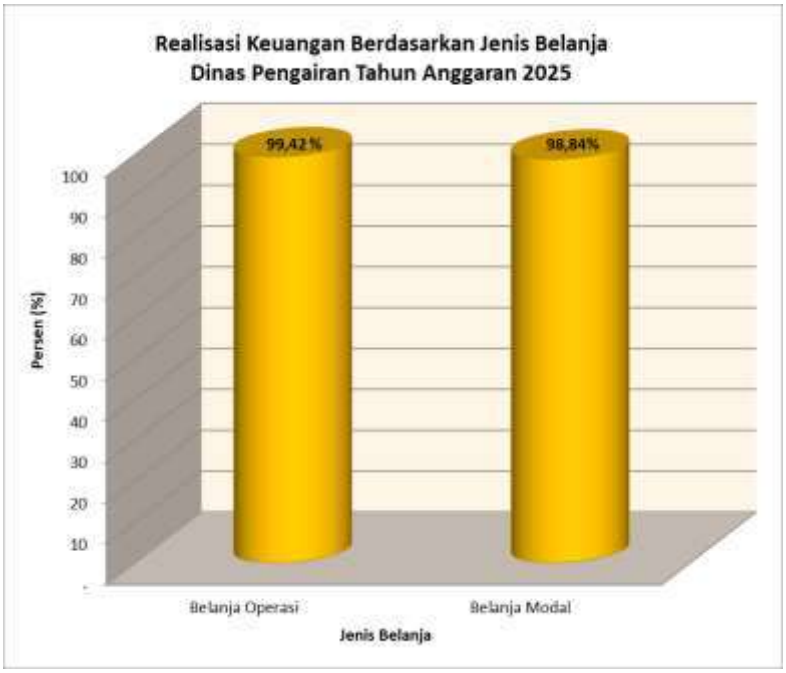
Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2025, Dinas Pengairan Aceh menggunakan beberapa indikator masukan yaitu sumber daya manusia, dana, peralatan dan pedoman kerja. Tingkat pencapaian target indikator kinerja input berupa dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan dana APBA yang dapat direalisasi sebesar Rp. 107.345.779.164,- (Seratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau 99,21% dari total pagu anggaran setelah pergeseran II sebesar Rp. 108.199.484.251,- (Seratus Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) sehingga terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 853.705.087,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Dalam melaksanakan kegiatan, Dinas Pengairan Aceh mengalokasikan dana yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Rincian realisasi keuangan berdasarkan jenis belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4.2 Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja**

| NO. | JENIS BELANJA | DPA PERGESERAN II (Rp.) | REALISASI KEUANGAN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Rp.) | (%) |
| | **BELANJA DAERAH** | **108.199.484.251,00** | **107.345.779.164,00** | **99,21** |
| **I** | **BELANJA OPERASI** | **69.066.901.736,00** | **68.668.256.684,00** | **99,42** |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 36.632.425.595,00 | 36.443.650.908,00 | 99,48 |
| 1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.434.476.141,00 | 32.224.605.776,00 | 99,35 |
| **II.** | **BELANJA MODAL** | **39.132.582.515,00** | **38.677.522.480,00** | **98,84** |
| 2.1 | Belanja Modal Tanah | 859.662.646,00 | 819.685.816,00 | 95,35 |
| 2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 916.023.209,00 | 906.268.036,00 | 98,94 |
| 2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 200.000.000,00 | 199.399.678,00 | 99,70 |
| 2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 37.156.896.660,00 | 36.752.168.950,00 | 98,91 |

*Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pengairan Aceh, 31 Desember 2025*




**Gambar 4.1 Persentase Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja**

Penetapan Anggaran Dinas Pengairan dalam 5 (lima) tahun terakhir serta realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3 Penetapan Anggaran Dinas Pengairan Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir Serta Realisasi Anggaran**

| TAHUN | PAGU AKHIR (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 405.065.627.819 | 274.481.007.419 | 67,76 |
| 2022 | 360.530.165.158 | 352.487.116.847 | 97,77 |
| 2023 | 347.197.104.138 | 343.332.224.517 | 98,89 |
| 2024 | 174.602.584.785 | 167.548.071.978 | 95,96 |
| 2025 | 108.199.484.251 | 107.345.779.164 | 99,21 |

*Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pengairan Aceh, 31 Desember 2025*




**Gambar 4.2 Persentase Penyerapan Anggaran Dinas Pengairan 5 Tahun Terakhir**

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.2 diatas, penyerapan anggaran selama periode tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, tingkat penyerapan anggaran tercatat sebesar 67,76% yang relative lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada pembatasan aktivitas lapangan, penyesuaian kebijakan pemerintah serta refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi sehingga pelaksanaan Sebagian program dan kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal.

Pada tahun 2022 seiring dengan membaiknya kondisi dan pelonggaran pembatasan aktivitas, penyerapan anggaran meningkat signifikan menjadi 97,77%. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 98,89% yang mencerminkan semakin baiknya perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2024 penyerapan anggaran tercatat sebesar 95,96%, meskipun mengalami sedikit penurunan namun tetap berada pada kategori sangat baik. Selanjutnya pada tahun 2025 penyerapan anggaran kembali meningkat dan mencapai 99,21%. Hal ini menunjukkan semakin optimalnya pengelolaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

## 4.3. Permasalahan, Kendala dan Hambatan

Permasalahan, kendala/hambatan selama pelaksanaan anggaran tahun 2025 yang diantaranya adalah :

1. Jumlah tenaga teknis dan manajerial belum mencukupi, serta kompetensi dalam perencanaan, pemeliharaan, dan mitigasi risiko bencana belum sepenuhnya memadai.
2. Terkait maraknya pelanggaran yang terjadi, diantaranya : pemanfaatan sepadan jaringan irigasi dengan mendirikan bangunan-bangunan liar diatas maupun dipinggir saluran irigasi seperti warung-warung, kios-kios, sadap liar, bercocok tanam diatas tanggul irigasi, pemanfaatan air irigasi diluar peruntukannya dan sebagainya yang dapat mengganggu kinerja irigasi pada hampir semua daerah irigasi.

3. Luas Daerah Irigasi pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, disebutkan bahwa luas Daerah Irigasi yang ditangani oleh Dinas Pengairan Aceh pada kenyataannya kondisi fungsional yang ada tidak mencapai lagi luasan yang telah ditetapkan bahkan terus berkurang seiring dengan adanya alih fungsi lahan.
4. Kondisi geografis yang telah terjadi yaitu bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur SDA dan irigasi.

## 4.4. Rekomendasi Langkah-Langkah Antisipasi Pada Tahun Mendatang

Memperhatikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 yang sering mengganggu laju progress kegiatan di lapangan, perlu pula dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi permasalahan, kendala/hambatan yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. Adapun langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran tahun mendatang, antara lain :

1. Pengembangan SDM dengan dilakukannya pelatihan teknis dan manajerial secara berkala, standarisasi kompetensi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mendukung pengelolaan SDA.
2. Terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran diperlukan tindak turun tangan melalui upaya penertiban oleh pemerintah daerah setempat dengan melibatkan seluruh stake holder yang ada sesuai aturan yang berlaku, kondisi ini perlu dituntaskan sesegera mungkin agar permasalahan tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan dimasa mendatang.
3. Berkaitan dengan nomenklatur Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 untuk luasan Daerah Irigasi yang tidak sesuai dengan kondisi luasan yang ada dilapangan agar diusulkan revisi luasan pada tahun mendatang.

4. Akibat bencana hidrometeorologi terjadi rescoping anggaran maka diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur dalam penanggulangan rekonstruksi pasca bencana.

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi mampu membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya Daerah Irigasi Permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatikan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah menurun disebabkan kondisi saluran, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik.

# LAMPIRAN

## LAPORAN KINERJA
## DINAS PENGAIRAN ACEH
## TAHUN 2025

# PEMERINTAH ACEH
# DINAS PENGAIRAN

## TAHUN
# 2025

# PERJANJIAN KINERJA

pengairan.acehprov.go.id

pengairanaceh

Dinas Pengairan Aceh Official

# PERJANJIAN KINERJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2025

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | KEPALA DINAS PENGAIRAN | ADE SURYA, ST, ME | Memimpin Dinas dan Melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Bina Teknik Konstruksi, Irigasi, Rawa, Pantai, Sungai Danau, Waduk, Operasi dan Pemeliharaan | Meningkatkan urusan penunjang pemerintah daerah provinsi | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | Rp 47.168.604.533 | 95 % | |
| | | | | Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Rp 66.237.976.720 | 58,14 % | |
| | | | | | | Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | | 75,12 % | |
| | | | | | | Persentase Luas Genangan Banjir yang terlindungi dari banjir akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama | | 41,16 % | |
| 2 | Plt. SEKRETARIS DINAS PENGAIRAN<br><br>SK Nomor: 800.1.3.3/3/2025 tgl 19 Feruari 2025 | MUSTAJAB KUMANGAN, S.Sos, MM | Melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pelayanan administrasi | Meningkatnya sistem Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja | Rp 273.380.199 | 100 % | |
| | | | | | | Persentase terselenggaranya layanan Informasi Publik | Rp - | 100 % | |
| | | | | Meningkatnya Capaian Kinerja Administrasi Keuangan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 37.829.981.990 | 100 % | |
| | | | | | | Persentase terselenggaranya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelolaan Aset | | 100 % | |
| | | | | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 125.305.021 | 100 % | |
| | | | | Meningkatnya Aparatur yang Memenuhi Kompetensi | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi | Rp 488.248.111 | 100 % | |
| | | | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor | Rp 1.126.082.126 | 100 % | |
| | | | | Meningkatnya Jasa Penunjang Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Dinas | Rp 5.574.373.121 | 100 % | |
| | | | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara | Rp 1.751.233.965 | 100 % | |
| 2.1 | PERENCANA AHLI MUDA | JUFRIAL, ST, MT | Melakukan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan, rencana anggaran kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, laporan kegiatan pembangunan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat. | Terkelolanya Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran | Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang tersusun dan tersedia | Rp 273.380.199 | 3 Dok | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun dan tersedia | | 3 Dok | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang tersusun dan tersedia | | 2 Dok | |
| | | | | Terkelolanya Kegiatan Penatalaksanaan Hubungan Masyarakat | | Jumlah Dokumen Laporan Informasi yang tersusun dan dipublikasi | | 1 Dok | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | | | | Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi | | Jumlah Dokumen Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi yang tersusun | | 1 Dok | |
| | | | | Terlaksananya peningkatan kualitas program dan kegiatan | | Jumlah Kegiatan Rakortekrenbang yang diikuti dalam meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan | | 1 Kegiatan | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Musrenbang yang diikuti dalam meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan | | 1 Kegiatan | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Penyusunan narasi RPJMA yang diikuti dalam meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan | | 1 Kegiatan | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang diikuti dalam meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan | | 1 Kegiatan | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP yang tersusun | | 1 Dok | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring RTP SPIP yang Tersusun | | 1 Dok | |
| 2.2 | PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN | HERMAN, SE, M.Si | Melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengelolaan asset | Terselenggaranya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelolaan Aset | | Terlaksananya Kegiatan administrasi Keuangan, verifikasi dan perbendaharaan, pembukuan dan akuntansi | | 1 Kegiatan | |
| | | | | | | Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu | | 34 Lap | |
| | | | | | | Tersedianya dokumen penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan | | 1 Dok | |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Aset | | 34 Lap | |
| 2.3 | KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM | MUSTAJAB KUMANGAN, S.Sos, MM | Melakukan urusan hukum, kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan dan perpustakaan. | Terselenggaranya Urusan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 35.455.093.990 | 267 Orang/Bulan | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp 2.374.888.000 | 1 Dok | |
| | | | | Terselenggaranya Urusan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD | Rp 125.305.021 | 5 Laporan | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | | | | Terselenggaranya Urusan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Rp 349.604.000 | 2 Paket | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Rp 55.000.000 | 10 Orang | |
| | | | | | Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Rp 83.644.111 | 60 Orang | |
| | | | | Terselenggaranya Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Rp 15.225.000 | 2 Paket | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Rp 378.280.809 | 5 Paket | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Rp 193.851.230 | 8 Paket | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Rp 51.097.860 | 2 Paket | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Rp 11.998.000 | 12 Dokumen | |
| | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 475.629.227 | 2 Laporan | |
| | | | | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 1.014.000 | 1 Laporan | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Rp 845.882.629 | 12 Laporan | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Rp 162.588.492 | 12 Laporan | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Rp 4.564.888.000 | 12 Laporan | |
| | | | | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Rp 457.408.000 | 11 Unit | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Rp 968.075.965 | 80 Unit | |
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Rp 325.750.000 | 4 Unit | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **3** | **KEPALA BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI** | **Ir. RINAL DIANTO, ST., MT** | **Melakukan pembinaan tata teknik, pengendalian pelaksanaan konstruksi, penelitian dan pengembangan** | **Meningkatnya penelitian, kajian teknis, dan pengendalian mutu kegiatan pengelolaan sumber daya air serta rekomendasi teknis perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi** | **Rp 74.963.268** | **100 %** | |
| | | | | | | **Persentase Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai** | **Rp 356.958.234** | **100 %** | |
| | | | | | | **Persentase Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengendalian mutu pengelolaan sumber daya air** | | **100 %** | |
| | | | | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa** | **Rp 839.976.390** | **100 %** | |
| 3.1 | KEPALA SEKSI TEKNIK | Ir. FADHLUN, ST, MT | Melakukan penelitian, pengkajian dokumen teknik, rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air permukaan, rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air | Terlaksananya penelitian dan pengkajian Dokumen Teknis Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan sumber daya air | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | Rp 74.963.268 | 15 Dok | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi teknis terhadap pemanfaatan air | | 15 Dok | |
| 3.2 | KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI | ELLY NORITA, ST, MT | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengendalian mutu pengelolaan sumber daya air | | Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian mutu pengelolaan sumber daya air | Rp - | 1 Dok | |
| | | | | | | Tersusunnya Data dan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi | | 1 Dok | |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Data dan Informasi Pekerjaan Konstruksi Yang Sudah Berkontrak | | 1 Lap | |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Rekapitulasi Data Kontrak Paket Tender dan Non Tender | | 1 Lap | |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Teknik dan Konstruksi | | 12 Lap | |
| 3.3 | TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA | Ir. SYAMSUL BAHRI, ST, MT | Melakukan survey, investigasi, pengukuran, pemetaan, pendataan, penelitian, kajian teknis, dan penyusunan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan di bidang pengelolaan sumber daya air | Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengkajian teknis dan lingkungan pengelolaan sumber daya air | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang disusun | Rp 356.958.234 | 3 Dok | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | Rp 839.976.390 | 3 Dok | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **4** | **KEPALA BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI** | **Ir. MARZUKI, ST, MT** | **Melakukan Pembangunan dan Peningkatan Irigasi, Reklamasi Rawa, Pengendalian abrasi Pantai** | **Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Luas Jaringan Irigasi Permukaan yang terairi** | **Rp 3.762.307.706** | **950,00 Ha** | |
| | | | | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pantai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air** | **Rp -** | **100 %** | |
| 4.1 | TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA | Ir. KHAIRUDDIN, ST, MT | Melakukan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi | Meningkatnya layanan jaringan irigasi | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun | Rp 2.622.307.706 | 0,32 Km | |
| | | | | | Peningkatan Bendung Irigasi | Jumlah Bendung irigasi yang ditingkatkan | Rp 1.140.000.000 | 1 Bendung | |
| 4.2 | KEPALA SEKSI RAWA | HERRY ALI CANDRA, ST | Melakukan reklamasi rawa | Meningkatnya layanan jaringan irigasi rawa | | Jumlah dokumen inventarisasi jaringan irigasi rawa yang dikelola dan diawasi | | 12 Dok | |
| | | | | | | Terlaksananya pembinaan teknis bidang konstruksi jaringan irigasi rawa | | 1 Keg | |
| 4.3 | KEPALA SEKSI PANTAI | TEUKU AZWARDI, ST | Melakukan pembangunan prasarana pantai | Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir | | Jumlah dokumen inventarisasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang dikelola dan diawasi | | 12 Dok | |
| | | | | | | Tersedianya bahan kebijakan teknis bidang konstruksi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | | 1 Dok | |
| | | | | | | Terlaksananya pembinaan teknis bidang konstruksi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | | 1 Keg | |
| **5** | **KEPALA BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK** | **SEJAHTERA, ST, MT** | **Melakukan pengendalian banjir dan pengaturan sungai, pembangunan dan peningkatan waduk, pembangunan dan peningkatan embung, dan pelestarian danau** | **Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Luas Genangan Banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai** | **Rp 49.269.653.406** | **308 Ha** | |
| | | | | | | **Persentase Debit Air yang dimanfaatkan dari sumber air baku** | | **100 %** | |
| | | | | | | **Persentase ketersediaan dokumen kebijakan serta pembinaan teknis dalam pengelolaan SDA** | | **100 %** | |
| 5.1 | KEPALA SEKSI SUNGAI | SRI DARSINA, ST., MT | Melaksanakan pembangunan pengendalian banjir, pembangunan pengaturan sungai dan penanggulangan bencana alam | Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir | Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang dibangun | Rp 4.709.751.904 | 0,30 Km | |
| | | | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun | Rp 32.066.165.954 | 1,24 Km | |
| | | | | | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang dinormalisasi/direstorasi | Rp 10.900.000.000 | 3,00 Km | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 5.2 | KEPALA SEKSI DANAU DAN WADUK | JAUHAR, ST., MT | Melakukan pembangunan dan peningkatan waduk, embung dan pelestarian danau | Meningkatnya ketersediaan air dalam Pembangunan Infrastuktur yang berkelanjutan | Pembangunan Unit Air Baku | Jumlah Unit Air Baku yang dibangun | Rp 500.000.000 | 1 Unit | |
| | | | | Terpenuhinya kualitas bahan kebijakan teknis konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya | | Tersedianya bahan kebijakan teknis bidang konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya | Rp - | 1 Dok | |
| | | | | | | Terlaksananya pembinaan teknis bidang konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya | | 1 Keg | |
| 5.3 | TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA | EFENDI, ST, M.Si | Melakukan perlindungan, pelestarian, pengawetan, pengendalian kualitas sumber daya air dan pencegahan pencemaran air | Meningkatnya pemanfaatan sistem hidrologi dan kualitas air untuk mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan di WS Kewenangan Provinsi | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | Rp 1.093.735.548 | 4 Dok | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan alokasi air | | 4 Dok | |
| **6** | **KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN** | **HILMI, SE, MM** | **Melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi, sungai, danau, waduk, pantai, rehabilitasi dan pembinaan tersier** | **Berkurangnya Luas Kawasan yang Terkena Dampak Banjir** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Luas Kawasan yang terlindungi dari Genangan Banjir** | **Rp 89.800.000** | **400,00 Ha** | |
| | | | | **Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Luas Areal sawah yang terairi** | **Rp 10.136.584.233** | **40.247 Ha** | |
| 6.1 | TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA | IWAN SYAHDI, ST. MT | Melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Kalibrasi, rencana tata tanam dan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi | Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi pemukaan yang dioperasikan dan dipelihara | Rp 8.048.384.233 | 515,61 Km | |
| | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | Rp 1.286.000.000 | 24 Bendung | |
| | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara | Rp 802.200.000 | 41,79 Km | |
| | | | | | | Tersedianya dokumen kondisi jaringan irigasi | | 1 Dok | |
| | | | | | | Tersedianya dokumen usulan penanganan irigasi berdasarkan hasil survey sebagai bahan masukan | | 1 Dok | |
| 6.2 | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI DANAU WADUK DAN PANTAI | DEDI SOFRIADI, ST, MT | Melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan pantai | Meningkatnya layanan pada sungai dengan meneliti dan mengevaluasi data kondisi Sungai yang memerlukan perbaikan dengan mensurvey sebagai bahan perbaikan | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan dan dipelihara | Rp 89.800.000 | 11 Unit | |
| | | | | | | Tersedianya dokumen inventarisasi Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara | | 1 Dok | |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Kegiatan OP Sungai dan Usulan Penanganan Sungai Berdasarkan Hasil Survey Sebagai Bahan Masukan | | 12 Lap | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 6.3 | Plt. KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN PEMBINAAN TERSIER<br><br>SPPT Nomor : 800.1.3.1/2718 Tgl 29 Januari 2024 | KHAIDIR, ST | Melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan sumber daya air dan pembinaan jaringan tersier | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Irigasi Partisipatif | | Tersedianya Laporan monitoring dan evaluasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | 1 Lap | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang berkualitas Pengelolaan Irigasi Partisipatif | | 6 Dok | |
| **7** | **KEPALA UPTD PI WIL - I** | **M. NASIR, ST, M.Si** | **Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan isu-isu strategis dalam pengelolaan irigasi Aceh** | **Meningkatnya kegiatan Tata laksana dan Kelembagaan, Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Sumber Daya Air Aceh** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh** | **Rp 302.463.222** | **100 %** | |
| | | | | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase terlaksananya Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)** | **Rp 4.137.196** | **100 %** | |
| | | | | | | **Persentase terlaksananya monitoring evaluasi kebijakan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Sumber Daya Air Aceh** | | **100 %** | |
| 7.1 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | MULLIZAR, ST | Melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, hukum, perpustakaan dan pelayanan administrasi. | Terwujudnya administrasi keuangan pada UPTD PI Wil - I | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | Terkelolanya administrasi keuangan | Rp 4.137.196 | 1 Dok | |
| | | | | Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Sumber Daya Air Aceh | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | Terlaksananya kegiatan sidang Dewan Sumber Daya Air Aceh | Rp 302.463.222 | 12 Keg | |
| | | | | | | Tersedianya Rekomendasi Sidang Dewan Sumber Daya Air, Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air | | 6 Rekomendasi | |
| 7.2 | KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN | AMIR HAMZAH, ST | Melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, rencana pengelolaan sumber daya air, program dan kegiatan pembangunan sumber daya air dan isu-isu strategis dalam pengelolaan irigasi. | Terwujudnya kegiatan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam pengelolaan Sumber Daya Air | | Tersusunnya dokumen Program dan Kegiatan SISDA | | 1 Dok | |
| | | | | | | Tersedianya laporan SISDA | | 12 Lap | |
| | | | | | | Terhimpunnya data dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air | | 1 Keg | |
| 7.3 | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | MUSLIM, ST | Melaksanakan operasional kegiatan persidangan, penyediaan data, pelayanan informasi pengelolaan irigasi dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pada UPTD pengelolaan irigasi provinsi. | Terwujudnya kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh | | Tersedianya draf rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air Aceh | | 1 Ranc | |
| | | | | | | Terlaksananya konsultasi kebijakan dan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air dengan instansi / lembaga terkait | | 2 Keg | |
| | | | | | | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dan perundang - undangan pengelolaan sumber daya air | | 2 Keg | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **8** | **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - II**<br><br>**SPPT NO. PEG.821/1571 Tgl 29 Mei 2023** | **RAHMAT FAZILA, ST, MT** | **Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Pase - Peusangan** | **Meningkatnya Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Pase - Peusangan dan Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA** | **Rp 205.191.324** | **100 %** | |
| | | | | | | **Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Pase - Peusangan** | **Rp -** | **100 %** | |
| | | | | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Kerja UPTD II** | **Rp 121.081.196** | **100 %** | |
| 8.1 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | YUNITA ANDRIANI, ST | Melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, hukum, perpustakaan dan pelayanan administrasi. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - II | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | Rp 21.081.196 | 1 Lembaga | |
| | | | | | | Tersedianya laporan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - II | | 12 Lap | |
| | | | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - II | | Tersedianya Laporan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - II | | 12 Lap | |
| | | | | Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektor, Partisipasi dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air | | Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melalui TKPSDA | | 12 Lap | |
| 8.2 | KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI | RAHMAT FAZILA, ST, MT | Melaksanakan operasional prasarana sungai, persidangan, pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan irigasi serta pemeliharaan prasarana sungai pada Wilayah Sungai Pase - Peusangan | Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Pase - Peusangan | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Yang Terlaksana | Rp 205.191.324 | 12 Lap | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan kegiatan pengelola informasi | | 1 Dok | |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan konsultasi dengan intansi terkait pengelolaan sumber daya air pada WS. Pase - Peusangan | | 4 Keg | |
| | | | | | | Tersedianya dukungan Data dan Informasi bagi anggota TKPSDA WS. Pase - Peusangan | | 3 Lap | |
| 8.3 | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN | FARIA, ST, MT | Melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan irigasi, rencana pengelolaan hidrologi, rencana pengelolaan kualitas air, rencana pengelolaan alokasi air, rencana pengelolaan banjir dan rencana pengelolaan kekeringan serta pembangunan prasarana sungai pada wilayah Sungai Pase - Peusangan | Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan sumber Daya Air dan Pengamatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah kerja UPTD Pengelolaan irigasi Wilayah II | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | Rp 100.000.000 | 8 DI | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air | | 1 Dok | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | | | | | | Tersusunnya laporan pengelolaan alokasi air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) WS Pase - Peusangan | | 14 Lap | |
| | | | | | | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap Konstruksi yang Dibangun pada WS. Pase - Peusangan | | 1 Keg | |
| **9** | **KEPALA UPTD PI WIL - III** | **Ir. FAISAL, ST, MT** | **Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Tamiang - Langsa** | **Meningkatnya Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa dan Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA** | **Rp 236.405.314** | **100 %** | |
| | | | | | | **Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Tamiang - Langsa** | **Rp -** | **100 %** | |
| | | | | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Kerja UPTD III** | **Rp 139.236.196** | **100 %** | |
| 9.1 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | SAIFUL BAHRI, ST | Melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, hukum, perpustakaan dan pelayanan administrasi. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - III | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | Rp 39.236.196 | 1 Lembaga | |
| | | | | | | Tersedianya laporan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - III | | 12 Lap | |
| | | | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - III | | Tersedianya Laporan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - III | | 12 Lap | |
| | | | | Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektor, Partisipasi dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air | | Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melalui TKPSDA | | 12 Lap | |
| 9.2 | KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI | SYAIFUDDIN. M, ST | Melaksanakan operasional prasarana sungai, persidangan, pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan irigasi serta pemeliharaan prasarana sungai pada Wilayah Sungai Tamiang - Langsa | Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Tamiang - Langsa | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Yang Terlaksana | Rp 236.405.314 | 12 Laporan | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan kegiatan pengelola informasi | | 1 Dok | |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan konsultasi dengan intansi terkait pengelolaan sumber daya air pada WS.Tamiang - Langsa | | 4 Keg | |
| | | | | | | Tersedianya dukungan Data dan Informasi bagi anggota TKPSDA WS. Tamiang - Langsa | | 3 Lap | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 9.3 | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN | MARZUKI, ST | Melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan hidrologi, rencana pengelolaan kualitas air, rencana pengelolaan alokasi air, rencana pengelolaan banjir dan rencana pengelolaan kekeringan serta pembangunan prasarana sungai pada wilayah Sungai Tamiang - Langsa | Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan sumber Daya Air dan Pengamatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah kerja UPTD Pengelolaan irigasi Wilayah III | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | Rp 100.000.000 | 10 DI | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air | | 1 Dok | |
| | | | | | | Tersusunnya laporan pengelolaan alokasi air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) WS Tamiang - Langsa | | 14 Lap | |
| | | | | | | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap Konstruksi yang Dibangun pada WS. Tamiang - Langsa | | 2 Keg | |
| **10** | **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - IV**<br><br>**SK Nomor 800.1.3.3/634/2024 Tanggal 3 Juni 2024** | **Ir. REZA TANZIL, ST, MT** | **Melaksanakan operasional prasarana sungai, persidangan, pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan irigasi serta pemeliharaan prasarana sungai pada Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi** | **Meningkatnya Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi dan Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA** | **Rp 204.631.319** | **100 %** | |
| | | | | | | **Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Teunom - Lambesoi** | | **100 %** | |
| | | | | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Kerja UPTD IV** | **Rp 118.517.196** | **100 %** | |
| 10.1 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | Ir. REZA TANZIL, ST, MT | Melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, hukum, perpustakaan dan pelayanan administrasi. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - IV | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | Rp 18.517.196 | 1 Lembaga | |
| | | | | | | Tersedianya laporan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - IV | | 12 Lap | |
| | | | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - IV | | Tersedianya Laporan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - IV | | 12 Lap | |
| | | | | Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektor, Partisipasi dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air | | Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melalui TKPSDA | | 12 Lap | |
| 10.2 | KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI | AKMAL, ST. MT | Melaksanakan operasional prasarana sungai, persidangan, pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan irigasi serta pemeliharaan prasarana sungai pada Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi | Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Yang Terlaksana | Rp 204.631.319 | 12 Lap | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan kegiatan pengelola informasi | | 1 Dok | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan konsultasi dengan intansi terkait pengelolaan sumber daya air pada WS. Teunom-Lambesoi | | 4 Keg | |
| | | | | | | Tersedianya dukungan Data dan Informasi bagi anggota TKPSDA WS. Teunom-Lambesoi | | 3 Lap | |
| 10.3 | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN | YASSIR SAFFANA, ST, MT | Melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan hidrologi, rencana pengelolaan kualitas air, rencana pengelolaan alokasi air, rencana pengelolaan banjir dan rencana pengelolaan kekeringan serta pembangunan prasarana sungai pada wilayah Sungai Teunom - Lambesoi | Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan sumber Daya Air dan Pengamatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah kerja UPTD Pengelolaan irigasi Wilayah IV | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | Rp 100.000.000 | 4 DI | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air | | 1 Dok | |
| | | | | | | Tersusunnya laporan pengelolaan alokasi air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) WS Teunom - Lambesoi | | 14 Lap | |
| | | | | | | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap Konstruksi yang Dibangun pada WS. Teunom - Lambesoi | | 4 Keg | |
| **11** | **KEPALA UPTD PI WIL - V** | **Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT** | **Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Baru - Kluet** | **Meningkatnya Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Baru - Kluet dan Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA** | **Rp 255.133.324** | **100 %** | |
| | | | | | | **Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Baru - Kluet** | **Rp -** | **100 %** | |
| | | | | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Kerja UPTD V** | **Rp 120.937.196** | **100 %** | |
| 11.1 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | T. MUHAMMAD, SE | Melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, hukum, perpustakaan dan pelayanan administrasi. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - V | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | Rp 20.937.196 | 1 Lembaga | |
| | | | | | | Tersedianya laporan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - V | | 12 Lap | |
| | | | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - V | | Tersedianya Laporan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - V | | 12 Lap | |
| | | | | Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektor, Partisipasi dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air | | Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melalui TKPSDA | | 12 Lap | |

| No. | Uraian | Nama Pejabat | Tupoksi (Pergub Nomor 109 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2018 ) | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | Target | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 11.2 | KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI | Ir. HENDRA SATRIA, ST, MT | Melaksanakan operasional prasarana sungai, persidangan, pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan irigasi serta pemeliharaan prasarana sungai pada Wilayah Sungai Baru - Kluet | Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Baru - Kluet | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Yang Terlaksana | Rp 255.133.324 | 12 Laporan | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan kegiatan pengelola informasi | | 1 Dok | |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan konsultasi dengan intansi terkait pengelolaan sumber daya air pada WS. Baru - Kluet | | 4 Keg | |
| | | | | | | Tersedianya dukungan Data dan Informasi bagi anggota TKPSDA WS. Baru - Kluet | | 3 Lap | |
| 11.3 | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN | Ir. GUNAWAN, ST, MT | Melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan hidrologi, rencana pengelolaan kualitas air, rencana pengelolaan alokasi air, rencana pengelolaan banjir dan rencana pengelolaan kekeringan serta pembangunan prasarana sungai pada wilayah Sungai Baru - Kluet | Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan sumber Daya Air dan Pengamatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah kerja UPTD Pengelolaan irigasi Wilayah V | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | Rp 100.000.000 | 5 DI | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air | | 1 Dok | |
| | | | | | | Tersusunnya laporan pengelolaan alokasi air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) WS Baru - Kluet | | 14 Lap | |
| | | | | | | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap Konstruksi yang Dibangun pada WS. Baru - Kluet | | 1 Keg | |

Banda Aceh, 20 Maret 2025
KEPALA DINAS PENGAIRAN

ADE SURYA, ST, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700428 199703 1 003

# KEPALA DINAS

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**KEPALA DINAS PENGAIRAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUZAKIR MANAF**
Jabatan : **GUBERNUR ACEH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

PIHAK KEDUA,

**MUZAKIR MANAF**

PIHAK PERTAMA,

**ADE SURYA, ST, ME**

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 1.1 Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 58,14 % |
| | | 1.2 Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | 75,12 % |
| | | 1.3 Persentase Luas Genangan Banjir akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama | 41,16 % |

| PROGRAM | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rp 66.513.574.562 |

Banda Aceh, 2025

GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

KEPALA DINAS PENGAIRAN

ADE SURYA, ST, ME

# SEKRETARIAT

## PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSTAJAB KUMANGAN, S.SOS, MM**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DINAS PENGAIRAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
|---|---|
| **ADE SURYA, ST, ME** | **MUSTAJAB KUMANGAN, S.SOS, MM** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# SEKRETARIAT

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya sistem Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 1.1 Tingkat Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja | 100 % |
| | | 1.2 Persentase terselenggaranya layanan Informasi Publik | 100 % |
| 2. | Meningkatnya Capaian Kinerja Administrasi Keuangan | 2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % |
| | | 2.2 Persentase terselenggaranya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelolaan Aset | 100 % |
| 3. | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor | 3.1 Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % |
| 4. | Meningkatnya Aparatur yang Memenuhi Kompetensi | 4.1 Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi | 100 % |
| 5. | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor | 5.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor | 100 % |
| 6. | Meningkatnya Jasa Penunjang Kantor | 6.1 Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Dinas | 100 % |
| 7. | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas | 7.1 Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara | 100 % |

| KEGIATAN | | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp | 273.380.199 |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp | 37.829.981.990 |
| 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp | 125.305.021 |
| 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp | 488.248.111 |
| 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp | 1.126.082.126 |
| 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 5.574.373.121 |
| 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 1.751.233.965 |

Banda Aceh, 2025

KEPALA DINAS PENGAIRAN

ADE SURYA, ST, ME

Plt. SEKRETARIS DINAS PENGAIRAN

MUSTAJAB KUMANGAN, S.Sos, MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSTAJAB KUMANGAN, S.SOS, MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUSTAJAB KUMANGAN, S.SOS, MM**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **MUSTAJAB KUMANGAN, S.SOS, MM** | **MUSTAJAB KUMANGAN, S.SOS, MM** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# SEKRETARIAT

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terselenggaranya Urusan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 267 Orang/Bulan |
| | | 1.2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dok |
| 2 | Terselenggaranya Urusan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2.1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan |
| 3 | Terselenggaranya Urusan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 3.1 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket |
| | | 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang |
| | | 3.3 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 60 Orang |
| 4 | Terselenggaranya Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4.1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket |
| | | 4.2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 5 Paket |
| | | 4.3 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8 Paket |
| | | 4.4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket |
| | | 4.5 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 Dokumen |
| | | 4.6 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan |
| 5 | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan |
| | | 5.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |
| | | 5.3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |
| | | 5.4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |
| 6 | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 6.1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 11 Unit |
| | | 6.2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 80 Unit |
| | | 6.3 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit |

| | SUB KEGIATAN | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp | 35.455.093.990 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp | 2.374.888.000 |
| 3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp | 125.305.021 |
| 4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Rp | 349.604.000 |
| 5 | Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Rp | 83.644.111 |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp | 15.225.000 |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp | 378.280.809 |
| 8 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp | 193.851.230 |
| 9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Rp | 51.097.860 |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp | 11.998.000 |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp | 475.629.227 |
| 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp | 1.014.000 |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp | 845.882.629 |
| 14 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp | 162.588.492 |
| 15 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp | 4.564.888.000 |
| 16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp | 457.408.000 |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp | 968.075.965 |
| 18 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp | 325.750.000 |

Banda Aceh, 2025

| | |
|---|---|
| Plt. SEKRETARIS DINAS PENGAIRAN | KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM |
| MUSTAJAB KUMANGAN, S.Sos, MM | MUSTAJAB KUMANGAN, S.Sos, MM |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUFRIAL, ST, MT**
Jabatan : **PERENCANA AHLI MUDA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUSTAJAB KUMANGAN, S.SOS, MM**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **MUSTAJAB KUMANGAN, S.SOS, MM** | **JUFRIAL, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# SEKRETARIAT

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terkelolanya Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran | 1.1 Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang tersusun dan tersedia | 3 Dok |
| | | 1.2 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun dan tersedia | 3 Dok |
| | | 1.3 Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang tersusun dan tersedia | 2 Dok |
| 2. | Terkelolanya Kegiatan Penatalaksanaan Hubungan Masyarakat | 2.1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi yang tersusun dan dipublikasi | 1 Dok |
| 3. | Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi | 3.1 Jumlah Dokumen Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi yang tersusun | 1 Dok |
| 4. | Terlaksananya peningkatan kualitas program dan kegiatan | 4.1 Jumlah Kegiatan Rakortekrenbang yang diikuti dalam meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan | 1 Kegiatan |
| | | 4.2 Jumlah Kegiatan Musrenbang yang diikuti dalam meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan | 1 Kegiatan |
| | | 4.3 Jumlah Kegiatan Penyusunan narasi RPJMA yang diikuti dalam meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan | 1 Kegiatan |
| | | 4.4 Jumlah Kegiatan pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang diikuti dalam meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan | 1 Kegiatan |
| 5. | Tersusunnya Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 5.1 Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP yang tersusun | 1 Dok |
| | | 5.2 Jumlah Dokumen Monitoring RTP SPIP yang Tersusun | 1 Dok |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah** | **Rp 273.380.199** |

**Banda Aceh, 2025**

**Plt. SEKRETARIS DINAS PENGAIRAN**

**MUSTAJAB KUMANGAN, S.Sos, MM**

**PERENCANA AHLI MUDA**

**JUFRIAL, ST, MT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMAN, SE, M.Si**
Jabatan : **PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUSTAJAB KUMANGAN, S.SOS, MM**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **MUSTAJAB KUMANGAN, S.SOS, MM** | **HERMAN, SE, M.Si** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# SEKRETARIAT

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terselenggaranya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelolaan Aset | 1.1 Terlaksananya Kegiatan administrasi Keuangan, verifikasi dan perbendaharaan, pembukuan dan akuntansi | 1 Kegiatan |
| | | 1.2 Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu | 34 Lap |
| | | 1.3 Tersedianya dokumen penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan | 1 Dok |
| | | 1.4 Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Aset | 34 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. - | Rp - |

Banda Aceh, 2025

| Plt. SEKRETARIS DINAS PENGAIRAN | PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN |
|---|---|
| MUSTAJAB KUMANGAN, S.Sos, MM | HERMAN, SE, M.Si |

# TEKNIK DAN KONSTRUKSI

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. RINAL DIANTO, ST., MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
|---|---|
| **ADE SURYA, ST, ME** | **Ir. RINAL DIANTO, ST., MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya penelitian, kajian teknis, dan pengendalian mutu kegiatan pengelolaan sumber daya air serta rekomendasi teknis perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air | 1.1 Persentase Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | 100 % |
| | | 1.2 Persentase Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai | 100 % |
| | | 1.3 Persentase Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 100 % |
| | | 1.4 Persentase Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengendalian mutu pengelolaan sumber daya air | 100 % |

| KEGIATAN | ANGGARAN | |
|---|---|---|
| **1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp** | **431.921.502** |
| **2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp** | **839.976.390** |

**Banda Aceh, 2025**

| KEPALA DINAS PENGAIRAN | KEPALA BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI |
|---|---|
| **ADE SURYA, ST, ME** | **Ir. RINAL DJANTO, ST., MT** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. FADHLUN, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TEKNIK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. RINAL DIANTO, ST., MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. RINAL DIANTO, ST., MT** | **Ir. FADHLUN, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya penelitian dan pengkajian Dokumen Teknis Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan sumber daya air | 1.1 Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | 15 Dok |
| | | 1.2 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi teknis terhadap pemanfaatan air | 15 Dok |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN | |
|---|---|---|
| **1. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi** | **Rp** | **74.963.268** |

Banda Aceh, 2025

**KEPALA BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI**

**Ir. RINAL DIANTO, ST., MT**

**KEPALA SEKSI TEKNIK**

**Ir. FADHLUN, ST, MT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SYAMSUL BAHRI, ST, MT**
Jabatan : **TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. RINAL DIANTO, ST., MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. RINAL DIANTO, ST., MT** | **Ir. SYAMSUL BAHRI, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengkajian teknis dan lingkungan pengelolaan sumber daya air | 1.1 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang disusun | 3 Dok |
| | | 1.2 Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 3 Dok |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai** | **Rp 356.958.234** |
| **2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa** | **Rp 839.976.390** |

**Banda Aceh, 2025**

**KEPALA BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI**

**Ir. RINAL DIANTO, ST., MT**

**TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA**

**Ir. SYAMSUL BAHRI, ST, MT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELLY NORITA, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. RINAL DIANTO, ST., MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. RINAL DIANTO, ST., MT** | **ELLY NORITA, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengendalian mutu pengelolaan sumber daya air | 1.1 Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian mutu pengelolaan sumber daya air | 1 Dok |
| | | 1.2 Tersusunnya Data dan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi | 1 Dok |
| | | 1.3 Tersedianya Laporan Data dan Informasi Pekerjaan Konstruksi Yang Sudah Berkontrak | 1 Lap |
| | | 1.4 Tersedianya Laporan Rekapitulasi Data Kontrak Paket Tender dan Non Tender | 1 Lap |
| | | 1.5 Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Teknik dan Konstruksi | 12 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. | Rp. - |

Banda Aceh, 2025

| KEPALA BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI | KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI |
|---|---|
| Ir. RINAL DIANTO, ST., MT | ELLY NORITA, ST, MT |

# IRIGASI, RAWA DAN PANTAI

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. MARZUKI, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
|---|---|
| **ADE SURYA, ST, ME** | **Ir. MARZUKI, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 1.1 Luas Jaringan Irigasi Permukaan yang terairi | 950,00 Ha |
| | | 1.2 Persentase Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pantai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air | 100 % |

| KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp 3.762.307.706** |

**Banda Aceh, 2025**

| KEPALA DINAS PENGAIRAN | KEPALA BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI |
|---|---|
| **ADE SURYA, ST, ME** | **Ir. MARZUKI, ST, MT** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. KHAIRUDDIN, ST, MT**
Jabatan : **TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. MARZUKI, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. MARZUKI, ST, MT** | **Ir. KHAIRUDDIN, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya layanan jaringan irigasi | 1.1 Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun | 0,32 Km |
| | | 1.2 Jumlah Bendung irigasi yang ditingkatkan | 1,00 Bendung |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Rp 2.622.307.706 |
| 2 Peningkatan Bendung Irigasi | Rp 1.140.000.000 |

Banda Aceh, 2025

KEPALA BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI

Ir. MARZUKI, ST, MT

TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA

Ir. KHAIRUDDIN, ST, MT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERRY ALI CANDRA, ST**
Jabatan : **KEPALA SEKSI RAWA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. MARZUKI, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. MARZUKI, ST, MT** | **HERRY ALI CANDRA, ST** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya layanan jaringan irigasi rawa | 1.1 Jumlah dokumen inventarisasi jaringan irigasi rawa yang dikelola dan diawasi | 12 Dok |
| | | 1.2 Terlaksananya pembinaan teknis bidang konstruksi jaringan irigasi rawa | 1 Keg |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. - | Rp - |

Banda Aceh, 2025

| KEPALA BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI | KEPALA SEKSI RAWA |
|---|---|
| Ir. MARZUKI, ST, MT | HERRY ALI CANDRA, ST |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TEUKU AZWARDI, ST**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PANTAI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. MARZUKI, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. MARZUKI, ST, MT** | **TEUKU AZWARDI, ST** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir | 1.1 Jumlah dokumen inventarisasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang dikelola dan diawasi | 12 Dok |
| | | 1.2 Tersedianya bahan kebijakan teknis bidang konstruksi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 1 Dok |
| | | 1.3 Terlaksananya pembinaan teknis bidang konstruksi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 1 Keg |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. | Rp - |

Banda Aceh, 2025

KEPALA BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI

Ir. MARZUKI, ST, MT

KEPALA SEKSI PANTAI

TEUKU AZWARDI, ST

# SUNGAI, DANAU DAN WADUK

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SEJAHTERA, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
|---|---|
| **ADE SURYA, ST, ME** | **SEJAHTERA, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan | 1.1 Luas Genangan Banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai | 308 Ha |
| | | 1.2 Persentase Debit Air yang dimanfaatkan dari sumber air baku | 100 % |
| | | 1.3 Persentase ketersediaan dokumen kebijakan serta pembinaan teknis dalam pengelolaan SDA | 100 % |

| KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rp 49.269.653.406 |

Banda Aceh, 2025

KEPALA DINAS PENGAIRAN

ADE SURYA, ST, ME

KEPALA BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK

SEJAHTERA, ST, MT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI DARSINA, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI SUNGAI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SEJAHTERA, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **SEJAHTERA, ST, MT** | **SRI DARSINA, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir | 1.1 Panjang Tanggul Sungai yang dibangun | 0,30 Km |
| | | 1.2 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun | 1,24 Km |
| | | 1.3 Panjang Sungai yang dinormalisasi/direstorasi | 3,00 Km |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. Pembangunan Tanggul Sungai | Rp 4.709.751.904 |
| 2. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Rp 32.066.165.954 |
| 3. Normalisasi/Restorasi Sungai | Rp 10.900.000.000 |

Banda Aceh, 2025

**KEPALA BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK**

**SEJAHTERA, ST, MT**

**KEPALA SEKSI SUNGAI**

**SRI DARSINA, ST., MT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JAUHAR, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI DANAU DAN WADUK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SEJAHTERA, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **SEJAHTERA, ST, MT** | **JAUHAR, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya ketersediaan air dalam Pembangunan Infrastuktur yang berkelanjutan | 1.1 Jumlah Unit Air Baku yang dibangun | 1 Unit |
| 2. | Terpenuhinya kualitas bahan kebijakan teknis konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya | 2.1 Tersedianya bahan kebijakan teknis bidang konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya | 1 Dok |
| | | 2.2 Terlaksananya pembinaan teknis bidang konstruksi konservasi danau, waduk dan tampungan air lainnya | 1 Keg |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. Pembangunan Unit Air Baku | Rp 500.000.000 |

Banda Aceh, 2025

KEPALA BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK

SEJAHTERA, ST, MT

KEPALA SEKSI DANAU DAN WADUK

JAUHAR, ST., MT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EFENDI, ST, M.Si**
Jabatan : **TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SEJAHTERA, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **SEJAHTERA, ST, MT** | **EFENDI, ST, M.Si** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya pemanfaatan sistem hidrologi dan kualitas air untuk mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan di WS Kewenangan Provinsi | 1.1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi<br>1.2 Jumlah Dokumen pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan alokasi air | 4 Dok<br>4 Dok |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | Rp 1.093.735.548 |

Banda Aceh, 2025

KEPALA BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK

SEJAHTERA, ST, MT

TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA

EFENDI, ST, M.Si

# OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HILMI, SE, MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **ADE SURYA, ST, ME** | **HILMI, SE, MM** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Berkurangnya Luas Kawasan yang Terkena Dampak Banjir | 1.1 Luas Kawasan yang terlindungi dari Genangan Banjir | 400 Ha |
| 2. | Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi | 2.1 Luas Areal sawah yang terairi | 40.247 Ha |

| KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp 89.800.000** |
| **2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp 10.136.584.233** |

**Banda Aceh, 2025**

| KEPALA DINAS PENGAIRAN | KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
|---|---|
| **ADE SURYA, ST, ME** | **HILMI, SE, MM** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IWAN SYAHDI, ST, MT**
Jabatan : **TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HILMI, SE, MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
|---|---|
| **HILMI, SE, MM** | **IWAN SYAHDI, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi | 1.1 Panjang jaringan irigasi pemukaan yang dioperasikan dan dipelihara | 515,61 Km |
| | | 1.2 Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara | 24 Bendung |
| | | 1.3 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara | 41,79 Km |
| | | 1.4 Tersedianya dokumen kondisi jaringan irigasi | 1 Dok |
| | | 1.5 Tersedianya dokumen usulan penanganan irigasi berdasarkan hasil survey sebagai bahan masukan | 1 Dok |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan** | **Rp 8.048.384.233** |
| **2. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi** | **Rp 1.286.000.000** |
| **3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa** | **Rp 802.200.000** |

**Banda Aceh, 2025**

**KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

**HILMI, SE, MM**

**TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA**

**IWAN SYAHDI, ST. MT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI SOFRIADI, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI OPERASI SUNGAI DANAU WADUK PANTAI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HILMI, SE, MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **HILMI, SE, MM** | **DEDI SOFRIADI, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya layanan pada sungai dengan meneliti dan mengevaluasi data kondisi Sungai yang memerlukan perbaikan dengan mensurvey sebagai bahan perbaikan | 1.1 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan dan dipelihara | 11 Unit |
| | | 1.2 Tersedianya dokumen inventarisasi Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Dok |
| | | 1.3 Tersedianya Laporan Kegiatan OP Sungai dan Usulan Penanganan Sungai Berdasarkan Hasil Survey Sebagai Bahan Masukan | 12 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya** | **Rp 89.800.000** |

**Banda Aceh, 2025**

| KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI DANAU WADUK DAN PANTAI |
|---|---|
| **HILMI, SE, MM** | **DEDI SOFRIADI, ST, MT** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHAIDIR, ST**
Jabatan : **Plt. KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN PEMBINAAN TERSIER**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HILMI, SE, MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **HILMI, SE, MM** | **KHAIDIR, ST** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Irigasi Partisipatif | 1.1 Tersedianya Laporan monitoring dan evaluasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lap |
| | | 1.2 Jumlah Dokumen Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang berkualitas Pengelolaan Irigasi Partisipatif | 6 Dok |

| | SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. | | Rp - |

Banda Aceh, 2025

| KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN | Plt. KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN PEMBINAAN TERSIER |
|---|---|
| HILMI, SE, MM | KHAIDIR, ST |

# UPTD PI WIL - I

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. NASIR, ST, M. Si**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - I**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **ADE SURYA, ST, ME** | **M. NASIR, ST, M. Si** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - I

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kegiatan Tata laksana dan Kelembagaan, Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Sumber Daya Air Aceh | 1.1 Persentase terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh | 100 % |
| | | 1.2 Persentase terlaksananya Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) | 100 % |
| | | 1.3 Persentase terlaksananya monitoring evaluasi kebijakan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Sumber Daya Air Aceh | 100 % |

| KEGIATAN | | ANGGARAN |
|---|---|---|
| **1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp** | **302.463.222** |
| **2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah** | **Rp** | **4.137.196** |

**Banda Aceh, 2025**

**KEPALA DINAS PENGAIRAN**

**ADE SURYA, ST, ME**

**KEPALA UPTD PI WIL - I**

**M. NASIR, ST, M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MULLIZAR, ST**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. NASIR, ST, M. Si**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - I**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **M. NASIR, ST, M. Si** | **MULLIZAR, ST** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - I

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya administrasi keuangan pada UPTD PI Wil - I | 1.1 Terkelolanya administrasi keuangan | 1 Dok |
| 2. | Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Sumber Daya Air Aceh | 2.1 Terlaksananya kegiatan sidang Dewan Sumber Daya Air Aceh | 12 Keg |
| | | 2.2 Tersedianya Rekomendasi Sidang Dewan Sumber Daya Air, Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air | 6 Rekomendasi |

| SUB KEGIATAN | | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. **Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi** | **Rp** | **4.137.196** |
| 2. **Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi** | **Rp** | **302.463.222** |

**Banda Aceh, 2025**

**KEPALA UPTD PI WIL - I**

**M. NASIR, ST, M.Si**

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

**MULLIZAR, ST**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMIR HAMZAH, ST**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. NASIR, ST, M. Si**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - I**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **M. NASIR, ST, M. Si** | **AMIR HAMZAH, ST** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - I

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya kegiatan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam pengelolaan Sumber Daya Air | 1.1 Tersusunnya dokumen Program dan Kegiatan SISDA | 1 Dok |
| | | 1.2 Tersedianya laporan SISDA | 12 Lap |
| | | 1.3 Terhimpunnya data dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air | 1 Keg |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. - | Rp - |

Banda Aceh, 2025

KEPALA UPTD PI WIL - I

M. NASIR, ST, M.Si

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

AMIR HAMZAH, ST

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSLIM, ST**
Jabatan : **KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. NASIR, ST, M. Si**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - I**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **M. NASIR, ST, M. Si** | **MUSLIM, ST** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - I

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh | 1.1 Tersedianya draf rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air Aceh | 1 Ranc |
| | | 1.2 Terlaksananya konsultasi kebijakan dan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air dengan instansi / lembaga terkait | 2 Keg |
| | | 1.3 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dan perundang - undangan pengelolaan sumber daya air | 2 Keg |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. - | Rp - |

Banda Aceh, 2025

| KEPALA UPTD PI WIL - I | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
|---|---|
| M. NASIR, ST, M.Si | MUSLIM, ST |

# UPTD PI WIL - II

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT FAZILA, ST, MT**
Jabatan : **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - II**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **ADE SURYA, ST, ME** | **RAHMAT FAZILA, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - II

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Pase - Peusangan dan Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II | 1.1 Persentase Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA | 100 % |
| | | 1.2 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Pase - Peusangan | 100 % |
| | | 1.3 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Kerja UPTD II | 100 % |

| KEGIATAN | ANGGARAN | |
|---|---|---|
| 1. **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp** | **205.191.324** |
| 2. **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah** | **Rp** | **121.081.196** |

**Banda Aceh, 2025**

| KEPALA DINAS PENGAIRAN | Plt. KEPALA UPTD PI WIL - II |
|---|---|
| **ADE SURYA, ST, ME** | **RAHMAT FAZILA, ST, MT** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNITA ANDRIANI, ST**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAT FAZILA, ST, MT**
Jabatan : **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - II**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **RAHMAT FAZILA, ST, MT** | **YUNITA ANDRIANI, ST** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - II

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - II | 1.1 Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | 1 Lembaga |
| | | 1.2 Tersedianya laporan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - II | 12 Lap |
| 2. | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - II | 2.1 Tersedianya Laporan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - II | 12 Lap |
| 3. | Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektor, Partisipasi dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air | 3.1 Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melalui TKPSDA | 12 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi** | **Rp 21.081.196** |

**Banda Aceh, 2025**

**Plt. KEPALA UPTD PI WIL - II**

**RAHMAT FAZILA, ST, MT**

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

**YUNITA ANDRIANI, ST**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT FAZILA, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAT FAZILA, ST, MT**
Jabatan : **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - II**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **RAHMAT FAZILA, ST, MT** | **RAHMAT FAZILA, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - II

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Pase - Peusangan | 1.1 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Yang Terlaksana | 12 Lap |
| | | 1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan kegiatan pengelola informasi | 1 Dok |
| | | 1.3 Terlaksananya kegiatan konsultasi dengan intansi terkait pengelolaan sumber daya air pada WS. Pase - Peusangan | 4 Keg |
| | | 1.4 Tersedianya dukungan Data dan Informasi bagi anggota TKPSDA WS. Pase - Peusangan | 3 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi** | **Rp 205.191.324** |

**Banda Aceh, 2025**

**Plt. KEPALA UPTD PI WIL - II**

**RAHMAT FAZILA, ST, MT**

**KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

**RAHMAT FAZILA, ST, MT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FARIA, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAT FAZILA, ST, MT**
Jabatan : **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - II**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **RAHMAT FAZILA, ST, MT** | **FARIA, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - II

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan sumber Daya Air dan Pengamatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah kerja UPTD Pengelolaan irigasi Wilayah II | 1.1 Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | 8 DI |
| | | 1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air | 1 Dok |
| | | 1.3 Tersusunnya laporan pengelolaan alokasi air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) WS Pase - Peusangan | 14 Lap |
| | | 1.4 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap Konstruksi yang Dibangun pada WS. Pase - Peusangan | 1 Keg |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Rp 100.000.000 |

Banda Aceh, 2025

| Plt. KEPALA UPTD PI WIL - II | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN |
|---|---|
| RAHMAT FAZILA, ST, MT | FARIA, ST, MT |

# UPTD PI WIL - III

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. FAISAL, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - III**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **ADE SURYA, ST, ME** | **Ir. FAISAL, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - III

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Tamiang - Langsa dan Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III | 1.1 Persentase Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA | 100 % |
| | | 1.2 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Tamiang - Langsa | 100 % |
| | | 1.3 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Kerja UPTD III | 100 % |

| KEGIATAN | ANGGARAN | |
|---|---|---|
| **1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp** | **236.405.314** |
| **2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp** | **139.236.196** |

**Banda Aceh, 2025**

| KEPALA DINAS PENGAIRAN | KEPALA UPTD PI WIL - III |
|---|---|
| **ADE SURYA, ST, ME** | **FAISAL, ST, MT** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAIFUL BAHRI, ST**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. FAISAL, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - III**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. FAISAL, ST, MT** | **SAIFUL BAHRI, ST** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - III

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - III | 1.1 Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | 1 Lembaga |
| | | 1.2 Tersedianya laporan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - III | 12 Lap |
| 2. | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - III | 2.1 Tersedianya Laporan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - III | 12 Lap |
| 3. | Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektor, Partisipasi dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air | 3.1 Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melalui TKPSDA | 12 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi** | **Rp 39.236.196** |

**Banda Aceh, 2025**

**KEPALA UPTD PI WIL - III**

**FAISAL, ST, MT**

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

**SAIFUL BAHRI, ST**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAIFUDDIN. M, ST**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. FAISAL, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - III**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. FAISAL, ST, MT** | **SYAIFUDDIN. M, ST** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - III

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Tamiang - Langsa | 1.1 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Yang Terlaksana | 12 Laporan |
| | | 1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan kegiatan pengelola informasi | 1 Dok |
| | | 1.3 Terlaksananya kegiatan konsultasi dengan intansi terkait pengelolaan sumber daya air pada WS.Tamiang - Langsa | 4 Keg |
| | | 1.4 Tersedianya dukungan Data dan Informasi bagi anggota TKPSDA WS. Tamiang - Langsa | 3 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi** | **Rp 236.405.314** |

**Banda Aceh, 2025**

**KEPALA UPTD PI WIL - III**

**FAISAL, ST, MT**

**KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

**SYAIFUDDIN. M, ST**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARZUKI, ST**
Jabatan : **KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. FAISAL, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - III**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. FAISAL, ST, MT** | **MARZUKI, ST** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - III

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan sumber Daya Air dan Pengamatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah kerja UPTD Pengelolaan irigasi Wilayah III | 1.1 Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | 10 DI |
| | | 1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air | 1 Dok |
| | | 1.3 Tersusunnya laporan pengelolaan alokasi air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) WS Tamiang - Langsa | 14 Lap |
| | | 1.4 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap Konstruksi yang Dibangun pada WS. Tamiang - Langsa | 2 Keg |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi** | **Rp 100.000.000** |

**Banda Aceh, 2025**

**KEPALA UPTD PI WIL - III**

**FAISAL, ST, MT**

**KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN**

**MARZUKI, ST**

# UPTD PI WIL - IV

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. REZA TANZIL, ST, MT**
Jabatan : **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - IV**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **ADE SURYA, ST, ME** | **Ir. REZA TANZIL, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - IV

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Teunom - Lambesoi dan Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV | 1.1 Persentase Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA | 100 % |
| | | 1.2 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Teunom - Lambesoi | 100 % |
| | | 1.3 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Kerja UPTD IV | 100 % |

| KEGIATAN | ANGGARAN | |
|---|---|---|
| **1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp** | **204.631.319** |
| **2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp** | **118.517.196** |

**Banda Aceh, 2025**

| | |
|---|---|
| **KEPALA DINAS PENGAIRAN** | **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - IV** |
| **ADE SURYA, ST, ME** | **Ir. REZA TANZIL, ST, MT** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. REZA TANZIL, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. REZA TANZIL, ST, MT**
Jabatan : **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - IV**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. REZA TANZIL, ST, MT** | **Ir. REZA TANZIL, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - IV

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - IV | 1.1 Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | 1 Lembaga |
| | | 1.2 Tersedianya laporan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - IV | 12 Lap |
| 2. | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - IV | 2.1 Tersedianya Laporan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - IV | 12 Lap |
| 3. | Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektor, Partisipasi dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air | 3.1 Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melalui TKPSDA | 12 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi** | **Rp 18.517.196** |

**Banda Aceh, 2025**

**Plt. KEPALA UPTD PI WIL - IV**

**Ir. REZA TANZIL, ST, MT**

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

**Ir. REZA TANZIL, ST, MT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKMAL, ST. MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. REZA TANZIL, ST, MT**
Jabatan : **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - IV**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. REZA TANZIL, ST, MT** | **AKMAL, ST. MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - IV

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi | 1.1 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Yang Terlaksana | 12 Lap |
| | | 1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan kegiatan pengelola informasi | 1 Dok |
| | | 1.3 Terlaksananya kegiatan konsultasi dengan intansi terkait pengelolaan sumber daya air pada WS. Teunom-Lambesoi | 4 Keg |
| | | 1.4 Tersedianya dukungan Data dan Informasi bagi anggota TKPSDA WS. Teunom-Lambesoi | 3 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Rp 204.631.319 |

Banda Aceh, 2025

**Plt. KEPALA UPTD PI WIL - IV**

**Ir. REZA TANZIL, ST, MT**

**KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

**AKMAL, ST. MT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YASSIR SAFFANA, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. REZA TANZIL, ST, MT**
Jabatan : **Plt. KEPALA UPTD PI WIL - IV**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. REZA TANZIL, ST, MT** | **YASSIR SAFFANA, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - IV

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan sumber Daya Air dan Pengamatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah kerja UPTD Pengelolaan irigasi Wilayah IV | 1.1 Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | 4 DI |
| | | 1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air | 1 Dok |
| | | 1.3 Tersusunnya laporan pengelolaan alokasi air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) WS Teunom - Lambesoi | 14 Lap |
| | | 1.4 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap Konstruksi yang Dibangun pada WS. Teunom -lambesoi | 4 Keg |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| 1. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Rp 100.000.000 |

Banda Aceh, 2025

| Plt. KEPALA UPTD PI WIL - IV | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN |
|---|---|
| Ir. REZA TANZIL, ST, MT | YASSIR SAFFANA, ST, MT |

# UPTD PI WIL - V

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - V**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - V**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SURYA, ST, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGAIRAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
|---|---|
| **ADE SURYA, ST, ME** | **Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - V

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Baru - Kluet dan Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V | 1.1 Persentase Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA | 100 % |
| | | 1.2 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Baru - Kluet | 100 % |
| | | 1.3 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Kerja UPTD V | 100 % |

| KEGIATAN | | ANGGARAN |
|---|---|---|
| **1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp** | **255.133.324** |
| **2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp** | **120.937.196** |

**Banda Aceh, 2025**

**KEPALA DINAS PENGAIRAN**

**ADE SURYA, ST, ME**

**KEPALA UPTD PI WIL - V**

**Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - V**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **T. MUHAMMAD, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - V**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT** | **T. MUHAMMAD, SE** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - V

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - V | 1.1 Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | 1 Lembaga |
| | | 1.2 Tersedianya laporan Administrasi Aparatur UPTD PI WIL - V | 12 Lap |
| 2. | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - V | 2.1 Tersedianya Laporan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur UPTD PI WIL - V | 12 Lap |
| 3. | Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektor, Partisipasi dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air | 3.1 Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melalui TKPSDA | 12 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi** | **Rp 20.937.196** |

Banda Aceh, 2025

**KEPALA UPTD PI WIL - V**

**Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT**

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

**T. MUHAMMAD, SE**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - V**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. HENDRA SATRIA, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - V**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT** | **Ir. HENDRA SATRIA, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - V

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Baru - Kluet | 1.1 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Yang Terlaksana | 12 Laporan |
| | | 1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan kegiatan pengelola informasi | 1 Dok |
| | | 1.3 Terlaksananya kegiatan konsultasi dengan intansi terkait pengelolaan sumber daya air pada WS. Baru - Kluet | 4 Keg |
| | | 1.4 Tersedianya dukungan Data dan Informasi bagi anggota TKPSDA WS. Baru - Kluet | 3 Lap |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi** | **Rp 255.133.324** |

**Banda Aceh, 2025**

**KEPALA UPTD PI WIL - V**

**Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT**

**KEPALA SEKSI PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

**Ir. HENDRA SATRIA, ST, MT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**UPTD PI WIL - V**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. GUNAWAN, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT**
Jabatan : **KEPALA UPTD PI WIL - V**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
| --- | --- |
| **Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT** | **Ir. GUNAWAN, ST, MT** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# DINAS PENGAIRAN
# UPTD PI WIL - V

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan sumber Daya Air dan Pengamatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah kerja UPTD Pengelolaan irigasi Wilayah V | 1.1 Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya | 5 DI |
| | | 1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air | 1 Dok |
| | | 1.3 Tersusunnya laporan pengelolaan alokasi air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) WS Baru - Kluet | 14 Lap |
| | | 1.4 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap Konstruksi yang Dibangun pada WS. Baru - Kluet | 1 Keg |

| SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|
| **1. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi** | **Rp 100.000.000** |

Banda Aceh, 2025

**KEPALA UPTD PI WIL - V**

**Ir. BAMBANG YUSRI, ST. MT**

**KEPALA SEKSI OPERASI DAN PELAPORAN**

**Ir. GUNAWAN, ST, MT**

PEMERINTAH ACEH

DINAS PENGAIRAN

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH ACEH
**DINAS PENGAIRAN**
Jl. Ir. H. Mohd. Thaher No. 18 Telp. (0651) 21982, 21919, 24212, 22899, 33126, 21167
Fax. 23686 - email pengairan@acehprov.go.id PO Box-130 LUENG BATA – BANDA ACEH (23247)

Banda Aceh, 11 April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H

Yang Terhormat,

**Gubernur Aceh**
u.p. Kepala Biro Organisasi
Setda Aceh

di-

**Banda Aceh**

## SURAT PENGANTAR

Nomor : 610/ 690

| No | Macam yang Dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 | 1 (satu) eks | Dengan hormat kami sampaikan dokumen dimaksud berupa *hardcopy* beserta *softcopy* untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |

**KEPALA DINAS PENGAIRAN**

**ADE SURYA, ST., ME**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700428 199703 1 003

**PEMERINTAH ACEH**

# DINAS PENGAIRAN

**Jln. Mohd. Thaher No. 18 Telp (0651) 21982,21919,24212,22899,33126,211167 Fax. 23686**
**Fax.(0651) 23686 Email:pengairan@acehprov.go.id PO.Box-130 LUENG BATA -BANDA ACEH (23247)**

**KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS PENGAIRAN**
**NOMOR : KU.954.1-A /KPTS/ 170 /2023**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**DINAS PENGAIRAN**

**KEPALA DINAS PENGAIRAN,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Undang-undang.....

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4090);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah .....

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4817);

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6056);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

31. Peraturan Presiden .....

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

41. Peraturan Menteri.....

41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
45. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
46. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
47. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
49. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SS, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
50. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020, tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

51. Qanun Aceh .....

51. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

52. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);

53. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

54. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

55. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

56. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

57. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

58. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

59. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi;

60. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;

61. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);

62. Peraturan Gubernur.....

62. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
63. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Recana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 114);
64. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh;
65. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh;
66. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Aceh;
67. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pengairan Aceh;
68. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
69. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
70. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;
71. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2023 ;
72. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana

kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengairan Tahun 2017-2022.

KETIGA : Penetapan IKU Kepala Dinas Pengairan bertujuan untuk:

a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengairan Aceh yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Maret 2023
22 Sya'ban 1444

**KEPALA DINAS PENGAIRAN**

PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

**ABE SURYA, ST, ME**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700428 199701 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengairan
Nomor : KU.954.1-A/KPTS/170/2023
Tanggal : 15 Maret 2023 M
23 Sya'ban 1444 H

Nama SKPA : Dinas Pengairan Aceh

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air

Fungsi :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
d. Penyelenggaraan tugas di bidang irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air;
f. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan jaringan sumber daya air
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan sumber daya air
h. Pembinaan UPTD
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

**Indikator Kinerja Utama :**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Daerah | Formulasi/Cara Pengukuran | Penjelasan | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatkan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik | 1.1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik (%) | $\frac{\textit{Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik} + \textit{Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi dari Genangan Banjir}}{2}$ | Mengukur rata-rata kinerja manfaat infrastruktur SDA dalam kondisi baik guna menangani masalah pengairan terhadap pelayanan air ke areal sawah dan pengendalian banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama | Bidang O&P dan Bidang Irigasi, Rawa & Pantai dan Bidang Sungai Danau & Waduk Dinas Pengairan Aceh | |
| | | 1.1.1 Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik (%) | $\frac{\textit{Luas Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Kondisi Baik}}{\textit{Luas Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi}} \times 100\%$ | Mengukur kinerja manfaat infrastruktur Pengairan terhadap pelayanan air ke areal sawah | Bidang O&P dan Bidang Irigasi, Rawa & Pantai Dinas Pengairan Aceh | |
| | | 1.1.2 Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi dari Genangan Banjir (%) | $\frac{\textit{Luas kawasan yang Terlindungi dari Banjir berdasarkan Wilayah Sungai}}{\textit{Luas Total Genangan Banjir Berdasarkan Wilayah Sungai}} \times 100\%$ | Mengukur manfaat infrastruktur pengendalian banjir bagi kawasan yang terancam dari kerusakan akibat banjir luapan sungai dan pasang purnama | Bidang Sungai Danau & Waduk Dinas Pengairan Aceh; dan Bidang Irigasi, Rawa & Pantai Dinas Pengairan Aceh | |

Banda Aceh, 15 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENGAIRAN**

PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

**ADE SURYA, ST., ME**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700428 199703 1 003

| 1 Penerima | | PEMANFAATAN | 0214.A.033 |
|---|---|---|---|
| F1 | **REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI**<br>**PEMERINTAH ACEH - APBA 2024** | B | 3 |

**PAKET** : **Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Lambeusoi Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya**

**SKPA** : **DINAS PENGAIRAN**

**BIDANG** : **UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V**

**LOKASI** : **Desa Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya**

**ALAMAT** : **Jl. Ir. Moh. Taher No.18, Banda Aceh 23123**

**DENAH LOKASI**




**KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)**



**PENGELOLA ANGGARAN**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama PA | : | Ir. Ade Surya, ST, ME |
| 2. Nama Bendahara | : | Teuku Hidayat Yuwana, SE |
| 3. Nama KPA | : | Ir. Bambang Yusri, ST. MT |
| 4. Nama PPK | : | |
| 5. Nama PPTK | : | Ir. Hendra Satria, ST, MT |

**PENGELOLA TEKNIS**

| No | Nama | Instansi Asal |
|---|---|---|
| 1 | Ir. Hendra Satria, ST, | Dinas Pengairan Aceh |

**PENGGUNA / PENERIMA**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | Ir. Bambang Yusri, ST. MT |
| 2. Jabatan | : | Kepala UPTD Pengelola Irigasi Wilayah V |
| 3. Alamat | : | Jln. Ir. Mohd. Taher No. 18 Lueng Bata - Banda Aceh |

| KONSULTAN | : PERENCANAAN | : PENGAWASAN |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : **PT. PURI KENCANA KONSULINDO** | : **PT. BUILCO TOTAL KONSULTAN** |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jl. Cendana III Kelurahan Jeulingke Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh | : Jl. T. Hasan Dek No. 126, Beurawe, Banda Aceh |
| 3. Nama Pimpinan | : Riski Ananda | : Mohd Zubier Helmi, ST |
| 4. Nilai Kontrak | : **Rp. 99.144.000,-** | : **Rp. 470.551.000,- (1 Pkt)** |

**FOTO PELAKSANAAN**





**PELAKSANA**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | **PT.FATARA JULINDO PUTERA** |
| 2. Alamat Perusahaan | : | Jl. Laksamana Malahayati Km 08 Gp Kajhu Kec.Baitussalam - Aceh Besar |
| 3. No. Kontrak/ Add | : | KU.602-A/KPA-UPTD.V/KONS/751/2025 |
| 4. Nilai Kontrak/ Add | : | **Rp. 14.319.235.453,-** |
| 5. Waktu (Tanggal) | : | **161 Hari (Tgl 24 Jul 2025 s/d 31 Des 2025)** |
| 6. Nama Pimpinan | : | Rachmat Irawan |

*Sumber Dana*: **Otsus Aceh**

**PROVISIONAL HAND OVER (PHO)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nomor | : | |
| 2. Tanggal | : | |

**HASIL AKHIR : FUNGSIONAL**

Proses Lansir Mateial Batu Gajah ke Lokasi 37 DT per Hari

**FOTO 100%**











*Status Pemanfaatan →* B = Selesai, sudah dimanfaatkan, H = Selesai, belum dimanfaatkan, K = Selesai sesuai kontrak, berlanjut, M = Putus kontrak

| 1 Penerima | | PEMANFAATAN | 0215.A.033 |
|---|---|---|---|
| F1 | **REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI**<br>**PEMERINTAH ACEH - APBA 2024** | B | 4 |

**PAKET** : **Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Teunom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya (Lanjutan)**

**SKPA** : **DINAS PENGAIRAN**

**BIDANG** : **UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V**

**LOKASI** : **Desa Pasie Pawang Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya**

**ALAMAT** : **Jl. Ir. Moh. Taher No.18, Banda Aceh 23123**

**DENAH LOKASI**




**KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)**




**FOTO PELAKSANAAN**





| **PENGELOLA ANGGARAN** | | **PENGELOLA TEKNIS** | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nama PA | : Ir. Ade Surya, ST, ME | *No* | *Nama* | *Instansi Asal* |
| 2. Nama Bendahara | : Teuku Hidayat Yuwana, SE | 1 | Ir. Hendra Satria, ST, | Dinas Pengairan Aceh |
| 3. Nama KPA | : Ir. Bambang Yusri, ST. MT | | | |
| 4. Nama PPK | : | | | |
| 5. Nama PPTK | : Ir. Hendra Satria, ST, MT | | | |

**PENGGUNA / PENERIMA**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | Ir. Bambang Yusri, ST. MT |
| 2. Jabatan | : | Kepala UPTD Pengelola Irigasi Wilayah V |
| 3. Alamat | : | Jln. Ir. Mohd. Thaher No. 18 Lueng Bata - Banda Aceh |

| **KONSULTAN** | | **PERENCANAAN** | | **PENGAWASAN** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | **PT. JASA PATRIA GUNATAMA ENGINEERING CONSULTANT** | : | **PT. BUILCO TOTAL KONSULTAN** |
| 2. Alamat Perusahaan | : | Jalan Tgk Syarief Lr Nyak Puteh No.02, Kelurahan Jeulingke, | : | Jl. T. Hasan Dek No. 126, Beurawe, Banda Aceh |
| 3. Nama Pimpinan | : | Riski Ananda | : | Mohd Zubier Helmi, ST |
| 4. Nilai Kontrak | : | **Rp. 99.841.947,-** | : | **Rp. 472.327.644,- (1 Pkt)** |

**PELAKSANA**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | **PT. AMAR JAYA PRATAMA GROUP** |
| 2. Alamat Perusahaan | : | Jl. Cut Nyak Dhien Gp. Emperom Kec. Jaya Baru - Banda Aceh |
| 3. No. Kontrak/ Add | : | KU.602-A/KPA-UPTD.V/KONS/841/2025 |
| 4. Nilai Kontrak/ Add | : | **Rp. 14.262.102.022,-** |
| 5. Waktu (Tanggal) | : | **140 Hari (Tgl 14 Agu 2025 s/d 31 Des 2025)** |
| 6. Nama Pimpinan | : | H. Tutri Asrijal |

*Sumber Dana*: **Otsus Aceh**

**PROVISIONAL HAND OVER (PHO)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nomor | : | |
| 2. Tanggal | : | |

**HASIL AKHIR : FUNGSIONAL**

Bolder Ruas 1 ; 500 m & Ruas 2 ; 150 m

**FOTO 100%**











*Status Pemanfaatan* → B = Selesai, sudah dimanfaatkan, H = Selesai, belum dimanfaatkan, K = Selesai sesuai kontrak, berlanjut, M = Putus kontrak

| 1 Penerima | | PEMANFAATAN | 0174.A.033 |
|---|---|---|---|
| F1 | **REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI**<br>**PEMERINTAH ACEH - APBA 2024** | B | 5 |

**PAKET** : **Normalisasi Sungai Kr. Lageun - Pante Kuyun Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya**

**SKPA** : **DINAS PENGAIRAN**

**BIDANG** : **Sungai, Danau dan Waduk**

**LOKASI** : **Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya**

**ALAMAT** : **Jl. Ir. Moh. Taher No.18, Banda Aceh 23123**

**DENAH LOKASI**




**KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)**



**PENGELOLA ANGGARAN**

1. Nama PA : Ir. Ade Surya, ST, ME
2. Nama Bendahara : Teuku Hidayat Yuwana, SE
3. Nama KPA : Sejahtera, ST.MT
4. Nama PPK :
5. Nama PPTK : Jauhar, ST, MT

**PENGELOLA TEKNIS**

| No | Nama | Instansi Asal |
|---|---|---|
| | | |

**PENGGUNA / PENERIMA**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

| KONSULTAN | PERENCANAAN | PENGAWASAN |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : **CV. SEGITIGA EMAS KONSULTAN** | : **CV. SEGITIGA EMAS KONSULTAN** |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jl. Chik Geumpa I No. 06, Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam - Banda | : Jl. Chik Geumpa I No. 06, Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam - Banda Aceh |
| 3. Nama Pimpinan | : Riza Aulia, ST | : Riza Aulia, ST |
| 4. Nilai Kontrak | : **Rp. 685.040.000,-** | : **Rp. 143.004.000,-** |

**FOTO PELAKSANAAN**





**PELAKSANA**

1. Nama Perusahaan : **PT. NILA NASRA NINA**
2. Alamat Perusahaan : Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee - Aceh Jaya
3. No. Kontrak/ Add : KU.602-A/KPA-SDW/786/2025
4. Nilai Kontrak/ Add : **Rp. 4.525.760.000,-**
5. Waktu (Tanggal) : **112 Hari (Tgl 20 Agu 2025 s/d 9 Des 2025)**
6. Nama Pimpinan : Annasra

*Sumber Dana*: **Otsus Aceh**

**PROVISIONAL HAND OVER (PHO)**

1. Nomor :
2. Tanggal :

**HASIL AKHIR : FUNGSIONAL**

Normalisasi 3.600 m

**FOTO 100%**











*Status Pemanfaatan* → B = Selesai, sudah dimanfaatkan, H = Selesai, belum dimanfaatkan, K = Selesai sesuai kontrak, berlanjut, M = Putus kontrak

| 1 Penerima | | PEMANFAATAN | 0175.A.033 |
|---|---|---|---|
| F1 | **REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI**<br>**PEMERINTAH ACEH - APBA 2024** | B | 6 |

**PAKET** : **Normalisasi Sungai Kr. Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya**

**SKPA** : **DINAS PENGAIRAN**

**BIDANG** : **Sungai, Danau dan Waduk**

**LOKASI** : **Desa Kuta Tuha Kec. Panga Kab. Aceh Jaya**

**ALAMAT** : **Jl. Ir. Moh. Taher No.18, Banda Aceh 23123**

**DENAH LOKASI**




**KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)**



**PENGELOLA ANGGARAN**

1. Nama PA : Ir. Ade Surya, ST, ME
2. Nama Bendahara : Teuku Hidayat Yuwana, SE
3. Nama KPA : Sejahtera, ST.MT
4. Nama PPK :
5. Nama PPTK : Jauhar, ST, MT

**PENGELOLA TEKNIS**

| No | Nama | Instansi Asal |
|---|---|---|
| | | |

**PENGGUNA / PENERIMA**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

| KONSULTAN | : PERENCANAAN | : PENGAWASAN |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : **PT. PURI KENCANA KONSULINDO** | : **CV. SEGITIGA EMAS KONSULTAN** |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jl. Cendana III Kelurahan Jeulingke Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh | : Jl. Chik Geumpa I No. 06, Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam - Banda Aceh |
| 3. Nama Pimpinan | : Bella Gusrina | : Riza Aulia, ST |
| 4. Nilai Kontrak | : **Rp. 99.713.187,-** | : **Rp. 143.113.000,-** |

**FOTO PELAKSANAAN**





**PELAKSANA**

1. Nama Perusahaan : **CV. ALAM MEGA JAYA**
2. Alamat Perusahaan : Gampong Alue Ambang Kec. Teunom - Aceh Jaya
3. No. Kontrak/ Add : KU.602-A/KPA-SDW/744/2025
4. Nilai Kontrak/ Add : **Rp. 4.391.460.260,-**
5. Waktu (Tanggal) : **112 Hari (Tgl 12 Agu 2025 s/d 1 Des 2025)**
6. Nama Pimpinan : Rahmat Irawan

*Sumber Dana*: **Otsus Aceh**

**PROVISIONAL HAND OVER (PHO)**

1. Nomor :
2. Tanggal :

**HASIL AKHIR : FUNGSIONAL**

Normalisasi 1.300 m

**FOTO 100%**











*Status Pemanfaatan* → B = Selesai, sudah dimanfaatkan, H = Selesai, belum dimanfaatkan, K = Selesai sesuai kontrak, berlanjut, M = Putus kontrak

| 1 Penerima | | PEMANFAATAN | 0176.A.033 |
|---|---|---|---|
| F1 | **REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI**<br>**PEMERINTAH ACEH - APBA 2024** | B | 7 |

**PAKET** : **Normalisasi Sungai Kr. Trumon Gp. Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan**

**SKPA** : **DINAS PENGAIRAN**

**BIDANG** : **Sungai, Danau dan Waduk**

**LOKASI** : Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan

**ALAMAT** : **Jl. Ir. Moh. Taher No.18, Banda Aceh 23123**

**DENAH LOKASI**




**KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)**



**FOTO PELAKSANAAN**





**PENGELOLA ANGGARAN**

1. Nama PA : Ir. Ade Surya, ST, ME
2. Nama Bendahara : Teuku Hidayat Yuwana, SE
3. Nama KPA : Sejahtera, ST.MT
4. Nama PPK :
5. Nama PPTK : Jauhar, ST, MT

**PENGELOLA TEKNIS**

| No | Nama | Instansi Asal |
|---|---|---|
| | | |

**PENGGUNA / PENERIMA**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

| KONSULTAN | PERENCANAAN | PENGAWASAN |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : **CV. MULTI PARTNER CONSULTANT** | : **CV. MOZARINDO CONSULTANT** |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jl. Yossudarso Jurong Dapu Bata, Gp. Cot Ba'U Kec. Sukajaya - Sabang | : Jl. Tgk. Dihaji Ds. Lamdingin Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh |
| 3. Nama Pimpinan | : Rifan Ramodha, ST | : Mhd. Ichsan |
| 4. Nilai Kontrak | : **Rp. 813.800.000,-** | : **Rp. 49.750.200,-** |

**PELAKSANA**

1. Nama Perusahaan : **CV. DATUK RAJA DEWA**
2. Alamat Perusahaan : Jl. Iskandar Muda No.257 Kec. Babussalam - Aceh Tenggara
3. No. Kontrak/ Add : KU.602-A/KPA-SDW/755/2025
4. Nilai Kontrak/ Add : **Rp. 911.999.000,-**
5. Waktu (Tanggal) : **84 Hari (Tgl 13 Agu 2025 s/d 4 Nov 2025)**
6. Nama Pimpinan : Deo Baskara

*Sumber Dana*: **Otsus Aceh**

**PROVISIONAL HAND OVER (PHO)**

1. Nomor :
2. Tanggal :

**HASIL AKHIR : ----------**

Normalisasi 2,8 KM

**FOTO 100%**











*Status Pemanfaatan →* B = Selesai, sudah dimanfaatkan, H = Selesai, belum dimanfaatkan, K = Selesai sesuai kontrak, berlanjut, M = Putus kontrak

| 1 Penerima | | PEMANFAATAN | 0288.A.033 |
|---|---|---|---|
| F1 | | B | 8 |

# REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI
## PEMERINTAH ACEH - APBA 2024

**PAKET** : **Pembangunan Saluran Suplesi D.I. Kr. Nalan Kab. Bireuen (Lanjutan)**

**SKPA** : **DINAS PENGAIRAN**

**BIDANG** : **Irigasi, Rawa dan Pantai**

**LOKASI** : **Kec. Peulimbang Kab. Bireuen**

**ALAMAT** : **Jl. Ir. Moh. Taher No.18, Banda Aceh 23123**

**DENAH LOKASI**




**KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)**



**FOTO PELAKSANAAN**





| PENGELOLA ANGGARAN | | PENGELOLA TEKNIS | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nama PA | : Ir. Ade Surya, ST, ME | No | Nama | Instansi Asal |
| 2. Nama Bendahara | : Teuku Hidayat Yuwana, SE | | | |
| 3. Nama KPA | : Ir. Marzuki, ST. MT | | | |
| 4. Nama PPK | : | | | |
| 5. Nama PPTK | : Khairuddin, ST, MT | | | |

**PENGGUNA / PENERIMA**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

| KONSULTAN | PERENCANAAN | PENGAWASAN |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : **CV. AGATHIS** | : **PT. BUILCO TOTAL KONSULTAN** |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jl. Perdamaian Lr. Pelangi No. 05 - Lhokseumawe | : |
| 3. Nama Pimpinan | : Ir. Kusnadi | : |
| 4. Nilai Kontrak | : **Rp. 329.518.000,-** | : **Rp.** |

**PELAKSANA**

1. Nama Perusahaan : **CV. PEUSANGAN BUMI AGUNG**
2. Alamat Perusahaan : Jl. Medan - Banda Aceh No. 52 Matang Glp Dua - Bireuen
3. No. Kontrak/ Add : 602/KPA-IRP/708/2025
4. Nilai Kontrak/ Add : **Rp. 1.372.384.000,-**
5. Waktu (Tanggal) : **140 Hari (Tgl 13 Agu 2025 s/d 30 Des 2025)**
6. Nama Pimpinan : Husni

*Sumber Dana*: **Otsus Aceh**

**PROVISIONAL HAND OVER (PHO)**

1. Nomor :
2. Tanggal :

**HASIL AKHIR :** ----------

TPT ; 70 m, Saluran tertutup ; 40 m, Normalisasi 3 Km

**FOTO 100%**

*Status Pemanfaatan →* B = Selesai, sudah dimanfaatkan, H = Selesai, belum dimanfaatkan, K = Selesai sesuai kontrak, berlanjut, M = Putus kontrak

| 1 Penerima | | PEMANFAATAN | 0267.A.033 |
|---|---|---|---|
| F1 | **REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI**<br>**PEMERINTAH ACEH - APBA 2024** | B | 9 |

**PAKET** : **Peningkatan Bendung D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Lanjutan)**

**SKPA** : **DINAS PENGAIRAN**

**BIDANG** : **Irigasi, Rawa dan Pantai**

**LOKASI** : **Desa Jambo Reuhat Kec. Banda Alam Kab. Aceh Timur**

**ALAMAT** : **Jl. Ir. Moh. Taher No.18, Banda Aceh 23123**

**DENAH LOKASI**




**KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)**




**FOTO PELAKSANAAN**





| PENGELOLA ANGGARAN | | PENGELOLA TEKNIS | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nama PA | : Ir. Ade Surya, ST, ME | *No* | *Nama* | *Instansi Asal* |
| 2. Nama Bendahara | : Teuku Hidayat Yuwana, SE | | | |
| 3. Nama KPA | : Ir. Marzuki, ST. MT | | | |
| 4. Nama PPK | : | | | |
| 5. Nama PPTK | : Khairuddin, ST, MT | | | |

**PENGGUNA / PENERIMA**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

| KONSULTAN | : PERENCANAAN | : PENGAWASAN |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : **PT. MASSUKA PRATAMA** | : **CV. ACEH ENGGINEERING CONSULTANT** |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jl. Ujung Berung Indah Asri I No. 05, Bandung | : Jl. Cot Sabong Gg. M. Ali Buraq Gp. Uteunkot, Kec. Muara Dua - Lhokseumawe |
| 3. Nama Pimpinan | : Ade Kusnadi, ST | : Jeni Weriski |
| 4. Nilai Kontrak | : **Rp. 499.500.000,-** | : **Rp. 94.477.650,-** |

**PELAKSANA**

1. Nama Perusahaan : **CV. ANANDA PUTROE BALQIS**
2. Alamat Perusahaan : Jl. Sisingamangaraja No.97 Gp. Peunayong Kec. Kuta Alam - Banda Aceh
3. No. Kontrak/ Add : 602/KPA-IRP/709/2025
4. Nilai Kontrak/ Add : **Rp. 952.321.000,-**
5. Waktu (Tanggal) : **140 Hari (Tgl 13 Agu 2025 s/d 30 Des 2025)**
6. Nama Pimpinan :

*Sumber Dana*: **Otsus Aceh**

**PROVISIONAL HAND OVER (PHO)**

1. Nomor :
2. Tanggal :

**HASIL AKHIR : ----------**

Kanopi Pintu Air 2 Unit, Saluran ... M, Timbunan Tanggul ... M3

**FOTO 100%**











*Status Pemanfaatan →* B = Selesai, sudah dimanfaatkan, H = Selesai, belum dimanfaatkan, K = Selesai sesuai kontrak, berlanjut, M = Putus kontrak

| 1 Penerima | | PEMANFAATAN | 0172.A.033 |
|---|---|---|---|
| F1 | **REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI**<br>**PEMERINTAH ACEH - APBA 2024** | B | 10 |

**PAKET** : **Pembangunan Tanggul dan Pengaman Tebing Sungai Kr. Tamiang Kab. Aceh Tamiang**

**SKPA** : **DINAS PENGAIRAN**

**BIDANG** : **UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V**

**LOKASI** : **Kab. Aceh Tamiang**

**ALAMAT** : **Jl. Ir. Moh. Taher No.18, Banda Aceh 23123**

**DENAH LOKASI**




**KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)**



**PENGELOLA ANGGARAN**

1. Nama PA : Ir. Ade Surya, ST, ME
2. Nama Bendahara : Teuku Hidayat Yuwana, SE
3. Nama KPA : Ir. Faisal, ST. MT
4. Nama PPK :
5. Nama PPTK : Irfan, ST

**PENGELOLA TEKNIS**

| No | Nama | Instansi Asal |
|---|---|---|
| | | |

**PENGGUNA / PENERIMA**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

| KONSULTAN | : PERENCANAAN | : PENGAWASAN |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : **PT. HIDROTEKNIK ANDALAN** | : **PT. TRAYA MADANI KONSULTAN** |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jl. Tgk. Chik No. 01, Ds. Lamdom Kec. Lueng Bata - Banda Aceh | : Jl. Darma No. 43 A, Gp. Laksana Kec. Kuta Alam - Banda Aceh |
| 3. Nama Pimpinan | : Sumardi, ST | : Muhammad, ST |
| 4. Nilai Kontrak | : **Rp. 99.561.000,-** | : **Rp. 167.077.200,-** |

**FOTO PELAKSANAAN**





**PELAKSANA**

1. Nama Perusahaan : **CV. MATANG KOALISI**
2. Alamat Perusahaan : Jl. Mesjid Assadaqah Lr. Lestari Gp. Lamlagang, Kec. Banda Raya - Banda Aceh
3. No. Kontrak/ Add : KU.602-A/KPA-UPTD PI WII-III/KONS/472/2025
4. Nilai Kontrak/ Add : **Rp. 4.207.756.355,-**
5. Waktu (Tanggal) : **113 Hari (Tgl 13 Agu 2025 s/d 3 Des 2025)**
6. Nama Pimpinan : Andriwyan Siddiq, ST

*Sumber Dana*: **Otsus Aceh**

**PROVISIONAL HAND OVER (PHO)**

1. Nomor :
2. Tanggal :

**HASIL AKHIR : FUNGSIONAL**

Tanggul Krib Beton 1.800 Bh/ 30 m 3 Lokasi

**FOTO 100%**












*Status Pemanfaatan →* B = Selesai, sudah dimanfaatkan, H = Selesai, belum dimanfaatkan, K = Selesai sesuai kontrak, berlanjut, M = Putus kontrak

# REKAM JEJAK PERTEMUAN/PELATIHAN
# DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2025

**SEKSI** : **REHABILITASI DAN PEMBINAAN TERSIER**

**BIDANG** : **OPERASI & PEMELIHARAAN**

Judul : Pelaksanaan Sidang Pertama Komisi Irigasi
Waktu : Juli 2025
Tempat : Banda Aceh

**A. YANG MEMBUAT TOR**

- Nama : Said Syafril Mirdhan, SE
- Jabatan : Pengawas Jaringan Utilitas

**B. DASAR PELAKSANAAN**

- SK Tenaga Ahli Komisi Irigasi : 600.1.4/727/2025
- SK Pembentukan Komir Periode II : 050/1489/2021
- SK Sekretariat Komir : 600.1.2/751/2025

**C. WAKTU PELAKSANAAN : 2 HARI (29 s/d 30 JULI 2025)**

**PENGELOLA ANGGARAN**

PA : Ade Surya, ST.ME
KPA : M. Nasir, ST., M.Si
PPK : -
PPTI : Ir. Reza Tanzil, ST.,MT
Bend : Cut Yulia

**SEKRETARIAT**

Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Operasi & Pemeliharaan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Kepala Sub Bagian Sidang, Data dan Informasi : Fauzan Nur, S.Hut., M.Si

Anggota : Kepala UPTD Wil IV Dinas Pengairan Fauzan, ST
Reyna Listiani, SP., M.Si

Anggota : Kepala Seksi Rehabiltasi Dedi Sofriadi, ST., MT
Ary Herfiansyah, ST., MT

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program : Kepala UPTD Wil I Dinas Pengairan

Anggota : Iwan Syahdi, ST., MT
Said Syafril Mirdhan, SE
Rizal Fachlevi, SP., M.Si

**TUJUAN**

Diadakannya Sidang Pertama Komisi Irigasi Aceh adalah mengevaluasi hasil Rekomendasi Sidang kedua tahun 2024/2025 terhadap Keputusan Gubernur Nomor 600.1.2.3/960/2024 tentang Penetapan Rencana Pola dan Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Aceh Tahun 2024/2025, serta membahas tentang Rencana Pola dan Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh Tahun 2025/2026

**MATERI POKOK DAN NARA SUMBER**

| No | Materi Pokok | Narasumber | |
|---|---|---|---|
| | | Nama | Asal Instansi |
| 1 | Pengaruh Iklim terhadap Penentuan Pola dan Tata Tanam Tahun 2025/2026 | Badan Meteorologi Klimatologi Moh. Rizal | Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika |
| 2 | Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Ketahanan Pangan | Ir. Azanuddin Kurnia, SP,.MP | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| 3 | Potensi dan Ketersediaan Air Pada Daerah Irigasi Dalam Menghadapi Musim Gadu dan Rendengan Tahun 2025/2026 | Yunira Ardiana, ST,. M.Sc | Balai Sungai Sumatera I |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

**FOTO PEMBUKAAN**



**FOTO PELAKSANAAN**



**FOTO PELAKSANAAN**



**FOTO PELAKSANAAN**



**FOTO PELAKSANAAN**



**FOTO PENUTUPAN**



**PESERTA 43 ORG (TERDIRI DARI UNSUR PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH )**

| No | Nama Peserta | Unit Kerja/ Dinas | No | Nama Peserta | Unit Kerja/ Dinas | No | Nama Peserta | Unit Kerja/ Dinas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilmi, SE, MM | Dinas Pengairan | 22 | Banta Umar | Komir D.I Jeuram | 43 | Lukman | Komir D.I Peudada |
| 2 | Weny Ayu Ferianti | Bappeda Pidie Jaya | | Sabri Ariga | Komir D.I Weih Sejuk | | | |
| 3 | Ria Darma | Bappeda Aceh Selatan | 24 | Razali M.Isa | Komir D.I Jambo Aye | | | |
| 4 | Yudha | Distanbun Aceh | 25 | Sulaiman Hamzah | Komir D.I Jambo Aye | | | |
| 5 | Tanrizal | Bappeda Aceh Tamiang | 26 | Jalaluddin | Komir D.I Manggeng | | | |
| 6 | Fitriani | Bappeda Pidie | 27 | A Munir | Komir D.I Krueng Aceh | | | |
| 7 | Tajuddin | Bappeda Aceh Besar | 28 | Zurmi Wali | Komir D.I Gunung Pudung | | | |
| 8 | Erma Deliyani | Bappeda Nagan Raya | 29 | Jamil Arsyad | Komir D.I Paya Dapur | | | |
| 9 | M. Ikhsan | Bappeda Bireuen | 30 | Umar Ali | Komir D.I Alue Ubay | | | |
| 10 | Nurdin Ibrahim | Komir D.I Meureudu | 31 | H. Yusri Abdullah | Komir D.I Pante Lhoong | | | |
| 11 | Budiman Abdullah | Komir D.I Baroe Raya | 32 | Edi Suriadi | PUPR Aceh Tenggara | | **Total** | **43** |
| 12 | M. Nasir | Komir D.I Nalan | 33 | Ikwan | Biro Pembangunan | | | |
| 13 | M. Jafar | Komir D.I Krueng Pase | 34 | Nuraliyah | Satpol PP | | | |
| 14 | Darmi | Komir D.I Susoh | 35 | Karsani | DLHK | | | |
| 15 | Muntashar | Komir D.I Pante Kuyun | 36 | Irnawati | Biro Perekonomian | | | |
| 16 | Muhammad Iqbal | Komir D.I Krueng Tuan | 37 | Fauzan Nur | Bappeda Aceh | | | |
| 17 | Noerdin Ismail | Komir D.I Samalanga | 38 | Sutarni | BMKG | | | |
| 18 | Noerdin Jamil | Komir D.I Jamboe Reuhat | 39 | Rahmat Saleh | Bappeda Gayo Lues | | | |
| 19 | Akhi Ali | Komir D.I Babah Rote | 40 | Samsul Bahri | Bappeda Aceh Utara | | | |
| 20 | Ibnu Hajar | Komir D.I Cubo Trienggadeng | 41 | Suprinaldi | Bappeda Aceh Barat Daya | | | |
| 21 | Sanusi Walad | Komir D.I Krueng Jreu | 42 | Risky Amelia Farida | BWSS- I | | | |

# REKAM JEJAK PERTEMUAN/PELATIHAN
# DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2025

**SEKSI** : **REHABILITASI DAN PEMBINAAN TERSIER**

**BIDANG** : **OPERASI & PEMELIHARAAN**

Judul : Pelaksanaan Sidang Pertama Komisi Irigasi
Waktu : Nopember 2025
Tempat : Banda Aceh

**A. YANG MEMBUAT TOR**

- Nama : Said Syafril Mirdhan, SE
- Jabatan : Pengawas Jaringan Utilitas

**B. DASAR PELAKSANAAN**

- SK Tenaga Ahli Komisi Irigasi : 600.1.4/727/2025
- SK Pembentukan Komir Periode II : 050/1489/2021
- SK Sekretariat Komir : 600.1.2/751/2025

**C. WAKTU PELAKSANAAN : 2 HARI (18 s/d 19 NOPEMBER 2025)**

**PENGELOLA ANGGARAN**

PA : Erwin Ferdinansyah, ST,MT
KPA : M. Rizal, ST, MT
PPK : -
PPT : Ir. Reza Tanzil, ST.,MT
Ben : Cut Yulia

**SEKRETARIAT**

Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Operasi & Pemeliharaan

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha | : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh | Kepala Sub Bagian Sidang, Data dan Informasi | : Fauzan Nur, S.Hut., M.Si |
| Anggota | : Kepala UPTD Wil IV Dinas Pengairan Fauzan, ST<br>Reyna Listiani, SP., M.Si | Anggota | : Kepala Seksi Rehabiltasi Dedi Sofriadi, ST., MT<br>Ary Herfiansyah, ST., MT |
| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | : Kepala UPTD Wil I Dinas Pengairan | | |
| Anggota | : Iwan Syahdi, ST., MT<br>Said Syafril Mirdhan, SE<br>Rizal Fachlevi, SP., M.Si | | |

**TUJUAN**

Mengevaluasi hasil rekomedasi sidang kedua tahun 2024 serta merumuskan Rencana Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi Prioritas Penyediaan Dana, Prioritas Pemeliharaan dan Prioritas Rehabilitasi untuk tahun 2026

**MATERI POKOK DAN NARA SUMBER**

| No | Materi Pokok | Narasumber | |
|---|---|---|---|
| | | Nama | Asal Instansi |
| 1 | Peningkatan jaringan Tersier melalui Kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3-TGAI) | Erlangga Perwira | Balai Sungai Sumatera -1 |
| 2 | Pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan pada Jaringan Utama | Iwan Syahdi, ST.MT | Dinas Pengairan Aceh |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

**FOTO PEMBUKAAN**



**FOTO PELAKSANAAN**



**FOTO PELAKSANAAN**



**FOTO PELAKSANAAN**



**FOTO PELAKSANAAN**



**FOTO PENUTUPAN**



**PESERTA 42 ORG (TERDIRI DARI UNSUR PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH )**

| No | Nama Peserta | Unit Kerja/ Dinas | No | Nama Peserta | Unit Kerja/ Dinas | No | Nama Peserta | Unit Kerja/ Dinas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Ferdinsyah, ST, MT | Dinas Pengairan | 22 | Rizal Fachlevi | Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh | | | |
| 2 | M. Nasir, ST,MS.i | Dinas Pengairan | 23 | Akhi Ali | Komir D.I Babah Rote | | | |
| 3 | Fauzan Nur | Bappeda | 24 | Ammar Hadi | Dinas Perkim Kab. Aceh Tenggara | | | |
| 4 | Ikwan | Biro Adpem | 25 | Fitriani | Bappeda Kab. Pidie | | | |
| 5 | Dedy Andrian | Satpol PP | 26 | Tanrizal | Bappeda Kab. Aceh Tamiang | | | |
| 6 | Erlangga | BWS -I | 27 | Dea Rismasilina | BMKG | | | |
| 7 | M. Jafar | Komir D.I Krueng Aceh | 28 | Razali M.Isa | Komir D.I Jambo Aye Kab. Aceh Utara | | | |
| 8 | Budiman Abd | Komir D.I Baro Raya | 29 | Syamsuddin Asriady | DLHK Aceh | | | |
| 9 | Sanusi Walad | Komir D.I Krueng Jreu | 30 | Sabri Ariga | Komir D.I Weih Sejuk | | | |
| 10 | Muntashar | Komir D.I Pante Kuyun | 31 | T.Idris Thaib | Komir D.I Buloh Blang Ara | | | |
| 11 | Nurdin Ibrahim | Komir D.I Meureudu | 32 | H.Yusri Abdullah | Komir D.I Pante Lhong | **Total** | | **42** |
| 12 | M. Nasir | Komir D.I Nalan | 33 | Samsul Bahri | Bappeda Kab. Aceh Utara | | | |
| 13 | Nurdin Ismail | D.I Samalanga | 34 | M. Ikhsan | Bappeda Kab. Bireuen | | | |
| 14 | Juanda | Bappeda Kab. Abdya | 35 | Erma Deliani | Bappeda Kab. Nagan Raya | | | |
| 15 | M. Iqbal | Komir D.I Krueng Tuan | 36 | Sulaiman Hamzah | Komir D.I Jambo Aye Kab. Aceh Timur | | | |
| 16 | Ibnu Hajar | Komir D.I Cubo Trienggadeng | 37 | Ria Dama | Bappeda Kab. Aceh selatan | | | |
| 17 | A.Munir | Komir D.I Krueng Aceh | 38 | Syaiba Ibrahim | MAA | | | |
| 18 | Jalaluddin | Komir D.I Manggeng | 39 | Darmi | Komir D.I Susoh | | | |
| 19 | Tajuddin | Bappeda kab. Aceh Besar | 40 | Umar Ali | Komir D.I Alue Ubay | | | |
| 20 | Warda | Biro Perekonomian | 41 | Banta Umar | Komir D.I Jeuram | | | |
| 21 | Zurmi Wali | Komir D.I Gunung Pudung | 42 | Lukman | Komir D.I Peudada | | | |